

repository.ub.ac.id

**PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PADA  
PENDIDIKAN DASAR DI INDONESIA TAHUN  
2015-2018**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana  
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**KARTIKA APRILYANI PUTRI  
155030101111123**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
MALANG  
2019**

UNIVERSITAS  
BRAWIJAYA

### MOTTO

“Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur atas segala yang masih saya miliki dan segala keadaan yang masih bisa saya selesaikan sampai saat ini”

-Ainun

“Kebahagiaan orang tua adalah surga anak-anaknya”

-Maesaroh

“practice makes perfect ”

-Tika

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pembangunan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia pada  
Pendidikan Dasar di Indonesia Tahun 2015-2018

Disusun Oleh : Kartika Aprilyani Putri

NIM : 155030101111423

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Malang, April 2019

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



Dr. Sujarwoto, S.IP., M.Si., M.PA  
NIP. 19750130 200312 1 002

Trisnawati, S.Sos., M.AP  
NIP. 19800307 200801 2 012

**TANDA PENGESAHAN**

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 02 Mei 2019

Pukul : 09.30 WIB

Skripsi atas nama : Kartika Aprilyani Putri

Judul : Pembangunan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia pada Pendidikan Dasar di Indonesia tahun 2015-2018

Dan dinyatakan

**LULUS**

**MAJELIS PENGUJI**

Ketua Komisi Pembimbing 1



Dr. Sujarwoto, S.IP., M.Si., M.PA  
NIP. 19750130 200312 1 002

Anggota Pembimbing 2



Trisnawati, S.Sos., M.AP  
NIP. 19800307 200801 2 012

Komisi Penguji



Dr. Ainul Hayat, S.Pd., M.Si  
NIP. 19730713 200604 1 001

### PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi yang berjudul **“Pembangunan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia pada Pendidikan Dasar di Indonesia Tahun 2015-2018”** tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 28 Maret 2019

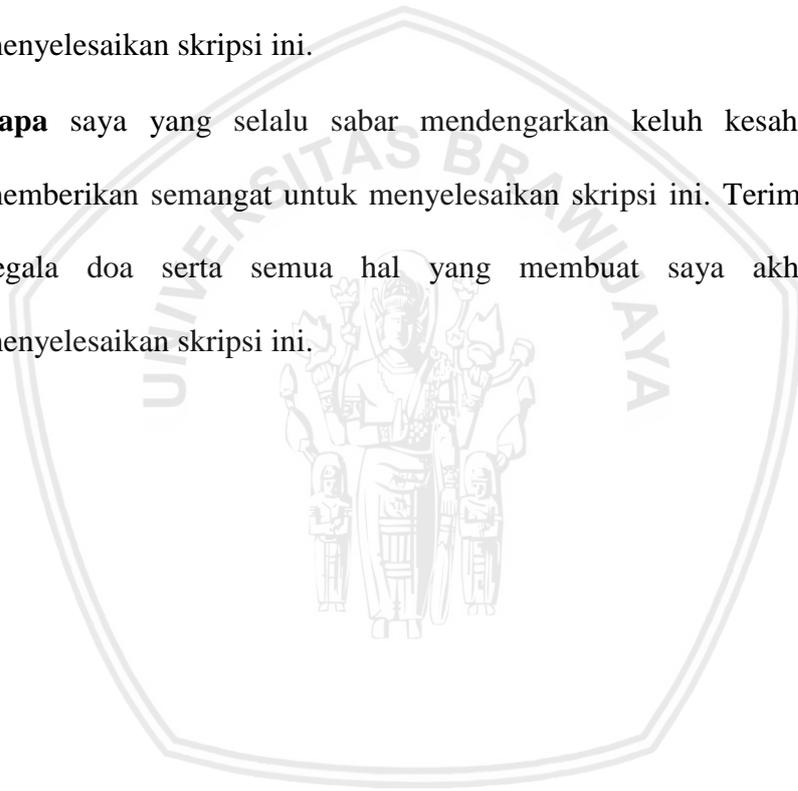


Kartika Aprilyani Putri  
NIM. 15503010111123

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- **Mama** saya yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik saya hingga saat ini. Terimakasih atas segala kesabaran dan doa yang tidak pernah putus yang selalu menguatkan saya untuk terus berjuang menyelesaikan skripsi ini.
- **Papa** saya yang selalu sabar mendengarkan keluh kesah saya dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas segala doa serta semua hal yang membuat saya akhirnya bisa menyelesaikan skripsi ini.



## RINGKASAN

Kartika Aprilyani Putri, 2019. **Pembangunan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia pada Pendidikan Dasar di Indonesia Tahun 2015-2018.** Jurusan Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya. Dosen pembimbing: Dr. Sujarwoto, S.IP., M.Si., M.PA dan Trisnawati, S.Sos., M.AP.

---

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia pada pendidikan dasar di Indonesia. Pendidikan dasar tidak dapat terlaksana apabila tidak didukung dengan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai. Telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 24 Tahun 2007 dan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 mengenai ketentuan infrastruktur dan sumber daya manusia pada pendidikan dasar di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pencapaian pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia pada pendidikan dasar di Indonesia tahun 2015-2018.

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode statistik deskriptif. Indikator dalam penelitian ini adalah infrastruktur pada pendidikan dasar dan sumber daya manusia pada pendidikan dasar. Populasi pada penelitian ini adalah SD/MI dan SMP/MTs yang terdapat pada 514 Kabupaten/Kota yang terdapat di Indonesia. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat dari website data pokok pendidikan dasar dan menengah kementerian pendidikan dan kebudayaan dengan link <http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/>. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dokumentasi. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif (Mean dan Rasio).

Hasil penelitian menunjukkan sudah terdapat peningkatan pada pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia pada pendidikan dasar di Indonesia tahun 2015-2018. Namun masih ditemukan ketimpangan terutama pada daerah-daerah tertinggal seperti Pulau Maluku dan Pulau Papua. Hasil penelitian ini menyarankan kepada pemerintah perlu memperhatikan daerah-daerah tertinggal dan melakukan pembangunan-pembangunan infrastruktur agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan secara efektif. Pemerintah juga perlu melakukan peningkatan jumlah sumber daya manusia pada pendidikan dasar serta melakukan persebaran yang merata agar seluruh wilayah Indonesia dapat berkembang.

**Kata kunci: Pembangunan infrastruktur, Pembangunan sumber daya manusia, Pendidikan dasar.**

## SUMMARY

Kartika Aprilyani Putri, 2019. **Infrastructure and Human Resource Development in Basic Education in Indonesia 2015-2018**. Public Administration Department. Faculty of Administrative Science. Brawijaya University. Supervisors: Dr. Sujarwoto, S.IP., M.Si., M.PA and Trisnawati, S.Sos., M.AP.

---

The infrastructure development and human resources on basic education in Indonesia are very important. The infrastructure and adequate human resources are supporting the basic education. The provision of infrastructure and human resources on basic education in Indonesia has been set in the Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Year 2007 and Undang-Undang No 20 Year 2003. The purpose of this research is to determine and analyze the development of infrastructure and human resources in basic education in Indonesia from year of 2015-2018.

This research is quantitative research and used descriptive statistics methods. the basic education infrastructure and human resources in basic education are the indicators in this study. The SD/MI (elementary school) and SMP/MTs (junior high school) in 514 Counties/cities in Indonesia are the population in this research. This study used secondary data obtained from website data pokok pendidikan dasar dan menengah kementerian pendidikan dan kebudayaan with the link of <http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/>. Documentation technique is used for data collection in this research. The data analyzed with descriptive statistics (mean and rasio).

The results of this study showed there is enhancement in infrastructure development and human resources on basic education in Indonesia in the year of 2015-2018. There is imbalances found especially in lagging areas such as Maluku Island and Papua Island. This research suggested the Government to pay more attention to the areas that left behind and the infrastructure development in order to make teaching and learning activities function effectively. All of Indonesia regions can thrived if the government improve the human resources amount on basic education and equitable distribution.

**Keywords: Basic education, Human resources, Infrastructure development.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pembangunan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia pada Pendidikan Dasar di Indonesia Tahun 2015-2018”**. Skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Administrasi Publik pada prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Fadillah Amin, M.AP., Ph.D selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. Sujarwoto, S.IP., M.Si., M.PA selaku Ketua Komisi Pembimbing yang dengan sabar telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan, dukungan serta saran yang membangun bagi penulis.

5. Ibu Trisnawati, S.Sos., M.AP selaku Anggota Komisi Pembimbing yang juga dengan sabar telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan serta masukan yang membangun bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Teristimewa kepada orangtua penulis, Papa Nastain dan Mama Samilah yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya dari segi moril, materi dan segalanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua adik penulis, Andryan Nugroho dan Dimas Febriansyah yang telah memberikan doa serta motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh keluarga di rumah, Umi Fatimah, Kak Sarifah, Om Dudi, Kak Santi, Om Yanuar, Kak Ryan, Kak Nisa, Abang Dandy, Kak Octa, Papa Ama, Om Iis, Mama Epa, Almira, Najwa, Israr, Nando, Livia, Luthfita dan Syifa yang telah memberikan doa dan memotivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dan secepatnya kembali ke Jakarta.
10. Muhamad Nurul Fikkri, yang selalu menjadi tempat penulis mencurahkan segala keluh kesah dan yang telah sabar menyemangati penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kedua sahabat penulis, Nabila Sisti dan Bunga Sani Luhur yang selalu menjadi tempat penulis menceritakan segala suka dan duka serta memberikan dukungan sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

12. Teman-teman Saman Unitantri Safira Ayusta, Asma Nur Sadrina, Inggar Rayi, Rahmi Annisa, Dasa Nova, Cahya Widuri, Septi Mentari, Intan Hika, Fera Fanesya yang telah memberikan doa dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman Keluarga Besar Unitantri Universitas Brawijaya, khususnya angkatan 2015 yang telah memberikan doa serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman Ilmu Administrasi Publik 2015 yang telah memberikan doa serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Bagi semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya bagi pembaca.

Malang, 03 April 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>MOTTO.....</b>	<b>I</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>II</b>
<b>TANDA PENGESAHAN.....</b>	<b>III</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>IV</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>V</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>VI</b>
<b>SUMMARY.....</b>	<b>VII</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>VIII</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>XI</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>XVI</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>XVIII</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>XX</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang .....	1
2. Rumusan Masalah .....	5
3. Tujuan Penelitian.....	5
4. Manfaat Penelitian.....	5
5. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
1. Administrasi Pembangunan.....	8
1.1. Pengertian Administrasi Pembangunan.....	8
1.2. Fungsi Administrasi Pembangunan.....	8
1.3. Proses Administrasi Pembangunan .....	9
2. Pembangunan Pendidikan Dasar .....	13
2.1. Pengertian Pendidikan Dasar.....	13
2.2. Tujuan Pembangunan Pendidikan Dasar .....	14
2.3. Kebijakan Pembangunan Pendidikan Dasar.....	15
3. Pembangunan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia pada Pendidikan Dasar .....	17
3.1. Pembangunan Infrastruktur pada Pendidikan Dasar.....	17
3.1.1. Tujuan Pembangunan Infrastruktur pada Pendidikan Dasar.....	17
3.1.2. Indikator Pembangunan Infrastruktur pada Pendidikan Dasar .....	18
3.2. Pembangunan Sumber Daya Manusia pada Pendidikan Dasar .....	21
3.2.2. Tujuan Pembangunan Sumber Daya Manusia pada Pendidikan Dasar.....	21
3.2.3. Indikator Pembangunan Sumber Daya Manusia pada Pendidikan Dasar.....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
1. Jenis Penelitian .....	24
2. Variabel dan Indikator Penelitian.....	24
3. Populasi Penelitian .....	27



4. Sumber Data .....	27
5. Teknik Pengumpulan Data .....	27
6. Teknik Analisis Data .....	28

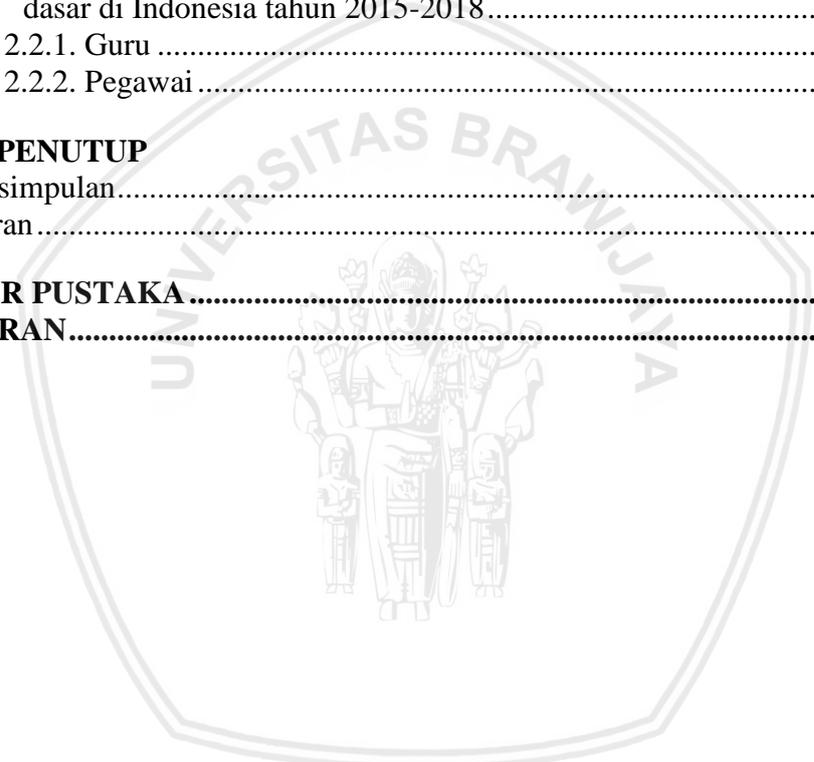
#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. Hasil Penelitian.....	30
1.1. Pembangunan infrastruktur pada pendidikan dasar tahun 2015-2018...30	
1.1.1. Gedung sekolah SD/MI dan SMPMTs di Indonesia tahun 2015-2018 .....	30
1.1.1.1. Gedung sekolah SD/MI di Indonesia tahun 2015-2018.....30	
1.1.1.1.1. Rasio siswa terhadap gedung sekolah SD/MI tahun 2015-2018 berdasarkan provinsi di Indonesia .....	30
1.1.1.1.2. Proporsi rasio siswa terhadap gedung sekolah SD/MI tahun 2015-2018 berdasarkan pulau di Indonesia .....	33
1.1.1.1.3. Kabupaten/Kota dengan rasio siswa terhadap gedung sekolah SD/MI tertinggi dan terendah di Indonesia tahun 2015-2018.....35	
1.1.1.2. Gedung sekolah SMP/MTs di Indonesia tahun 2015-2018 .....	39
1.1.1.2.1. Rasio siswa terhadap gedung sekolah SMP/MTs tahun 2015-2018 berdasarkan provinsi di Indonesia.....39	
1.1.1.2.2. Proporsi rasio siswa terhadap gedung sekolah SMP/MTs tahun 2015-2018 berdasarkan pulau di Indonesia .....	41
1.1.1.2.3. Kabupaten/Kota dengan rasio siswa terhadap Gedung sekolah SMP/MTs tertinggi dan terendah di Indonesia tahun 2015-2018.....43	
1.1.2. Ruang kelas SD/MI dan SMP/MTs di Indonesia tahun 2015-2018 .....	46
1.1.2.1 Ruang kelas SD/MI di Indonesia tahun 2015-2018.....47	
1.1.2.1.1. Rasio siswa terhadap ruang kelas SD/MI tahun 2015-2018 berdasarkan provinsi di Indonesia .....	47
1.1.2.1.2. Proporsi rasio siswa terhadap ruang kelas SD/MI tahun 2015-2018 berdasarkan pulau di Indonesia .....	50
1.1.2.1.3. Kabupaten/Kota dengan rasio siswa terhadap ruang kelas SD/MI tertinggi dan terendah di Indonesia tahun 2015-2018.....52	
1.1.2.2. Ruang kelas SMP/MTs di Indonesia tahun 2015-2018 .....	56
1.1.2.2.1. Rasio siswa terhadap ruang kelas SMP/MTs tahun 2015-2018 berdasarkan provinsi di Indonesia .....	56
1.1.2.2.2. Proporsi rasio siswa terhadap ruang kelas SMP/MTs tahun 2015-2018 berdasarkan pulau	

di Indonesia.....	59
1.1.2.2.3. Kabupaten/Kota dengan rasio siswa terhadap ruang kelas SMP/MTs tertinggi dan terendah di Indonesia tahun 2015-2018.....	60
1.1.3. Perpustakaan SD/MI dan SMP/MTs di Indonesia tahun 2015-2018.....	62
1.1.3.1. Perpustakaan SD/MI di Indonesia tahun 2015-2018.....	63
1.1.3.1.1. Rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SD/MI tahun 2015-2018 berdasarkan provinsi di Indonesia .....	63
1.1.3.1.2. Proporsi rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SD/MI tahun 2015-2018 berdasarkan pulau di Indonesia .....	65
1.1.3.1.3. Kabupaten/Kota dengan rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SD/MI tertinggi dan terendah di Indonesia tahun 2015-2018.....	67
1.1.3.2. Perpustakaan SMP/MTs di Indonesia tahun 2015-2018.....	70
1.1.3.2.1. Rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SMP/MTs tahun 2015-2018 berdasarkan provinsi di Indonesia .....	70
1.1.3.2.2. Proporsi rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SMP/MTs tahun 2015-2018 berdasarkan pulau di Indonesia .....	72
1.1.3.2.3. Kabupaten/Kota dengan rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan pada SMP/MTs tertinggi dan terendah di Indonesia tahun 2015-2018.....	74
1.1.4. Laboratorium SD/MI dan SMP/MTs di Indonesia tahun 2015-2018 .....	77
1.1.4.1. Laboratorium SD/MI di Indonesia tahun 2015-2018 .....	77
1.1.4.1.1. Rasio rombongan belajar terhadap laboratorium SD/MI tahun 2015-2018 berdasarkan provinsi di Indonesia .....	77
1.1.4.1.2. Proporsi rasio rombongan belajar terhadap laboratorium SD/MI tahun 2015-2018 berdasarkan pulau di Indonesia .....	80
1.1.4.1.3. Kabupaten/Kota dengan rasio rombongan belajar terhadap laboratorium SD/MI tertinggi dan terendah di Indonesia tahun 2015-2018.....	82
1.1.4.2. Laboratorium SMP/MTs di Indonesia tahun 2015-2018.....	85
1.1.4.2.1. Rasio rombongan belajar terhadap laboratorium SMP/MTs tahun 2015-2018 berdasarkan provinsi di Indonesia .....	85
1.1.4.2.2. Proporsi rasio rombongan belajar terhadap laboratorium SMP/MTs tahun 2015-2018 berdasarkan pulau di Indonesia .....	87

1.1.4.2.3. Kabupaten/Kota dengan rasio rombongan belajar terhadap laboratorium pada SMP/MTs tertinggi dan terendah di Indonesia tahun 2015-2018 .....	89
1.2. Pembangunan sumber daya manusia pada pendidikan dasar di Indonesia tahun 2015-2018 .....	92
1.2.1. Guru SD/MI dan SMP/MTs di Indonesia tahun 2015-2018.....	92
1.2.1.1. Guru SD/MI di Indonesia tahun 2015-2018 .....	93
1.2.1.1.1. Rasio guru terhadap rombongan belajar SD/MI tahun 2015-2018 berdasarkan provinsi di Indonesia .....	93
1.2.1.1.2. Proporsi rasio guru terhadap rombongan belajar SD/MI tahun 2015-2018 berdasarkan pulau di Indonesia .....	95
1.2.1.1.3. Kabupaten/Kota dengan rasio guru terhadap rombongan belajar SD/MI tertinggi dan terendah di Indonesia tahun 2015-2018 .....	97
1.2.1.2. Guru SMP/MTs di Indonesia tahun 2015-2018.....	100
1.2.1.2.1. Rasio guru terhadap rombongan belajar SMP/MTs tahun 2015-2018 berdasarkan provinsi di Indonesia.....	100
1.2.1.2.2. Proporsi rasio guru terhadap rombongan belajar SMP/MTs tahun 2015-2018 berdasarkan pulau di Indonesia.....	102
1.2.1.2.3. Kabupaten/Kota dengan rasio guru terhadap rombongan belajar SMP/MTs tertinggi dan terendah di Indonesia tahun 2015-2018 .....	104
1.2.2. Pegawai SD/MI dan SMP/MTs di Indonesia tahun 2015-2018...107	
1.2.2.1. Pegawai SD/MI di Indonesia tahun 2015-2018.....	107
1.2.2.1.1. Rasio gedung sekolah terhadap pegawai SD/MI tahun 2015-2018 berdasarkan provinsi di Indonesia.....	107
1.2.2.1.2. Proporsi rasio gedung sekolah terhadap pegawai SD/MI tahun 2015-2018 berdasarkan pulau di Indonesia .....	109
1.2.2.1.3. Kabupaten/Kota dengan rasio gedung sekolah terhadap pegawai SD/MI tertinggi dan terendah di Indonesia tahun 2015-2018 .....	111
1.2.2.2. Pegawai SD/MI di Indonesia tahun 2015-2018.....	115
1.2.2.2.1. Rasio gedung sekolah terhadap pegawai SMP/MTs tahun 2015-2018 berdasarkan provinsi di Indonesia.....	115
1.2.2.2.2. Proporsi rasio gedung sekolah terhadap pegawai SMP/MTs tahun 2015-2018 berdasarkan pulau di Indonesia.....	117

1.2.2.2.3. Kabupaten/Kota dengan rasio gedung sekolah terhadap pegawai SMP/MTs tertinggi dan terendah di Indonesia tahun 2015-2018 .....	119
2. Pembahasan .....	122
2.1. Pencapaian pembangunan infrastruktur pada pendidikan dasar di Indonesia tahun 2015-2018 .....	122
2.1.1. Gedung sekolah.....	123
2.1.2. Ruang kelas .....	125
2.1.3. Perpustakaan .....	127
2.1.4. Laboratorium.....	129
2.2. Pencapaian pembangunan sumber daya manusia pada pendidikan dasar di Indonesia tahun 2015-2018.....	130
2.2.1. Guru .....	131
2.2.2. Pegawai .....	132
<b>BAB V PENUTUP</b>	
1. Kesimpulan.....	135
2. Saran.....	137
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>140</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>143</b>



## DAFTAR TABEL

1	Ketentuan prasarana pada SD/MI di Indonesia.....	18
2	Ketentuan prasarana pada SMP/MTs di Indonesia .....	19
3	Indikator sumber daya manusia pada pendidikan dasar .....	23
4	Indikator infrastruktur pada pendidikan dasar .....	25
5	Indikator sumber daya manusia pada pendidikan dasar .....	26
6	5 Kabupaten/Kota dengan rasio siswa terhadap gedung sekolah SD/MI tertinggi di Indonesia tahun 2015-2018 .....	36
7	5 Kabupaten/Kota dengan rasio siswa terhadap gedung sekolah SD/MI terendah di Indonesia tahun 2015-2018.....	37
8	5 Kabupaten/Kota dengan rasio siswa terhadap gedung sekolah SMP/MTs tertinggi di Indonesia tahun 2015-2018 .....	44
9	5 Kabupaten/Kota rasio siswa terhadap gedung sekolah SMP/MTs terendah di Indonesia tahun 2015-2018.....	45
10	5 Kabupaten /Kota dengan rasio siswa terhadap ruang kelas SD/MI tertinggi di Indonesia tahun 2015-2018 .....	53
11	5 Kabupaten/Kota dengan rasio siswa terhadap ruang kelas SD/MI terendah di Indonesia tahun 2015-2018.....	54
12	5 Kabupaten/Kota dengan rasio siswa terhadap ruang kelas SMP/MTs tertinggi di Indonesia tahun 2015-2018 .....	61
13	5 Kabupaten/Kota dengan rasio siswa terhadap ruang kelas SMP/MTs terendah di Indonesia tahun 2015-2018.....	62
14	5 Kabupaten/Kota rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SD/MI tertinggi di Indonesia tahun 2015-2018 .....	67
15	5 Kabupaten/Kota rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SD/MI terendah di Indonesia tahun 2015-2018.....	68
16	5 Kabupaten/Kota rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SMP/MTs tertinggi di Indonesia tahun 2015-2018 .....	74
17	5 Kabupaten/Kota rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SMP/MTs terendah di Indonesia tahun 2015-2018 .....	76
18	5 Kabupaten/Kota rasio rombongan belajar terhadap laboratorium SD/MI tertinggi di Indonesia tahun 2015-2018 .....	83
19	5 Kabupaten/Kota rasio rombongan belajar terhadap laboratorium SD/MI terendah di Indonesia tahun 2015-2018.....	84
20	5 Kabupaten/Kota rasio rombongan belajar terhadap laboratorium SMP/MTs tertinggi di Indonesia tahun 2015-2018 .....	90
21	5 Kabupaten/Kota rasio rombongan belajar terhadap laboratorium SMP/MTs terendah di Indonesia tahun 2015-2018 .....	91
22	5 Kabupaten/Kota dengan rasio guru terhadap rombel belajar SD/MI tertinggi di Indonesia tahun 2015-2018 .....	98
23	5 Kabupaten/Kota rasio guru terhadap rombongan belajar SD/MI terendah di Indonesia tahun 2015-2018.....	99
24	5 Kabupaten/Kota rasio guru terhadap rombel belajar SMP/MTs tertinggi di Indonesia tahun 2015-2018 .....	104

25	5 Kabupaten/Kota rasio guru terhadap rombel belajar SMP/MTs terendah di Indonesia tahun 2015-2018 .....	106
26	5 Kabupaten/Kota rasio gedung sekolah terhadap pegawai SD/MI tertinggi di Indonesia tahun 2015-2018 .....	112
27	5 Kabupaten/Kota rasio gedung sekolah terhadap pegawai SMP/MTs terendah di Indonesia tahun 2015-2018 .....	113
28	5 Kabupaten/Kota rasio gedung sekolah terhadap pegawai SMP/MTs tertinggi di Indonesia tahun 2015-2018 .....	120
29	5 Kabupaten/Kota rasio gedung sekolah terhadap pegawai SMP/MTs terendah di Indonesia tahun 2015-2018 .....	121



## DAFTAR GAMBAR

1	Rasio siswa terhadap gedung sekolah SD/MI tahun 2015-2018 berdasarkan provinsi di Indonesia.....	31
2	Rasio siswa terhadap gedung sekolah SD/MI tahun 2015-2018 berdasarkan pulau di Indonesia.....	34
3	Rasio siswa terhadap gedung sekolah SMP/MTs tahun 2015-2018 berdasarkan provinsi di Indonesia .....	40
4	Rasio siswa terhadap gedung sekolah SMP/MTs tahun 2015-2018 berdasarkan pulau di Indonesia .....	42
5	Rasio siswa terhadap ruang kelas SD/MI tahun 2015-2018 berdasarkan provinsi di Indonesia.....	48
6	Rasio siswa terhadap ruang kelas SD/MI tahun 2015-2018 berdasarkan pulau di Indonesia .....	51
7	Rasio siswa terhadap ruang kelas SMP/MTs tahun 2015-2018 berdasarkan provinsi di Indonesia.....	57
8	Rasio siswa terhadap ruang kelas SMP/MTs tahun 2015-2018 berdasarkan pulau di Indonesia.....	59
9	Rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SD/MI tahun 2015-2018 berdasarkan provinsi di Indonesia .....	64
10	Rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SD/MI tahun 2015-2018 berdasarkan pulau di Indonesia .....	66
11	Rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SMP/MTs tahun 2015-2018 berdasarkan provinsi di Indonesia .....	71
12	Rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SMP/MTs tahun 2015-2018 berdasarkan pulau di Indonesia .....	73
13	Rasio rombongan belajar terhadap laboratorium SD/MI tahun 2015-2018 berdasarkan provinsi di Indonesia .....	79
14	Rasio rombongan belajar terhadap laboratorium SD/MI tahun 2015-2018 berdasarkan pulau di Indonesia .....	81
15	Rasio rombongan belajar terhadap laboratorium SMP/MTs tahun 2015-2018 berdasarkan provinsi di Indonesia .....	86
16	Rasio rombongan belajar terhadap laboratorium SMP/MTs tahun 2015-2018 berdasarkan pulau di Indonesia .....	88
17	Rasio guru terhadap rombongan belajar SD/MI tahun 2015-2018 berdasarkan provinsi di Indonesia.....	94
18	Rasio guru terhadap rombongan belajar SD/MI tahun 2015-2018 berdasarkan pulau di Indonesia.....	96
19	Rasio guru terhadap rombongan belajar SMP/MTs tahun 2015-2018 berdasarkan provinsi di Indonesia .....	101
20	Rasio guru terhadap rombongan belajar SMP/MTs tahun 2015-2018 berdasarkan pulau di Indonesia .....	103
21	Rasio gedung sekolah terhadap pegawai SD/MI tahun 2015-2018 berdasarkan provinsi di Indonesia.....	108
22	Rasio gedung sekolah terhadap pegawai SD/MI tahun 2015-2018	

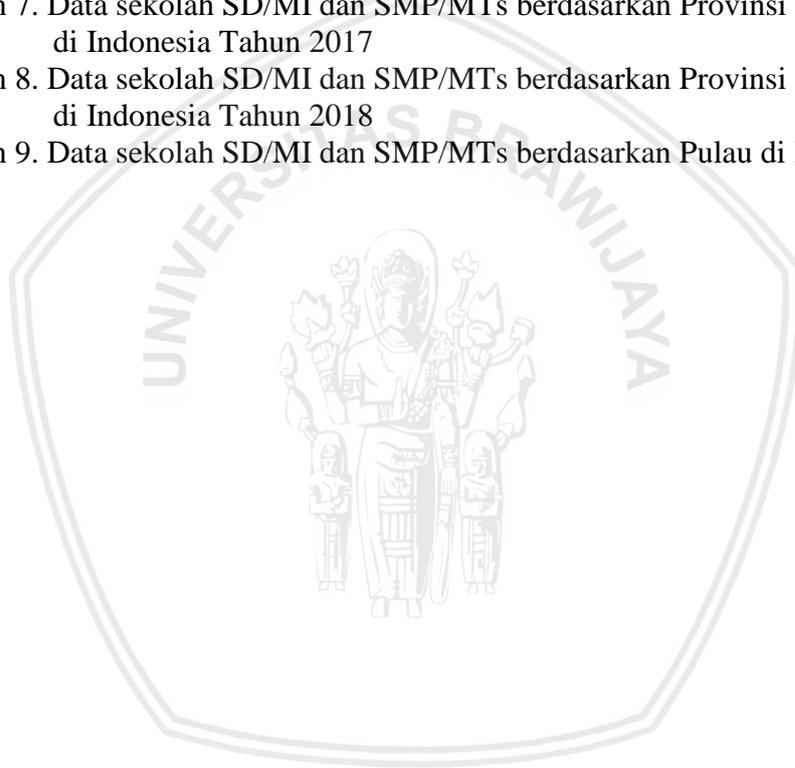


	berdasarkan pulau di Indonesia.....	110
23	Rasio gedung sekolah terhadap pegawai SMP/MTs tahun 2015-2018 berdasarkan provinsi di Indonesia .....	116
24	Rasio gedung sekolah terhadap pegawai SMP/MTs tahun 2015-2018 berdasarkan pulau di Indonesia .....	118



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Data sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Indonesia Tahun 2015
- Lampiran 2. Data sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Indonesia Tahun 2016
- Lampiran 3. Data sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Indonesia Tahun 2017
- Lampiran 4. Data sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Indonesia Tahun 2018
- Lampiran 5. Data sekolah SD/MI dan SMP/MTs berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2015
- Lampiran 6. Data sekolah SD/MI dan SMP/MTs berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2016
- Lampiran 7. Data sekolah SD/MI dan SMP/MTs berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2017
- Lampiran 8. Data sekolah SD/MI dan SMP/MTs berdasarkan Provinsi di Indonesia Tahun 2018
- Lampiran 9. Data sekolah SD/MI dan SMP/MTs berdasarkan Pulau di Indonesia



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar belakang

Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam lingkungan dan berlaku sepanjang hidup (Mudyahardjo, 2008:18). Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 menyebutkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan cepat lambatnya pembangunan. Makin maju tingkatan pembangunan suatu negara salah satunya dicirikan oleh majunya pembangunan di sektor pendidikan. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa pembangunan sektor pendidikan senantiasa seharusnya memperoleh prioritas utama.

Penyelenggaraan pendidikan di sebuah negara tidak terlepas dari peran pemerintah dan masyarakat yang saling berkontribusi. Penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah dalam rangka melaksanakan amanat pembukaan Undang Undang Dasar 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Terdapat pula pada Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 yang berisi

bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Cita-cita bangsa Indonesia sejak pertama kali didirikan adalah memperjuangkan keadilan bagi seluruh warga negara untuk memperoleh hak atas pendidikan yang layak. Maka dari itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bertumpu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki keterampilan hidup sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya.

Menurut Supriano, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2018) upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan ada empat hal yaitu: kebijakan, kepemimpinan kepala sekolah, infrastruktur dan proses pembelajaran. Kebijakan yang dimaksud adalah kurikulum dan ujian nasional, kepemimpinan kepala sekolah adalah leadership kepala sekolah serta menjaga hubungan ekosistem terus berjalan disekolah antara guru, siswa dan orang tua murid. Lalu infrastruktur yang dimaksud adalah sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kelas, laboratorium, perpustakaan serta proses pembelajaran yaitu proses pembelajaran yang menyenangkan, berinovasi serta kreatif agar peserta didik mendapatkan motivasi.

Pendidikan dasar sebagai jenjang paling dasar pada pendidikan formal mempunyai peran besar bagi keberlangsungan proses pendidikan selanjutnya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Pasal 17 yang menyebutkan

bahwa pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Dalam Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2008 dijelaskan bahwa pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

Tujuan Pendidikan Dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlaq mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Pendidikan dasar tidak dapat terlaksana apabila tidak didukung dengan segi infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai. Dua hal ini wajib tersedia untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), infrastruktur adalah prasarana, yaitu segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dsb). Pembangunan infrastruktur merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mendorong kemajuan bangsa. Salah satu sektor yang sangat memerlukan pembangunan infrastruktur adalah sektor pendidikan. Pembangunan infrastruktur dalam sektor pendidikan sangat diperlukan dalam menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Selain infrastruktur, sumber daya manusia juga sangat diperlukan dalam pembangunan pendidikan.

Sumber daya manusia adalah satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya (rasio, rasa, dan karsa), semua potensi sumber daya manusia tersebut berpengaruh

terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan Sutrisno (2011:62). Dalam hal ketenagaan (sumber daya manusia), rendahnya kualitas sumber daya manusia merupakan masalah mendasar yang dapat menghambat pembangunan dan perkembangan ekonomi nasional. Selain itu, sumber daya manusia merupakan potensi manusia yang melekat keberadaannya pada seseorang yang terdiri dari potensi fisik dan non fisik (Sulistiyani dan Rosidah, 2009:10). Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia diperlukan sebuah mekanisme yang mampu mengatur dan mengoptimalkan berbagai komponen dan sumber daya yang ada.

Dalam dunia pendidikan, hal ini disebut manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan dapat diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian usaha-usaha personal pendidikan untuk mendayagunakan semua sumber daya dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Aan dan Capi (2005 : 4) menjelaskan bahwa sumber daya manusia sekolah terdiri dari kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya.

Selama tahun 2015-2018, negara Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan kabinet yang dinamakan kabinet kerja mengatakan akan mengutamakan kemajuan infrastruktur yang ada di Indonesia. Hal ini menjadikan penulis ingin mengetahui pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia terutama pada bidang pendidikan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul “**Pembangunan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia pada Pendidikan Dasar di Indonesia tahun 2015-2018**”.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diambil oleh peneliti adalah:

1. Bagaimanakah pencapaian pembangunan infrastruktur pendidikan dasar di Indonesia tahun 2015-2018.
2. Bagaimanakah pencapaian pembangunan sumber daya manusia pendidikan dasar di Indonesia tahun 2015-2018.

## **3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia pada pendidikan dasar di Indonesia Tahun 2015-2018.

## **4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan teoritis maupun praktik yaitu:

1. Memperkaya kepustakaan dalam kajian terkait pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia pada pendidikan dasar di Indonesia Tahun 2015-2018.
2. Memberikan informasi bahan pertimbangan kepada pemerintah tentang pencapaian pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia pada pendidikan dasar di Indonesia Tahun 2015-2018.

## 5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dideskripsikan sebagai berikut:

### 1. BAB I PENDAHULUAN

Bab I membahas tentang latar belakang penelitian mengenai alasan yang mendasari penulis untuk menganalisis pembangunan pendidikan di Indonesia pada bidang infrastruktur dan sumber daya manusia. Selain itu pada bab ini berisi rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### 2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II menguraikan tentang teori-teori atau temuan ilmiah dari buku, jurnal, maupun hasil penelitian terdahulu yang relevan. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori yang berhubungan dengan administrasi pembangunan, pendidikan dasar serta indikator yang mempengaruhi pembangunan pendidikan dasar di Indonesia dibidang infrastruktur dan sumber daya manusia pendidikan dasar.

### 3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab III menguraikan tentang rancangan penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kuantitatif dengan metode statistik deskriptif. Selanjutnya menjelaskan mengenai variabel dan indikator penelitian yang berisi indikator infrastruktur pendidikan dasar dan indikator sumber daya manusia pendidikan dasar yang data nya bisa didapatkan dalam data sekunder dari web Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan link <http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/> yang kemudian dianalisis.

Selanjutnya berisi populasi penelitian yaitu SD/MI dan SMP/MTs yang berada pada 514 kabupaten/kota di Indonesia yang tercatat sejak tahun 2015 sampai tahun 2018. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berhubungan dengan penelitian dan didapat dari web Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan link <http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/>. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dari data sekunder yang didapat saat pengumpulan data. Tahap terakhir dalam bab ini adalah teknis analisis data yang berisikan langkah-langkah dalam mengolah data sampai hasil kesimpulan dengan menggunakan rumus Rasio (satu angka yang dibandingkan dengan angka lain sebagai suatu hubungan).

#### 4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang temuan-temuan penelitian yang berasal dari pengolahan dan analisis data yang dilakukan peneliti. Secara umum, dalam bab ini menjelaskan hasil analisis data yang menjelaskan tentang data yang telah diolah, serta dilanjutkan analisis dan pembahasan data yang menjelaskan tentang temuan-temuan peneliti dikaitkan dengan teori-teori yang ada.

#### 5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan yang berisi penjelasan singkat tentang isi penelitian dan saran yang berisi masukan-masukan dari peneliti tentang hasil penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Administrasi Pembangunan

##### 1.1. Pengertian Administrasi Pembangunan

Para ahli memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang pengertian administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya (Siagian, 2009:5). Lalu, dikatakan pula administrasi pembangunan adalah ilmu dan seni tentang bagaimana pembangunan suatu sistem administrasi yang mampu menyelenggarakan berbagai fungsi pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien (Mustopadidjaya dalam Afiffudin ,2010:51). Dari pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa arti dari administrasi pembangunan adalah usaha untuk melaksanakan pertumbuhan, perkembangan dan perubahan untuk melaksanakan program-program atau proyek-proyek secara efektif dan efisien.

##### 1.2. Fungsi administrasi pembangunan

Menurut Tjokroamidjojo (1984) terdapat tiga fungsi administrasi pembangunan. Fungsi tersebut yaitu: pertama, melakukan penyusunan kebijaksanaan penyempurnaan administrasi negara yang meliputi: upaya penyempurnaan organisasi, pembinaan lembaga yang diperlukan, kepegawaian

dan pengurusan sarana-sarana administrasi lainnya. Administrasi pembangunan dalam pengertiannya sebagai proses pertumbuhan dan perkembangan terencana maka melakukan upaya untuk menyempurnakan organisasi agar lebih bersifat efektif dan efisien.

Kedua, sebagai perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program pembangunan di berbagai bidang serta pelaksanaannya secara efektif. Dalam merumuskan kebijakan-kebijakan administrasi pembangunan memiliki fungsi untuk memberikan masukan-masukan agar kebijaksanaan atau program yang diambil sesuai dengan pembangunan dan bisa berjalan secara efektif.

Ketiga, membangun partisipasi masyarakat. Pembangunan tidak mungkin terlaksana apabila hanya dari hasil kegiatan pemerintahan saja, masyarakat telah memiliki perannya dalam pembangunan negara bangsa. Karena administrasi pembangunan pada umumnya digunakan di negara yang sedang berkembang, maka masyarakat pun diharapkan ikut andil membangun diri menjadi individu mandiri. Selama pemerintah melakukan pembangunan seperti di bidang-bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya, masyarakat diharapkan tidak selamanya mengandalkan dari pemerintah namun bisa menciptakan pembangunan untuk kemajuan dari masyarakat itu sendiri.

### **1.3. Proses administrasi pembangunan**

Secara umum diketahui bahwa kegiatan pembangunan dilaksanakan secara sadar, komprehensif, terencana, bertahap dan berkesinambungan. Proses administrasi pembangunan memerlukan langkah-langkah yang tepat dalam

menjalankan prosesnya. Menurut Siagian (2009:151) terdapat sembilan langkah dalam proses administrasi pembangunan, yaitu:

Pertama, penumbuhan motivasi untuk membangun. Melakukan sosialisasi kebijaksanaan nasional, penyebaran informasi, perluasan wawasan dan peningkatan kecerdasan untuk menginfokan bahwa ukuran keberhasilan terletak pada penumbuhan kegairahan motivasi untuk membangun, tidak selalu berpengaruh dengan takdir.

Kedua, perumusan dan pengambilan keputusan politik. Pemerintah perlu terlibat dalam pengambilan keputusan politik karena pemerintah memiliki berbagai jenis informasi sebagai salah satu bahan masukan yang sangat mungkin tidak dimiliki oleh pihak manapun dalam negara. Selain itu, hanya pemerintah yang memiliki aparat yang menjangkau seluruh pelosok wilayah kekuasaan negara, dan pada akhirnya pemerintah harus mempertanggung jawabkan tindakan operasional yang dilakukannya kepada rakyat sebagai pemegang tertinggi kedaulatan dalam negara.

Ketiga, peletakan dasar hukum. Langkah ini penting untuk kepentingan pemerintah maupun saat melibatkan berbagai komponen masyarakat. Misalnya bagi pemerintah diperlukan untuk menentukan, menggarap, dan mobilisasi dana terutama dalam bentuk berbagai jenis pajak. Selain itu sebagai peraturan perundang-undangan yang diarahkan guna menjamin tidak adanya kegiatan penyelenggaraan pembangunan yang tidak ada dasar hukumnya.

Keempat, perumusan rencana pembangunan nasional. Pemerintah menentukan skala prioritas pembangunan dan juga sasarannya. Sebagai contoh,

seperti meletakkan pembangunan ekonomi menjadi prioritas teratas dengan sasaran alokasi sumber dana untuk masing-masing bidang tercukupi dan bisa terbangun negara bangsa sesuai dengan tujuan akhirnya.

Kelima, yaitu penentuan dan perumusan program kerja. Penyusunan program kerja merupakan upaya untuk lebih memahami situasi, kondisi, jenis dan bentuk masa depan yang diperkirakan akan dihadapi sehingga faktor ketidakpastian berkurang, perubahan dapat diantisipasi, sasaran makin konkret dan alokasi daya dan dana makin tepat. Secara singkat penentuan dan perumusan program kerja ditujukan agar semakin efisiensi dan efektif berjalannya pembangunan tersebut.

Keenam, penentuan proyek-proyek pembangunan. Kegiatan yang akan dilakukan dalam bentuk proyek yang ditentukan biasanya mengandung unsur-unsur bentuk, lokasi, sumber daya dan dana, satuan kerja, sasaran, dan hasil serta pemanfaatannya. Penentuan proyek pembangunan perlu perhatian karena memiliki pertimbangan penting seperti benar-benar memperhatikan proyek tersebut bukanlah merupakan kegiatan rutin, seringkali didapati kegiatan rutin dijadikan proyek pembangunan karena bisa menghasilkan tambahan pendapatan saat menjalankan proyek pembangunan dibanding melaksanakan kegiatan rutin. Ketika proyek pembangunan tersebut dilaksanakan sendiri oleh pihak pemerintah maka harus bisa dipertanggung jawabkan segala keputusan yang diambil dan juga bisa memastikan akan berjalan secara efisiensi dan efektif.

Ketujuh, implementasi kegiatan pembangunan. Perlunya menentukan instrumen pengukuran efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja. Instrumen

tersebut perlu diketahui, dipahami, dan diterima oleh para pelaksana karena dengan demikian dapat dilakukannya *self-monitoring* atau disebut pemantauan.

Delapan, penilaian hasil-hasil yang dicapai. Penilaian merupakan salah satu fungsi terpenting dalam proses administrasi. Teori menekankan bahwa dari penilaian yang objektif, rasional dan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rencana maka dapat diketahui dalam hal penilaian apakah: (a) hasil yang dicapai melebihi target dan standar yang telah ditentukan, (b) hasil yang dicapai sekedar sesuai dengan harapan, atau (c) kurang dari yang ditentukan.

Ketika hasil yang didapat ternyata melebihi target dan standart yang ditentukan maka dapat dijadikan modal untuk peningkatan kinerja di masa depan, sedangkan apabila hasil yang dicapai sekedar sama dengan yang ditentukan maka perlu diteliti faktor penyebabnya lalu yang mendukung akan dikembangkan sedangkan faktor penghambat akan dihapuskan. Namun apabila hasil yang didapatkan lebih lemah daripada standart yang ditentukan maka yang dipelajari adalah kelemahan organisasi, hambatan dan gangguan serta tantangan yang dihadapi sehingga bisa dilakukan evaluasi untuk masa depan.

Sembilan, mekanisme umpan balik. Pentingnya mekanisme umpan balik untuk menilai tahap yang sudah dilalui. Digunakan untuk mengkaji ulang seluruh proses sebelumnya, termasuk rumusan misi, rumusan strategi rencana, program kerja dan kegiatan-kegiatan operasional. Karena administrasi pembangunan merupakan suatu proses, maka salah satu cirinya aalah berkesinambungan. Hasil

penilaian akan sangat bermanfaat dan dapat dikaji sebagai umpan balik untuk proses yang akan dilakukan selanjutnya.

## **2. Pembangunan Pendidikan Dasar**

### **2.1. Pengertian Pendidikan Dasar**

Para ahli memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam mengartikan pendidikan dasar. Seperti menurut Suharjo (2006: 1) yang menyatakan bahwa sekolah dasar pada dasarnya merupakan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan enam tahun bagi anak-anak usia 6-12 tahun. Lalu menurut Ihsan (2008: 26) sekolah dasar sebagai satu kesatuan dilaksanakan dalam masa program belajar selama 6 tahun.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2008 dijelaskan bahwa pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Selain itu, didalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Bab VI Pasal 17 disebutkan:

1. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
2. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

## 2.2. Tujuan Pembangunan Pendidikan Dasar

Proses pendidikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan sumber daya manusia sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Oleh karena itu, pendidikan harus mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan tidak menjadi beban pembangunan dan masyarakat, yaitu sumber daya manusia yang menjadi sumber kekuatan atau sumber penggerak bagi seluruh proses pembangunan dan kehidupan masyarakat.

Tujuan pendidikan dasar berdasarkan Undang Undang No 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 adalah:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengarahkan dan membimbing siswa ke arah situasi yang berpotensi positif, berjiwa besar, kritis dan berakhlak mulia.
3. Memiliki rasa cinta tanah air, bangga dan mampu mengisi hal yang bertujuan membangun diri sendiri bangsa dan negara.
4. Membawa siswa sekolah dasar mampu berprestasi ke jenjang selanjutnya.

Berdasarkan pembahasan diatas dan dengan adanya wajib belajar sembilan tahun yang diatur dalam Undang Undang No 20 Tahun 2003 Bab VIII Pasal 34 maka dapat diambil kesimpulan bahwa arti dari pendidikan dasar serta tujuannya adalah jenjang pendidikan awal selama sembilan tahun pertama masa sekolah anak-anak dengan tujuan menanamkan keimanan terhadap Tuhan sesuai dengan agama masing-masing yang dianut. Dengan harapan siswa dapat menanamkan sikap yang berakhlak, sopan santun antar sesama umat manusia tanpa membedakan ras, suku dan agama. Sehingga akhirnya siswa dapat menjadi

individu yang bertanggung jawab, cakap, berdedikasi tinggi terhadap bangsa dan negara.

### **2.3. Kebijakan Pembangunan Pendidikan Dasar**

Undang-Undang No 20 Tahun 2003 menyebutkan misi pendidikan nasional yaitu mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, ikut serta membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar, meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Untuk mewujudkan misi tersebut maka dilakukan strategi yang salah satunya adalah pelaksanaan Kebijakan Wajib Belajar Sembilan Tahun.

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Bab I Pasal 1 dijelaskan wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Disebutkan juga dalam Undang-Undang yang sama pada Bab II Pasal 2 mengenai fungsi dan tujuan dari wajib belajar adalah sesuai dengan misi pendidikan nasional yaitu mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia dan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup

mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Peraturan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pasal 24 dijelaskan bahwa pendidikan dasar tingkat SD/MI memiliki paling sedikit 20 siswa atau paling banyak 28 siswa dalam satu kelas serta tingkat SMP/MTs memiliki paling sedikit 20 siswa atau paling banyak 32 siswa dalam satu kelas. Lalu pada Permendikbud yang sama pada Pasal 26 dijelaskan bahwa pendidikan dasar tingkat SD/MI memiliki paing sedikit 6 rombongan belajar (rombel) atau paling banyak 24 rombel dalam satu sekolah serta tingkat SMP/MTs memiliki paling sedikit 3 rombel atau paling banyak 33 rombel dalam satu sekolah. Rombel adalah rombongan belajar yang berarti jumlah siswa dalam satu kelas.

Peraturan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota Pasal 2 menjelaskan bahwa pada tingkat SD/MI tersedia 1 (satu) guru untuk setiap 32 siswa atau 1 (satu) rombel, serta pada tingkat SMP/MTs tersedia pula 1 (satu) guru untuk setiap 1 (satu) rombel.

Peraturan Kementrian Pendidikan Nasional (Permendiknas) No 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah menjelaskan bahwa standar tenaga administrasi sekolah/madrasah mencakup kepala tenaga administrasi, pelaksana urusan, dan petugas layanan khusus sekolah/madrasah.

### **3. Pembangunan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia pada Pendidikan Dasar**

#### **3.1. Pembangunan Infrastruktur pada Pendidikan Dasar**

##### **3.1.1. Tujuan Pembangunan Infrastruktur pada Pendidikan Dasar**

Infrastruktur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) adalah prasarana, yaitu segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dsb). Sedangkan menurut Kodoatie (2005) infrastruktur adalah sistem yang menunjang sistem sosial dan ekonomi yang secara sekaligus menjadi penghubung sistem lingkungan, dimana sistem ini bisa digunakan sebagai dasar dalam mengambil kebijakan. Maka dari pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa infrastruktur pendidikan dasar adalah prasarana, yaitu segala sesuatu yang menjadi penunjang utama proses terselenggaranya pendidikan dasar.

Tujuan pembangunan infrastruktur pendidikan dasar adalah: Pertama, belum meratanya pembangunan infrastruktur sekolah yang memadai, masih banyak wilayah terutama daerah tertinggal yang masih belum tersentuh dengan infrastruktur yang mendukung proses belajar mengajar di sekolah. Kedua, untuk mengamalkan keadilan kepada seluruh rakyat Indonesia seperti yang tertulis pada Pancasila sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, untuk menjadi motivasi belajar bagi para siswa terutama untuk yang sekolahnya tidak mendukung terselenggaranya pendidikan karena minimnya infrastruktur yang ada.

### 3.1.2. Indikator Pembangunan Infrastruktur pada Pendidikan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sebuah SD/MI sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut:

**Tabel 1: Ketentuan Prasarana pada SD/MI di Indonesia**

No	Infrastruktur	Deskripsi
1	Ruang kelas	Tempat kegiatan pembelajaran teori, praktek yang tidak memerlukan peralatan khusus, atau praktek dengan alat khusus yang mudah dihadirkan.
2	Ruang perpustakaan	Tempat kegiatan peserta didik dan guru memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka dengan membaca, mengamati, mendengar, dan sekaligus tempat petugas mengelola perpustakaan.
3	Laboratorium IPA	Dapat memanfaatkan ruang kelas yang berfungsi sebagai alat bantu mendukung kegiatan dalam bentuk percobaan.
4	Ruang pimpinan	Tempat melakukan kegiatan pengelolaan sekolah, pertemuan dengan sejumlah kecil guru, orang tua murid, unsur komite sekolah, petugas dinas pendidikan, atau tamu lainnya.
5	Ruang guru	Tempat guru bekerja dan istirahat serta menerima tamu, baik peserta didik maupun tamu lainnya.
6	Tempat beribadah	Tempat warga sekolah melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing pada waktu sekolah.

No	Infrastruktur	Deskripsi
7	Ruang UKS	Tempat untuk penanganan dini peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan di sekolah.
8	Jamban	Tempat buang air besar dan/atau kecil.
9	Gudang	Tempat menyimpan peralatan pembelajaran di luar kelas, tempat menyimpan sementara peralatan sekolah yang tidak/belum berfungsi di satuan pendidikan, dan tempat menyimpan arsip sekolah yang telah berusia lebih dari 5 tahun.
10	Ruang sirkulasi	Tempat penghubung antar ruang dalam bangunan sekolah berbentuk koridor dan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan bermain dan interaksi sosial peserta didik di luar jam pelajaran, terutama pada saat hujan ketika tidak memungkinkan kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung di halaman sekolah.
11	Tempat bermain/berolahraga	Sebagai area bermain, berolahraga, pendidikan jasmani, upacara, dan kegiatan ekstrakurikuler.

Sumber: *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007*

Sebuah SMP/MTs sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut:

**Tabel 2: Ketentuan Prasarana pada SMP/MTs di Indonesia**

No	Infrastruktur	Deskripsi
1	Ruang kelas	Tempat kegiatan pembelajaran teori, praktek yang tidak memerlukan peralatan khusus, atau praktek dengan alat khusus yang mudah dihadirkan.
2	Ruang perpustakaan	Tempat kegiatan peserta didik dan guru memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka dengan membaca, mengamati, mendengar, dan sekaligus tempat petugas mengelola perpustakaan.

No	Infrastruktur	Deskripsi
3	Laboratorium IPA	Dapat memanfaatkan ruang kelas yang berfungsi sebagai alat bantu mendukung kegiatan dalam bentuk percobaan.
4	Ruang pimpinan	Tempat melakukan kegiatan pengelolaan sekolah, pertemuan dengan sejumlah kecil guru, orang tua murid, unsur komite sekolah, petugas dinas pendidikan, atau tamu lainnya.
5	Ruang guru	Tempat guru bekerja dan istirahat serta menerima tamu, baik peserta didik maupun tamu lainnya.
6	Ruang tata usaha	Tempat kerja petugas untuk mengerjakan administrasi sekolah.
7	Ruang konseling	Tempat peserta didik mendapatkan layanan konseling dari konselor berkaitan dengan pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir.
8	Ruang organisasi kesiswaan	Tempat melakukan kegiatan kesekretariatan pengelolaan organisasi kesiswaan.
9	Tempat beribadah	Tempat warga sekolah melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing pada waktu sekolah.
10	Ruang UKS	Tempat untuk penanganan dini peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan di sekolah.
11	Jamban	Tempat buang air besar dan/atau kecil.
12	Gudang	Tempat menyimpan peralatan pembelajaran di luar kelas, tempat menyimpan sementara peralatan sekolah yang tidak/belum berfungsi di satuan pendidikan, dan tempat menyimpan arsip sekolah yang telah berusia lebih dari 5 tahun.
13	Ruang sirkulasi	Tempat penghubung antar ruang dalam bangunan sekolah berbentuk koridor dan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan bermain dan interaksi sosial peserta didik di luar jam pelajaran, terutama pada saat hujan ketika tidak memungkinkan kegiatan-kegiatan tersebut berlangsung di halaman sekolah.

No	Infrastruktur	Deskripsi
14	Tempat bermain/berolahraga	Berfungsi sebagai area bermain, berolahraga, pendidikan jasmani, upacara, dan kegiatan ekstrakurikuler.

Sumber: *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007*

### 3.2. Pembangunan Sumber Daya Manusia pada Pendidikan Dasar

#### 3.2.1. Tujuan Pembangunan Sumber Daya Manusia pada Pendidikan Dasar

Sumber daya manusia merupakan individu-individu dalam organisasi yang memberikan sumbangan berharga pada pencapaian tujuan organisasi (Soegoto, 2014:306). Dalam proses pembangunan sumber daya manusia diarahkan pada pembangunan manusia seutuhnya. Sumber daya manusia akan sangat menentukan bagi keberhasilan suatu pembangunan karena manusia merupakan subjek dari pembangunan tersebut. Sedangkan menurut Sutrisno (2011:62), sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya (rasio, rasa, dan karsa), semua potensi sumber daya manusia tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan.

Betapapun majunya teknologi, perkembangan informasi, tersedianya modal dan memadainya bahan, jika tanpa sumber daya manusia sulit bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan sumber daya manusia adalah tenaga atau kekuatan (kemampuan) yang dimiliki oleh seseorang berupa daya pikir, daya cipta, karsa dan karya yang masih tersimpan dalam dirinya sebagai energi potensial yang siap dikembangkan menjadi daya-daya berguna sesuai dengan keinginan manusia itu sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Bab XI Pasal 39 sumber daya manusia dalam pendidikan berarti tenaga kependidikan yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan dan pendidik yang merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Tujuan pembangunan sumber daya manusia pada pendidikan dasar adalah: Pertama, untuk memperbaiki efektivitas dan efisiensi kerja pendidik dalam melaksanakan dan mencapai sasaran-sasaran program kerja yang telah ditetapkan. Kedua, untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja para pendidik atau guru di SD/MI dan SMP/MTs. Ketiga, untuk meningkatkan sikap moral dan semangat mengajar. Keempat, untuk meningkatkan perkembangan pribadi pendidik di SD/MI dan SMP/MTs. Kelima, untuk meningkatkan rangsangan, agar guru mampu berprestasi secara maksimal.

### **3.2.2. Indikator Sumber Daya Manusia pada Pendidikan Dasar**

Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Lalu, pendidik adalah tenaga kependidikan yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil

pembelajaran serta melakukan pembimbingan dan pelatihan seperti guru. Berikut adalah indikator sumber daya manusia pada pendidikan dasar di Indonesia:

**Tabel 3: Indikator Sumber Daya Manusia pada Pendidikan Dasar di Indonesia**

No	Jenis tenaga kependidikan dan pendidik	Pengertian
1	Tenaga struktural	Tenaga kependidikan yang menempati jabatan-jabatan eksekutif umum (pimpinan) yang bertanggungjawab baik langsung maupun tidak langsung atas satuan pendidikan. Seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bagian kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, dan pelayanan khusus.
2	Tenaga fungsional	Tenaga kependidikan yang menempati jabatan-jabatan fungsional yaitu yang dalam pelaksanaannya pekerjaannya mengandalkan keahlian akademis kependidikan. Seperti guru, guru BP, pengembangan kurikulum dan teknologi kependidikan, pengembangan tes dan pustakawan.
3	Tenaga teknis kependidikan	Tenaga kependidikan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya lebihdituntut keahlian teknis operasional atau teknis administrasi. Seperti laborat, teknisi sumber belajar, pelatih olahraga, kesenian dan keterampilan serta tugas Tata usaha.

Sumber: *Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2019 diolah oleh penulis*

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode statistik deskriptif. Menurut Sugiyono (2011:8) tentang penelitian kuantitatif menyebutkan bahwa:

Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Sementara itu, menurut Sugiyono (2011:147) statistik deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian ini karena peneliti mendeskripsikan serta menganalisis data yang diperoleh.

#### 2. Variabel dan Indikator Penelitian

Menurut Sugiyono (2011:38) variabel penelitian yaitu suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel dalam penelitian ini serta indikatornya adalah sebagai berikut:

Variabel bebas menurut Sugiyono (2011:39) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Faktor-faktor yang mendukung terjadinya pembangunan pendidikan, dengan indikator:

1. X1 yaitu Infastruktur Pendidikan Dasar SD/MI dan SMP/MTs.

**Tabel 4: Indikator infrastruktur pada pendidikan dasar.**

No	Infrastruktur	Keterangan	Periode
1	Gedung Sekolah	Bangunan yang mendukung proses belajar mengajar antara guru dengan siswa. Dihitung dalam jumlah satuan.	Tahun 2015 sampai Tahun 2018
2	Ruang kelas	Tempat kegiatan pembelajaran teori, praktek yang tidak memerlukan peralatan khusus, atau praktek dengan alat khusus yang mudah dihadirkan. Dihitung dengan jumlah satuan.	Tahun 2015 sampai Tahun 2018
3	Perpustakaan	Tempat kegiatan peserta didik dan guru memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka dengan membaca, mengamati, mendengar, dan sekaligus tempat petugas mengelola perpustakaan. Dihitung dalam jumlah satuan.	Tahun 2015 sampai Tahun 2018

No	Infrastruktur	Keterangan	Periode
4	Laboratorium	Dapat memanfaatkan ruang kelas yang berfungsi sebagai alat bantu mendukung kegiatan dalam bentuk percobaan. Dihitung dalam jumlah satuan.	Tahun 2015 sampai Tahun 2018

Sumber: *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007, diolah oleh penulis*

2. X2 yaitu Sumber daya manusia pada pendidikan dasar.

**Tabel 5: Indikator Sumber Daya Manusia pada SD/MI dan SMP/MTs**

No	Sumber Daya Manusia	Keterangan	Periode
1	Guru	Guru yang mengajar pada SD/MI dan SMP/MTs di Indonesia yang sudah mendapat penugasan, berstatus aktif dan terdaftar di sekolah induk dan dihitung dengan jumlah satuan	Tahun 2015 sampai Tahun 2018
2	Pegawai	Petugas tata usaha, bagian kurikulum, bagian kesiswaan dan pelayanan khusus yang bertugas pada SD/MI dan SMP/MTs di Indonesia yang telah mendapat penugasan, berstatus aktif dan terdaftar di sekolah induk dan dihitung dengan jumlah satuan	Tahun 2015 sampai Tahun 2018

Sumber: *Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2019 diolah oleh penulis*

### **3. Populasi Penelitian**

Populasi menurut Sugiyono (2011:80) merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Sedangkan menurut Darmawan (2013:137) populasi merupakan sumber data dalam penelitian tertentu yang memiliki jumlah dan luas. Populasi dalam penelitian ini adalah SD/MI dan SMP/MTs yang terdapat pada 514 Kabupaten/Kota di Indonesia pada tahun 2015 sampai tahun 2018.

### **4. Sumber Data**

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, sumber maupun cara. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berhubungan dengan jenis data yang diambil sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Data sekunder menurut Sugiyono (2011:225) adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini, sumber data berasal dari data yang terdapat pada web Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan link <http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/>

### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Darmawan (2013:159) teknik pengumpulan data yaitu cara-cara yang ditempuh dan alat-alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan datanya. Sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Menurut Hamidi (2004:72), Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan

penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumen yang digunakan berupa data-data pertumbuhan data sekolah di Indonesia yang terdiri dari data jumlah sekolah, ruang kelas, laboratorium dan perpustakaan serta data jumlah guru dan pegawai pada SD/MI dan SMP/MTs dengan rentang waktu tahun 2015 sampai tahun 2018.

## 6. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui jumlah ketersediaan gedung sekolah pada suatu daerah sudah mencukupi atau masih diperlukan tambahan, maka digunakan rasio siswa terhadap gedung sekolah dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio siswa terhadap gedung sekolah} = \frac{\text{siswa}}{\text{gedung sekolah}}$$

2. Untuk mengetahui jumlah ketersediaan ruang kelas pada sekolah di suatu daerah sudah tercukupi atau masih memerlukan tambahan, maka digunakan rasio siswa terhadap ruang kelas dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio siswa terhadap ruang kelas} = \frac{\text{siswa}}{\text{ruang kelas}}$$

3. Untuk mengetahui jumlah perpustakaan sekolah di suatu daerah sudah mencukupi atau masih memerlukan tambahan, maka digunakan rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio rombel terhadap perpustakaan} = \frac{\text{rombel}}{\text{perpustakaan}}$$

4. Untuk mengetahui jumlah laboratorium sekolah di suatu daerah sudah mencukupi atau masih memerlukan tambahan, maka digunakan rasio rombongan belajar terhadap laboratorium dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio rombongan belajar terhadap laboratorium} = \frac{\text{rombel}}{\text{laboratorium}}$$

5. Untuk mengetahui jumlah guru pada sekolah di suatu daerah sudah mencukupi atau masih memerlukan tambahan, maka digunakan rasio guru terhadap rombongan belajar dengan rumus sebagai berikut:

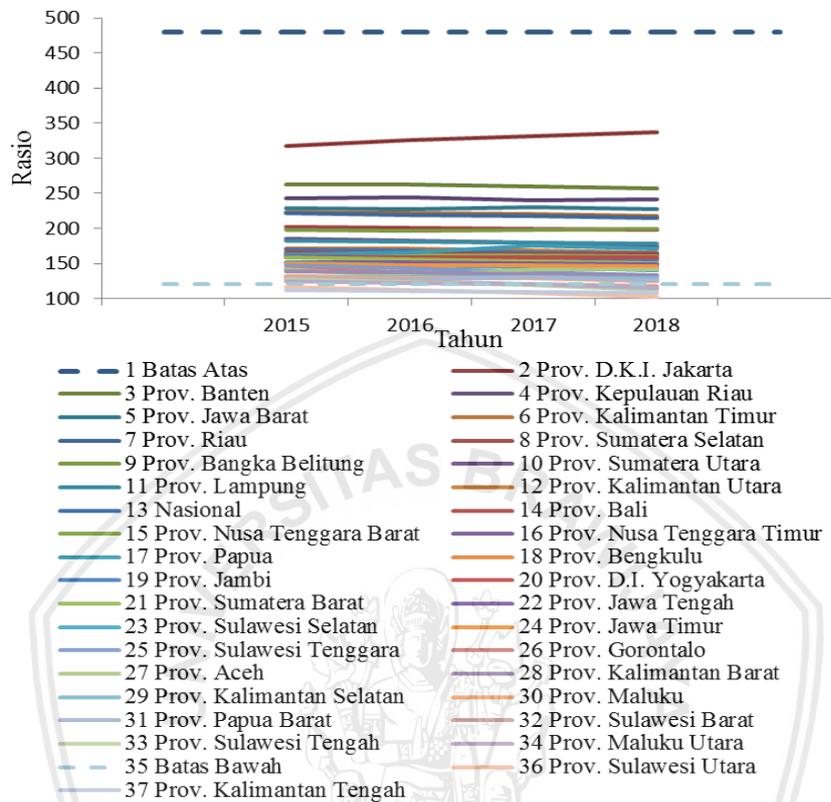
$$\text{Rasio guru terhadap rombongan belajar} = \frac{\text{guru}}{\text{rombel}}$$

6. Untuk mengetahui jumlah pegawai di sekolah pada suatu daerah sudah mencukupi atau masih memerlukan tambahan, maka digunakan rasio gedung sekolah terhadap pegawai dengan rumus sebagai berikut:

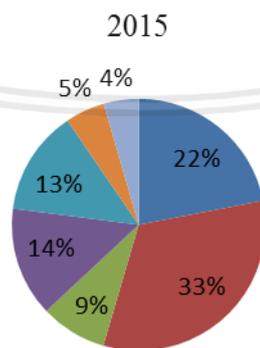
$$\text{Rasio gedung sekolah terhadap pegawai} = \frac{\text{gedung sekolah}}{\text{pegawai}}$$

Setelah hasil rasio didapatkan, lalu data ditampilkan dalam bentuk grafik. Grafik dibuat berdasarkan provinsi/pulau dengan hasil rasio paling tinggi sampai ke paling rendah Seperti contoh:

1. Grafik rasio pada tingkat provinsi di Indonesia



2. Grafik rasio pada tingkat pulau di Indonesia



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Hasil Penelitian

##### 1.1. Pembangunan Infrastruktur pada Pendidikan Dasar Tahun 2015-2018

###### 1.1.1. Gedung Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Indonesia Tahun 2015-2018

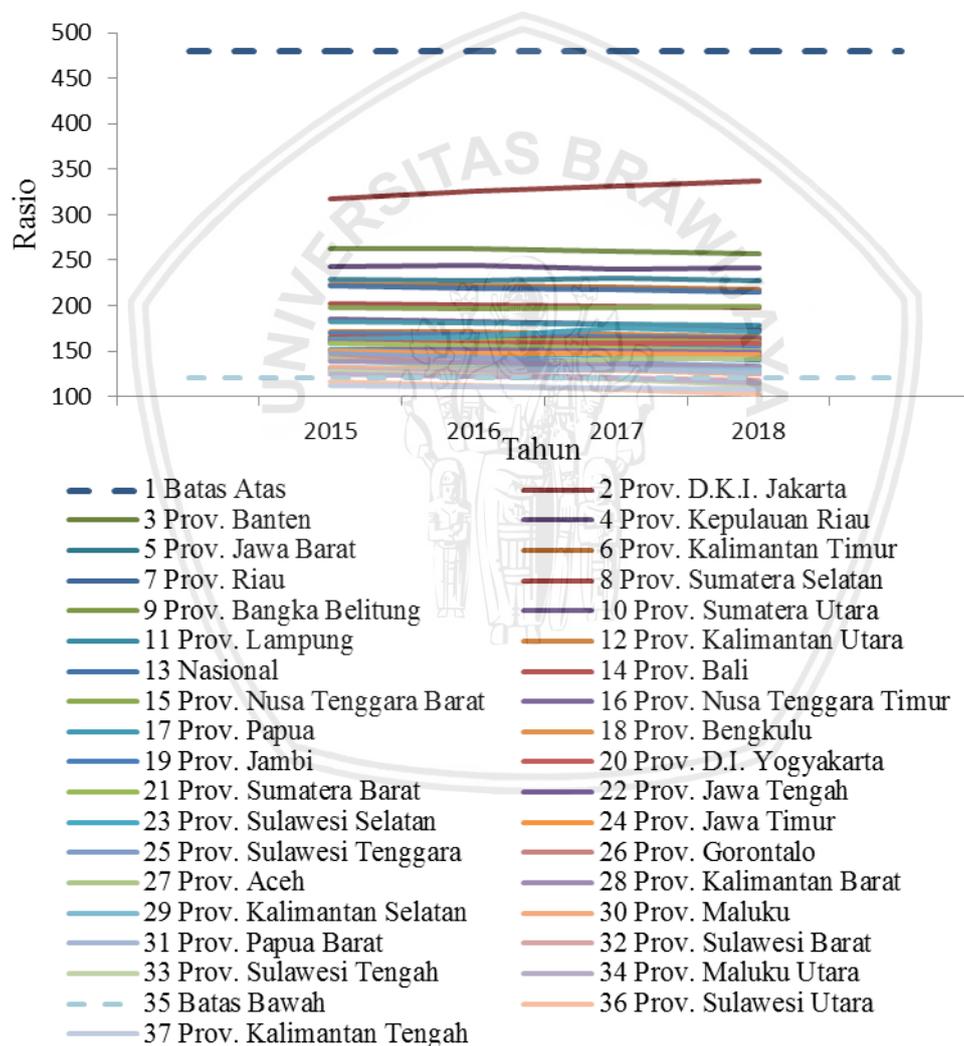
Gedung sekolah adalah bangunan yang mendukung proses belajar mengajar antara guru dengan siswa yang merupakan salah satu infrastruktur paling dibutuhkan dalam bidang pendidikan. Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti menunjukkan jumlah rasio gedung sekolah dengan siswa SD/MI dan SMP/MTs di Indonesia pada tahun 2015-2018 telah mengalami peningkatan namun masih terjadi ketimpangan karena penyebaran yang belum merata di seluruh Indonesia. Berikut adalah hasil penelitian rasio siswa terhadap gedung sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Indonesia tahun 2015-2018.

###### 1.1.1.1. Gedung Sekolah SD/MI di Indonesia Tahun 2015-2018

###### 1.1.1.1.1. Rasio siswa terhadap gedung sekolah SD/MI tahun 2015-2018 berdasarkan provinsi di Indonesia

Rasio siswa terhadap gedung sekolah SD/MI ditunjukkan oleh jumlah siswa terhadap jumlah gedung sekolah SD/MI. Semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar jumlah siswa yang bersekolah di sekolah tersebut. Dan sebaliknya, semakin rendah angka rasionya maka semakin sedikit siswa yang bersekolah di sekolah tersebut. Berdasarkan Permendikbud No 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pasal 26 yang berisi bahwa satu sekolah SD/MI

paling sedikit memiliki siswa sejumlah 120 dan paling banyak memiliki siswa sejumlah 480. Oleh karena itu, jumlah siswa dalam sekolah diatur dalam Permendikbud agar tercipta proses belajar mengajar yang efektif. Berikut adalah data rasio siswa terhadap gedung sekolah SD/MI tahun 2015-2018 berdasarkan provinsi di Indonesia.



**Gambar 1: Rasio siswa terhadap gedung sekolah SD/MI tahun 2015-2018 berdasarkan provinsi di Indonesia**

Sumber: *Dapodikdasmn, 2019 diolah oleh penulis*

Rasio siswa terhadap gedung sekolah SD/MI ini diperoleh dari pembagian jumlah siswa dengan jumlah gedung sekolah. Dari rumus tersebut, diperoleh rasio

siswa terhadap gedung sekolah yang kemudian ditampilkan seperti pada gambar 1. Pada gambar 1 dapat dilihat bahwa Provinsi D.K.I Jakarta memiliki rasio siswa terhadap gedung sekolah SD/MI di Indonesia yang paling tinggi sejumlah 317 pada tahun 2015, 326 pada tahun 2016, 332 pada tahun 2017 dan 337 pada tahun 2018. D.K.I Jakarta setiap tahunnya mengalami peningkatan rasio karena jumlah siswa dan gedung sekolah yang menurun namun tetap terjadi peningkatan jumlah rasio.

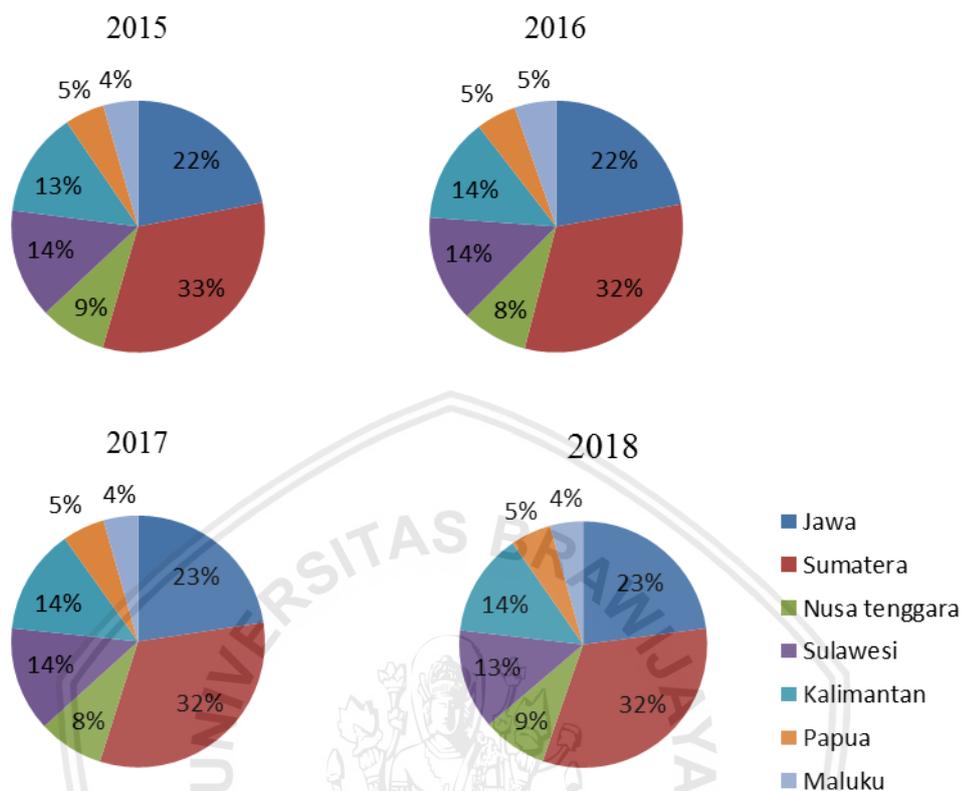
Selain itu, masih ditemukan provinsi dengan jumlah rasio siswa terhadap gedung sekolah yang jumlahnya dibawah ketentuan Permendikbud No 17 Tahun 2017 Pasal 26 yaitu Provinsi Sulawesi Utara dan Kalimantan Tengah yang memiliki rasio siswa terhadap gedung sekolah SD/MI di Indonesia yang paling rendah. Jumlah rasio siswa terhadap gedung sekolah pada dua provinsi ini terus mengalami penurunan tiap tahunnya. Provinsi Sulawesi Utara tahun 2015 memiliki rasio 117, tahun 2016 rasio 113, tahun 2017 rasio 108 dan tahun 2018 rasio 102. Sedangkan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015 memiliki rasio 112, tahun 2016 rasio 110, tahun 2017 rasio 109 dan tahun 2018 rasio 107. Kedua Provinsi ini mengalami penurunan jumlah rasio karena tiap tahun jumlah siswa SD/MI pada provinsi ini terus mengalami penurunan jumlahnya sedangkan pembangunan gedung sekolah terus meningkat.

Berdasarkan jumlah rasio siswa terhadap gedung sekolah SD/MI dibagi jumlah provinsi di Indonesia maka peneliti mendapatkan rata-rata nasional rasio siswa terhadap gedung sekolah SD/MI di Indonesia. Pada tahun 2015 rata-rata nasional rasio siswa terhadap gedung sekolah SD/MI sejumlah 170, pada tahun

2016 sejumlah 169, kemudian tahun 2017 sejumlah 166 dan tahun 2018 sejumlah 164. Maka, hasil dari rata-rata nasional rasio siswa terhadap gedung sekolah SD/MI di Indonesia menunjukkan jumlah siswa pada sekolah SD/MI di Indonesia tahun 2015-2018 dapat dikatakan efektif.

#### **1.1.1.1.2. Proporsi rasio siswa terhadap gedung sekolah SD/MI tahun 2015-2018 berdasarkan pulau di Indonesia**

Rasio siswa terhadap gedung sekolah SD/MI ditunjukkan oleh jumlah siswa terhadap jumlah gedung sekolah SD/MI. Angka rasio siswa terhadap gedung sekolah SD/MI menunjukkan proporsi rasio siswa terhadap gedung sekolah SD/MI di pulau tersebut. Semakin tingginya proporsi maka semakin besar pembangunan gedung sekolah SD/MI pada pulau tersebut. Dan sebaliknya, semakin rendah proporsi maka semakin kecil pembangunan gedung sekolah SD/MI pada pulau tersebut. Berikut adalah data proporsi rasio siswa terhadap gedung sekolah SD/MI tahun 2015-2018 berdasarkan pulau di Indonesia.



**Gambar 2: Rasio siswa terhadap gedung sekolah SD/MI Tahun 2015-2018 berdasarkan Pulau di Indonesia**

Sumber: *Dapodikdasmem, 2019 diolah oleh penulis*

Rasio siswa terhadap gedung sekolah SD/MI ini diperoleh dari pembagian jumlah siswa dengan jumlah gedung sekolah. Dari rumus tersebut, diperoleh proporsi rasio siswa terhadap gedung sekolah yang kemudian ditampilkan seperti pada gambar 2. Pada gambar 2 dapat dilihat Pulau Sumatera memiliki rasio siswa terhadap gedung sekolah SD/MI di Indonesia yang paling tinggi sejumlah 33% pada tahun 2015 dan sejumlah 32% pada tahun 2016-2018. Sedangkan Pulau Maluku memiliki rasio siswa terhadap gedung sekolah SD/MI di Indonesia yang paling rendah sejumlah 4% pada tahun 2015, 5% pada tahun 2016 dan 4% pada tahun 2017-2018.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menemukan ketimpangan antara Pulau Maluku dengan pulau-pulau lain yang ada di Indonesia. Pulau Maluku sebagai pulau yang memiliki rasio siswa terhadap gedung sekolah SD/MI terendah memerlukan perhatian khusus agar bisa berkembang seperti pulau-pulau lainnya yang ada di Indonesia.

#### **1.1.1.1.3. 5 Kabupaten/Kota dengan rasio siswa terhadap gedung sekolah SD/MI tertinggi dan terendah di Indonesia tahun 2015-2018**

Rasio siswa terhadap gedung sekolah SD/MI ditunjukkan oleh jumlah siswa terhadap jumlah gedung sekolah SD/MI. Semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar jumlah siswa yang bersekolah di sekolah tersebut. Dan sebaliknya, semakin rendah angka rasionya maka semakin sedikit siswa yang bersekolah di sekolah tersebut. Berdasarkan Permendikbud No 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pasal 26 yang berisi bahwa satu sekolah SD/MI paling sedikit memiliki siswa sejumlah 120 dan paling banyak memiliki siswa sejumlah 480. Oleh karena itu, jumlah siswa dalam sekolah diatur dalam Permendikbud agar tercipta proses belajar mengajar yang efektif. Berikut adalah data rasio siswa terhadap gedung sekolah SD/MI tertinggi di Indonesia tahun 2015-2018.

**Tabel 6: 5 Kabupaten/Kota dengan rasio siswa terhadap gedung sekolah SD/MI terbanyak di Indonesia tahun 2015-2018**

No	2015		2016		2017		2018	
	kab/kota	Jml	kab/kota	Jml	kab/kota	Jml	kab/kota	Jml
1	Palembang	575	Palembang	438	Bandung	486	Bandung	477
2	Tangerang Selatan	434	Tangerang Selatan	429	Palembang	431	Palembang	429
3	Tarakan	432	Tarakan	427	Tangerang Selatan	426	Tangerang Selatan	414
4	Samarinda	409	Cimahi	412	Tarakan	423	Cimahi	414
5	Bogor	401	Bogor	405	Cimahi	415	Tarakan	408

Sumber: *Dapodikdasmen, 2019 diolah oleh penulis*

Rasio siswa terhadap gedung sekolah SD/MI ini diperoleh dari pembagian jumlah siswa dengan jumlah sekolah. Dari rumus tersebut, diperoleh rasio siswa terhadap gedung sekolah SD/MI yang kemudian diambil 5 daerah dengan rasio siswa terhadap gedung sekolah SD/MI tertinggi di Indonesia sebagaimana yang ditunjukkan oleh tabel 6. Pada tabel 6 dapat dilihat bahwa tahun 2015-2016 Kota Palembang, Sumatera Selatan memiliki rasio siswa terhadap gedung sekolah SD/MI tertinggi di Indonesia dengan jumlah tahun 2015 sejumlah 575 dan tahun 2016 sejumlah 438. Pada tahun 2015 Kota Palembang memiliki jumlah rasio siswa terhadap gedung sekolah SD/MI yang melebihi standar Permendikbud No 17 Tahun 2017 Pasal 26 karena jumlah siswa di Kota Palembang jumlahnya tinggi namun jumlah sekolah yang masih sedikit, maka ditahun 2016 dilakukan peningkatan pembangunan gedung sekolah SD/MI di Kota Palembang.

Kemudian tahun 2017-2018 ditempati oleh Kota Bandung, Jawa Barat yang memiliki rasio siswa terhadap gedung sekolah SD/MI tertinggi di Indonesia tahun 2017 sejumlah 486 dan tahun 2018 sejumlah 477. Tahun 2017 Kota Bandung jumlah rasio siswa terhadap gedung sekolah melebihi standar sesuai

Permendikbud No 17 Tahun 2017 Pasal 26 karena jumlah siswa yang tinggi, maka ditahun 2018 jumlah siswa SD/MI di Kota Bandung menurun.

Sedangkan, tahun 2015-2016 Kota Bogor, Jawa barat memiliki rasio siswa terhadap gedung sekolah SD/MI tertinggi urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 401 pada tahun 2015 dan 405 pda tahun 2016. Lalu tahun 2017 Kota Cimahi, Jawa Barat memiliki rasio siswa terhadap gedung sekolah SD/MI tertinggi urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 415. Selain itu, tahun 2018 Kota Tarakan, Kalimantan Utara memiliki rasio siswa terhadap gedung sekolah SD/MI tertinggi urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 408.

Selanjutnya, data mengenai 5 daerah dengan rasio siswa terhadap gedung sekolah SD/MI terendah di Indonesia pada tahun 2015-2018 dapat dilihat pada tabel 7 tersebut.

**Tabel 7: 5 Kabupaten/Kota dengan rasio siswa terhadap gedung sekolah SD/MI terendah di Indonesia tahun 2015-2018**

No	2015		2016		2017		2018	
	kab/kota	Jml	kab/kota	Jml	kab/kota	jml	kab/kota	Jml
1	Kep. Sangihe	57	Kep. Sangihe	56	Kep. Sangihe	56	Kep. Sangihe	56
2	Kep.Sitaro	64	Puncak	58	Kep. Sitaro	58	Kep. Sitaro	57
3	Puncak	65	Kep.Sitaro	60	Balangan	70	Balangan	70
4	Intan Jaya	65	Balangan	71	Maybrat	76	Mamasa	71
5	Balangan	73	Maybrat	74	Pulang Pisau	77	Tambrauw	74

Sumber: *Dapodikdasmen, 2019 diolah oleh penulis*

Rasio siswa terhadap gedung sekolah SD/MI ini diperoleh dari pembagian jumlah siswa dengan jumlah gedung sekolah. Dari rumus tersebut, diperoleh rasio siswa terhadap gedung sekolah SD/MI yang kemudian diambil 5 daerah dengan

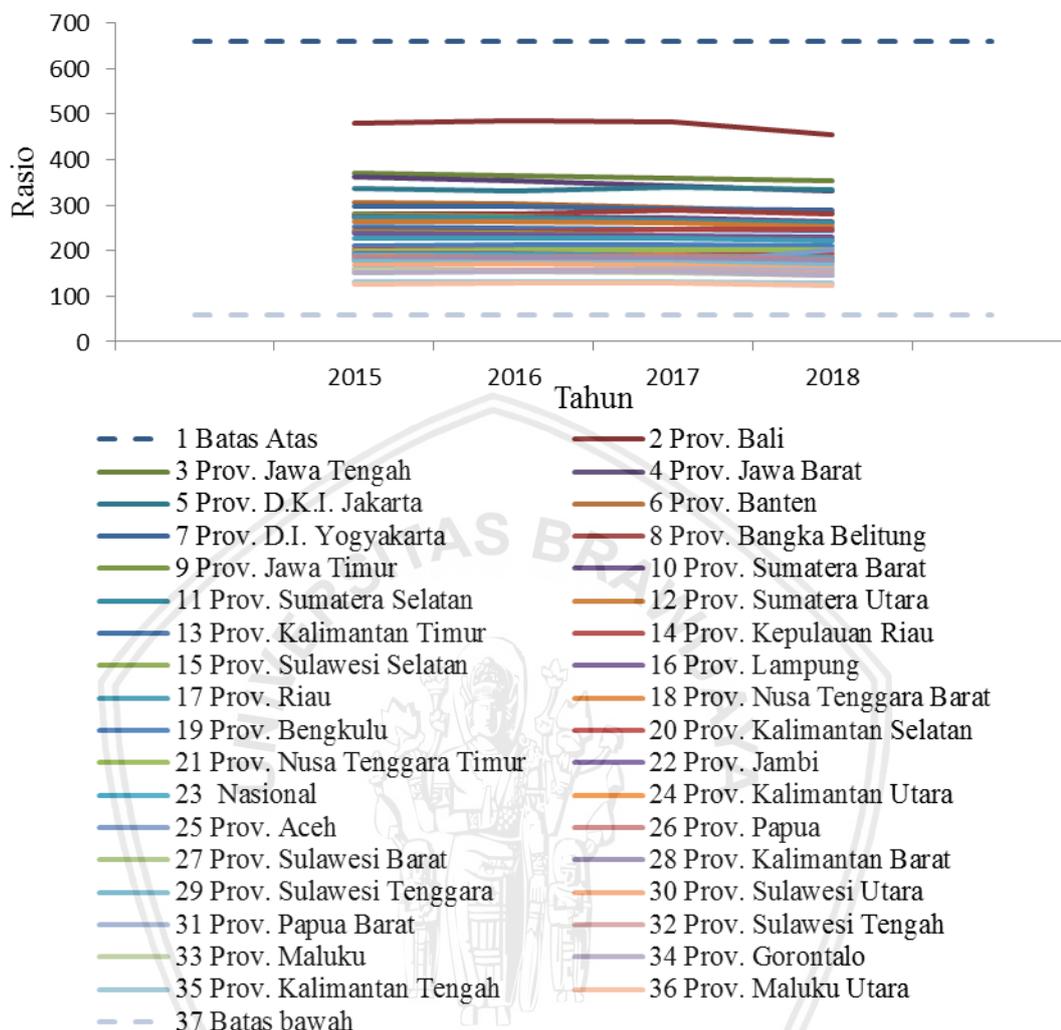
rasio siswa terhadap gedung sekolah SD/MI terendah di Indonesia sebagaimana yang ditunjukkan oleh tabel 7. Pada tabel 7 dapat dilihat bahwa Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara memiliki rasio siswa terhadap gedung sekolah SD/MI terendah di Indonesia dengan jumlah 57 pada tahun 2015 dan sejumlah 56 pada tahun 2016-2018. Hal ini terjadi karena jumlah siswa pada Kabupaten Kepulauan Sangihe tiap tahunnya terus mengalami penurunan.

Sedangkan, tahun 2015 Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan memiliki rasio siswa terhadap gedung sekolah SD/MI terendah urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 73. Hal itu terjadi karena jumlah siswa di Kabupaten Balangan tinggi namun jumlah sekolah SD/MI pada daerah tersebut sedikit. Lalu tahun 2016 Kabupaten Maybrat, Papua Barat memiliki rasio siswa terhadap gedung sekolah SD/MI terendah urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 74 karena jumlah sekolah SD/MI pada daerah ini sedikit. Kemudian tahun 2017 Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah memiliki rasio siswa terhadap gedung sekolah SD/MI terendah urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 77. Hal ini terjadi karena jumlah siswa tinggi namun jumlah gedung sekolah pada daerah ini sedikit. Selain itu, tahun 2018 Kabupaten Tambrau, Papua Barat memiliki rasio siswa terhadap gedung sekolah SD/MI terendah urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 74 karena jumlah sekolah SD/MI sedikit.

### **1.1.1.2. Gedung sekolah SMP/MTs di Indonesia tahun 2015-2018**

#### **1.1.1.2.1. Rasio siswa terhadap gedung sekolah SMP/MTs tahun 2015-2018 berdasarkan provinsi di Indonesia**

Rasio siswa terhadap gedung sekolah SMP/MTs ditunjukkan oleh jumlah siswa terhadap jumlah gedung sekolah SMP/MTs. Semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar jumlah siswa yang bersekolah di sekolah tersebut. Dan sebaliknya, semakin rendah angka rasionya maka semakin sedikit siswa yang bersekolah di sekolah tersebut. Berdasarkan Permendikbud No 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pasal 26 yang berisi bahwa satu sekolah SMP/MTs paling sedikit memiliki siswa sejumlah 60 dan paling banyak memiliki siswa sejumlah 660. Oleh karena itu, jumlah siswa dalam sekolah diatur dalam Permendikbud agar tercipta proses belajar mengajar yang efektif. Berikut adalah data rasio siswa terhadap gedung sekolah SMP/MTs tahun 2015-2018 berdasarkan Provinsi di Indonesia.



**Gambar 3: Rasio siswa terhadap gedung sekolah SMP/MTs tahun 2015-2018 berdasarkan Provinsi di Indonesia**

Sumber: *Dapodikdasmn, 2019 diolah oleh penulis*

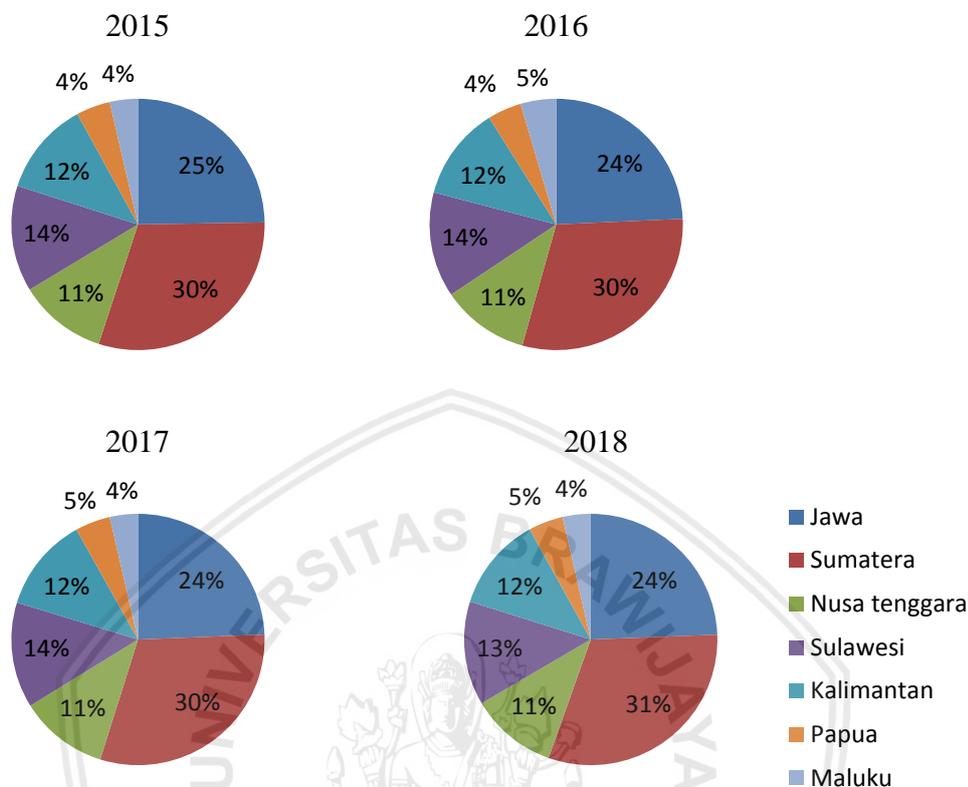
Rasio siswa terhadap gedung sekolah SMP/MTs ini diperoleh dari pembagian jumlah siswa dengan gedung sekolah. Dari rumus tersebut, diperoleh rasio siswa terhadap gedung sekolah yang kemudian ditampilkan seperti pada gambar 3. Pada gambar 3 dapat dilihat bahwa Provinsi Bali memiliki rasio siswa terhadap gedung sekolah SMP/MTs di Indonesia yang paling tinggi sejumlah 480 pada tahun 2015, 486 pada tahun 2016, 482 pada tahun 2017 dan 454 pada tahun 2018. Pada tahun 2018 Provinsi Bali mengalami penurunan jumlah rasio dikarenakan jumlah siswa

SMP/MTs menurun sedangkan pembangunan gedung sekolah terus meningkat. Sedangkan, Provinsi Maluku Utara memiliki rasio siswa terhadap gedung sekolah SMP/MTs di Indonesia yang paling rendah sejumlah 127 pada tahun 2015, 128 pada tahun 2016-2017, dan 124 pada tahun 2018. Hal tersebut terjadi karena jumlah siswa meningkat namun jumlah gedung sekolah menurun.

Berdasarkan jumlah rasio siswa terhadap gedung sekolah SMP/MTs dibagi jumlah provinsi di Indonesia maka peneliti mendapatkan rata-rata nasional rasio siswa terhadap gedung sekolah SMP/MTs di Indonesia. Pada tahun 2015-2016 rata-rata nasional rasio siswa terhadap gedung sekolah SMP/MTs sejumlah 191, lalu tahun 2017 sejumlah 189 dan tahun 2018 sejumlah 186. Maka hasil dari rata-rata nasional rasio siswa terhadap gedung sekolah SMP/MTs di Indonesia menunjukkan jumlah siswa SMP/MTs pada sekolah di Indonesia tahun 2015-2018 dapat dikatakan efektif.

#### **1.1.1.2.2. Proporsi rasio siswa terhadap gedung sekolah SMP/MTs tahun 2015-2018 berdasarkan pulau di Indonesia**

Rasio siswa terhadap gedung sekolah SMP/MTs ditunjukkan oleh jumlah siswa terhadap jumlah gedung sekolah. Angka rasio siswa terhadap gedung sekolah SMP/MTs menunjukkan proporsi rasio siswa terhadap gedung sekolah SMP/MTs di pulau tersebut. Semakin tingginya proporsi maka semakin besar pembangunan sekolah SMP/MTs pada pulau tersebut. Dan sebaliknya, semakin rendah proporsi maka semakin kecil pembangunan sekolah SMP/MTs pada pulau tersebut. Berikut adalah data proporsi rasio siswa terhadap gedung sekolah SMP/MTs tahun 2015-2018 berdasarkan Pulau di Indonesia.



**Gambar 4: Rasio Siswa terhadap gedung sekolah SMP/MTs Tahun 2015-2018 berdasarkan Pulau di Indonesia**

Sumber: *Dapodikdasmen, 2019 diolah oleh penulis*

Rasio siswa terhadap gedung sekolah SMP/MTs ini diperoleh dari pembagian jumlah siswa dengan jumlah gedung sekolah. Dari rumus tersebut, diperoleh proporsi rasio siswa terhadap gedung sekolah yang kemudian ditampilkan seperti pada gambar 4. Pada gambar 4 dapat dilihat Pulau Sumatera memiliki rasio siswa terhadap gedung sekolah SMP/MTs di Indonesia yang paling tinggi sejumlah 30% pada tahun 2015 dan sejumlah 31% pada tahun 2016-2018. Sedangkan Pulau Maluku memiliki rasio siswa terhadap gedung sekolah SMP/MTs di Indonesia yang paling rendah sejumlah 4% pada tahun 2015, 5% pada tahun 2016 dan 4% pada tahun 2017-2018.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menemukan ketimpangan antara Pulau Maluku dengan pulau-pulau lain yang ada di Indonesia. Pulau Maluku sebagai pulau yang memiliki rasio siswa terhadap gedung sekolah SMP/MTs terendah ini memerlukan perhatian khusus agar bisa berkembang seperti pulau-pulau lainnya yang ada di Indonesia.

#### **1.1.1.2.3. 5 Kabupaten/Kota dengan rasio siswa terhadap gedung sekolah SMP/MTs tertinggi dan terendah di Indonesia tahun 2015-2018**

Rasio siswa terhadap gedung sekolah SMP/MTs ditunjukkan oleh jumlah siswa terhadap jumlah gedung sekolah SMP/MTs. Semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar jumlah siswa yang bersekolah di sekolah tersebut. Dan sebaliknya, semakin rendah angka rasionya maka semakin sedikit siswa yang bersekolah di sekolah tersebut. Berdasarkan Permendikbud No 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pasal 26 yang berisi bahwa satu sekolah SMP/MTs paling sedikit memiliki siswa sejumlah 60 dan paling banyak memiliki siswa sejumlah 660. Oleh karena itu, jumlah siswa dalam sekolah diatur dalam Permendikbud agar tercipta proses belajar mengajar yang efektif. Berikut adalah data rasio siswa terhadap gedung sekolah SMP/MTs tertinggi di Indonesia tahun 2015-2018.

**Tabel 8: 5 Kabupaten/Kota dengan rasio siswa terhadap gedung sekolah SMP/MTs terbanyak di Indonesia tahun 2015-2018**

No	2015		2016		2017		2018	
	kab/kota	jml	kab/kota	jml	kab/kota	jml	kab/kota	Jml
1	Solok	641	Solok	648	Solok	665	Cimahi	574
2	Cimahi	626	Cimahi	621	Bekasi	602	Solok	570
3	Bukittinggi	624	Denpasar	606	Denpasar	598	Denpasar	550
4	Kab. Karawang	619	Kab. Karawang	581	Cimahi	595	Kab. Gianyar	510
5	Denpasar	605	Gianyar	541	Kab. Karawang	540	Kab. Karawang	503

Sumber: *Dapodikdasmen, 2019 diolah oleh penulis*

Rasio siswa terhadap gedung sekolah SMP/MTs ini diperoleh dari pembagian jumlah siswa dengan jumlah gedung sekolah. Dari rumus tersebut, diperoleh rasio siswa terhadap gedung sekolah SMP/MTs yang kemudian diambil 5 daerah dengan rasio siswa terhadap gedung sekolah SMP/MTs tertinggi di Indonesia sebagaimana yang ditunjukkan oleh tabel 8. Pada tabel 8 dapat dilihat bahwa tahun 2015-2017 Kota Solok, Sumatera Barat memiliki rasio siswa terhadap gedung sekolah SMP/MTs tertinggi di Indonesia dengan jumlah tahun 2015 sejumlah 641, tahun 2016 sejumlah 648 dan tahun 2017 sejumlah 665. Ditahun 2017 Kota Solok melebihi standar Permendikbud No 17 Tahun 2017 Pasal 26 karena jumlah siswa terus meningkat sedangkan jumlah gedung sekolah tidak bertambah. Lalu, tahun 2018 Kota Cimahi, Jawa Barat memiliki rasio siswa terhadap gedung sekolah SMP/MTs tertinggi di Indonesia sejumlah 574.

Sedangkan, tahun 2015 Kota Denpasar, Bali memiliki rasio siswa terhadap gedung sekolah SMP/MTs tertinggi urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 605. Lalu tahun 2016 Kota Gianyar, Bali memiliki rasio siswa terhadap gedung sekolah SMP/MTs tertinggi urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 541.

Kemudian tahun 2017-2018 Kabupaten Karawang, Jawa Barat memiliki rasio siswa terhadap gedung sekolah SMP/MTs tertinggi urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 540 pada tahun 2017 dan sejumlah 503 pada tahun 2018.

Selanjutnya, data mengenai 5 daerah dengan rasio siswa terhadap gedung sekolah SMP/MTs terendah di Indonesia pada tahun 2015-2018 dapat dilihat pada tabel 9 tersebut.

**Tabel 9: 5 Kabupaten/Kota dengan rasio siswa terhadap gedung sekolah SMP/MTs terendah di Indonesia Tahun 2015-2018**

no	2015		2016		2017		2018	
	kab/kota	jml	kab/kota	jml	kab/kota	Jml	kab/kota	Jml
1	Intan Jaya	55	Nduga	72	Tambrauw	74	Tambrauw	74
2	Nduga	60	Tambrauw	81	Nduga	81	Intan Jaya	80
3	Maluku Barat Daya	77	Membramo Tengah	83	Aceh Jaya	82	Kep. Sangihe	82
4	Tambrauw	82	Murung Raya	85	Murung Raya	85	Aceh Jaya	83
5	Raja Ampat	86	Aceh Jaya	85	Maybrat	87	Murung Raya	85

Sumber: *Dapodikdasmn, 2019 diolah oleh penulis*

Rasio siswa terhadap gedung sekolah SMP/MTs ini diperoleh dari pembagian jumlah siswa dengan jumlah gedung sekolah. Dari rumus tersebut, diperoleh rasio siswa terhadap gedung sekolah SMP/MTs yang kemudian diambil 5 daerah dengan rasio siswa terhadap gedung sekolah SMP/MTs terendah di Indonesia sebagaimana yang ditunjukkan oleh tabel 9. Pada tabel 9 dapat dilihat bahwa Kabupaten Intan Jaya, Papua memiliki rasio siswa terhadap gedung sekolah SMP/MTs terendah di Indonesia dengan jumlah 55. Hal ini terjadi karena kurangnya jumlah gedung sekolah SMP/MTs di daerah tersebut. Lalu pada tahun 2016 Kabupaten Nduga, Papua memiliki rasio siswa terhadap gedung sekolah

SMP/MTs terendah di Indonesia dengan jumlah 72. Kemudian tahun 2017-2018 Kabupaten Tembrauw, Papua Barat memiliki rasio siswa terhadap gedung sekolah SMP/MTs terendah di Indonesia dengan jumlah 74 pada tiap tahunnya.

Sedangkan, tahun 2015 Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat memiliki rasio siswa terhadap gedung sekolah SMP/MTs terendah urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 86. Lalu tahun 2016 Kabupaten Aceh Jaya, Aceh memiliki rasio siswa terhadap gedung sekolah SMP/MTs terendah urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 85. Kemudian tahun 2017 Kabupaten Maybrat, Papua Barat memiliki rasio siswa terhadap gedung sekolah SMP/MTs terendah urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 87. Selain itu, tahun 2018 Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah memiliki rasio siswa terhadap gedung sekolah SMP/MTs terendah urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 85.

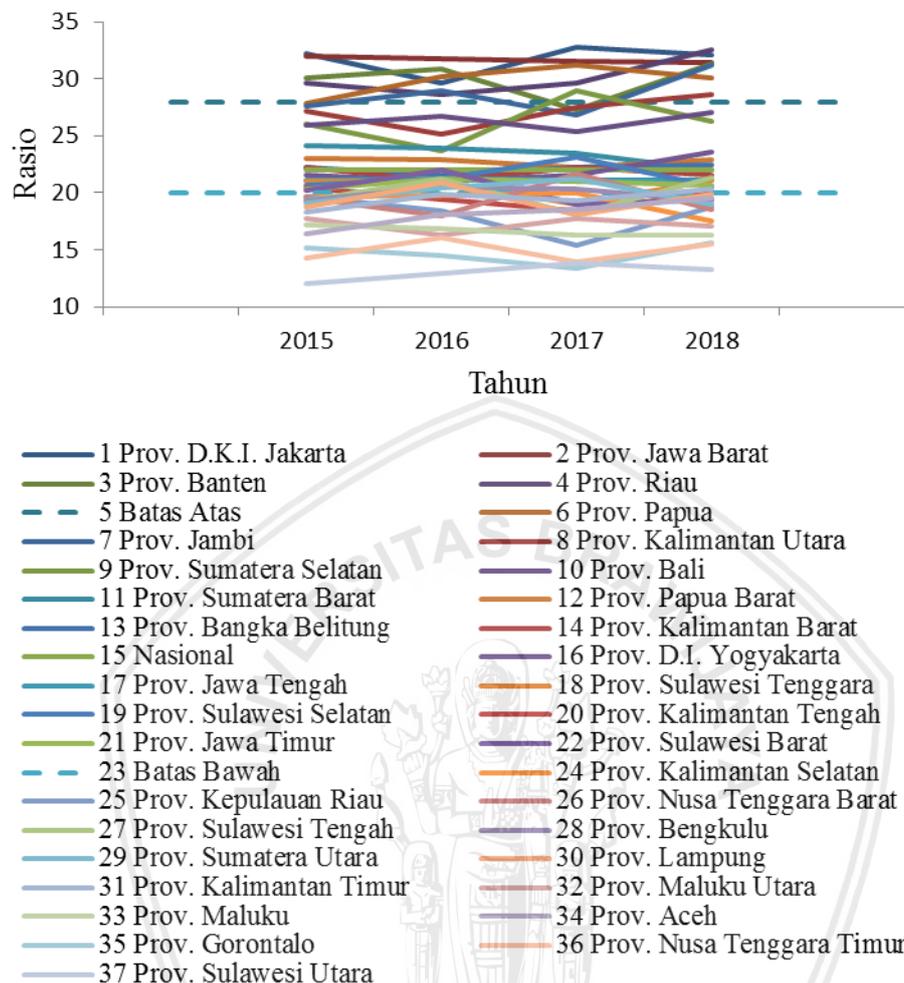
#### **1.1.2. Ruang Kelas SD/MI dan SMP/MTs di Indonesia Tahun 2015-2018**

Ruang kelas adalah suatu ruangan dalam gedung sekolah yang berfungsi sebagai tempat untuk kegiatan tatap muka dalam proses belajar mengajar antara siswa dengan murid. Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti menunjukkan bahwa terdapat daerah di Indonesia yang belum memiliki jumlah ruang kelas yang mencukupi untuk siswa dalam proses belajar. Berikut adalah hasil penelitian rasio siswa terhadap ruang kelas SD/MI dan SMP/MTs di Indonesia tahun 2015-2018.

### **1.1.2.1. Ruang kelas SD/MI di Indonesia tahun 2015-2018**

#### **1.1.2.1.1. Rasio siswa terhadap ruang kelas SD/MI tahun 2015-2018 berdasarkan provinsi di Indonesia**

Rasio siswa terhadap ruang kelas SD/MI ditunjukkan oleh jumlah siswa terhadap jumlah ruang kelas SD/MI. Semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar jumlah siswa yang berada di ruang kelas tersebut. Dan sebaliknya, semakin rendah angka rasionya maka semakin sedikit siswa yang berada di ruang kelas tersebut. Berdasarkan Permendikbud No 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pasal 24 yang berisi bahwa satu kelas SD/MI paling sedikit memiliki siswa sejumlah 20 dan paling banyak memiliki siswa sejumlah 28. Oleh karena itu, jumlah siswa dalam ruang kelas diatur dalam Permendikbud agar tercipta proses belajar mengajar yang efektif. Berikut adalah data rasio siswa terhadap ruang kelas SD/MI tahun 2015-2018 berdasarkan provinsi di Indonesia.



**Gambar 5: Rasio siswa terhadap ruang kelas SD/MI tahun 2015-2018 berdasarkan provinsi di Indonesia**

Sumber: *Dapodikdasmn, 2019 diolah oleh penulis*

Rasio siswa terhadap ruang kelas SD/MI ini diperoleh dari pembagian jumlah siswa dengan ruang kelas. Dari rumus tersebut, diperoleh rasio siswa terhadap ruang kelas yang kemudian ditampilkan seperti pada gambar 5. Pada gambar 5 dapat dilihat terdapat daerah dengan jumlah rasio siswa terhadap ruang kelas yang tidak sesuai dengan ketentuan Permendikbud No 17 Tahun 2017 Pasal 24 tentang penerimaan peserta didik baru.

Provinsi D.K.I Jakarta, Jawa Barat, Banten dan Riau yang memiliki jumlah rasio melebihi 28 siswa sesuai ketentuan maksimal dalam Permendikbud. Hal ini terjadi karena pada Provinsi D.K.I Jakarta, Jawa Barat dan Riau ditemukan jumlah siswa menurun sedangkan jumlah ruang kelas naik. Lalu, pada Provinsi Banten ditemukan jumlah siswa naik namun jumlah ruang kelas menurun.

Sedangkan, provinsi dengan jumlah rasio siswa terhadap ruang kelas yang berada dibawah standar Permendikbud No 17 Tahun 2017 Pasal 24 terdapat 14 (empat belas) provinsi. Posisi paling kecil ditempati oleh Provinsi Sulawesi Utara dengan rasio tahun 2015 sejumlah 12, tahun 2016 sejumlah 13, tahun 2017 sejumlah 14 dan tahun 2018 sejumlah 12. Hal ini terjadi karena semakin tahun jumlah siswa SD/MI terus menurun sedangkan jumlah ruang kelas juga ikut terus menurun.

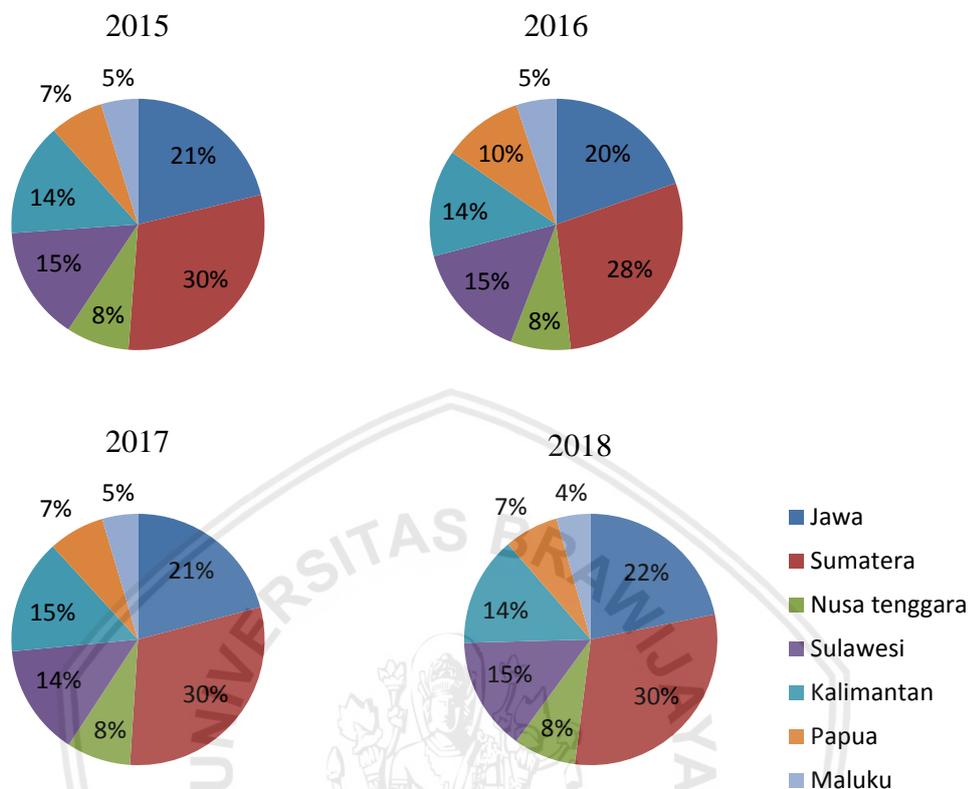
Selain itu, provinsi dengan jumlah rasio dibawah standar yang terjadi karena jumlah siswa menurun tapi jumlah ruang kelas naik yaitu Provinsi Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Maluku, Nusa Tenggara Timur dan Gorontalo. Lalu provinsi dengan jumlah siswa naik namun jumlah ruang kelas turun adalah Provinsi Kepulauan Riau, Lampung, dan Kalimantan Timur. Sedangkan, provinsi dengan jumlah rasio dibawah standar yang terjadi karena jumlah siswa menurun dan jumlah ruang kelas juga menurun adalah Provinsi Bengkulu, Sumatera Utara dan Aceh.

Berdasarkan jumlah rasio siswa terhadap ruang kelas SD/MI dibagi jumlah provinsi di Indonesia maka peneliti mendapatkan rata-rata nasional rasio siswa

terhadap ruang kelas SD/MI di Indonesia. Pada tahun 2015 rata-rata nasional rasio siswa terhadap ruang kelas SD/MI sejumlah 22 pada tahun 2015-2018. Maka hasil dari rata-rata nasional rasio siswa terhadap ruang kelas SD/MI di Indonesia menunjukkan jumlah ruang kelas SD/MI pada sekolah di Indonesia tahun 2015-2018 dapat dikatakan efektif.

#### **1.1.2.1.2. Proporsi rasio siswa terhadap ruang kelas SD/MI tahun 2015-2018 berdasarkan pulau di Indonesia**

Rasio siswa terhadap ruang kelas SD/MI ditunjukkan oleh jumlah siswa terhadap jumlah ruang kelas SD/MI. Angka rasio siswa terhadap ruang kelas SD/MI menunjukkan proporsi rasio siswa terhadap ruang kelas SD/MI di pulau tersebut. Semakin tinggi proporsi maka semakin besar pembangunan ruang kelas SD/MI pada pulau tersebut. Dan sebaliknya, semakin rendah proporsi maka semakin kecil pembangunan ruang kelas SD/MI pada pulau tersebut. Berikut adalah data proporsi rasio siswa terhadap ruang kelas SD/MI tahun 2015-2018 berdasarkan Pulau di Indonesia.



**Gambar 6: Rasio siswa terhadap ruang kelas SD/MI Tahun 2015-2018 berdasarkan Pulau di Indonesia**

Sumber: *Dapodikdasmn, 2019 diolah oleh penulis*

Rasio siswa terhadap ruang kelas SD/MI ini diperoleh dari pembagian jumlah siswa dengan jumlah ruang kelas. Dari rumus tersebut, diperoleh proporsi rasio siswa terhadap ruang kelas yang kemudian ditampilkan seperti pada gambar 6. Pada gambar 6 dapat dilihat Pulau Sumatera memiliki rasio siswa terhadap ruang kelas SD/MI di Indonesia yang paling tinggi sejumlah 30% pada tahun 2015 lalu sejumlah 28% pada tahun 2016. Kemudian sejumlah 30% pada tahun 2017-2018. Sedangkan Pulau Maluku memiliki rasio siswa terhadap ruang kelas SD/MI di Indonesia yang paling rendah sejumlah 5% pada tahun 2015-2017, dan 4% pada tahun 2018.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menemukan ketimpangan antara Pulau Maluku dengan pulau-pulau lain yang ada di Indonesia. Pulau Maluku sebagai pulau yang memiliki rasio siswa terhadap ruang kelas SD/MI terendah memerlukan perhatian khusus agar bisa berkembang seperti pulau-pulau lainnya yang ada di Indonesia.

#### **1.1.2.1.3. 5 Kabupaten/Kota dengan rasio siswa terhadap ruang kelas SD/MI tertinggi dan terendah di Indonesia tahun 2015-2018**

Rasio siswa terhadap ruang kelas SD/MI ditunjukkan oleh jumlah siswa terhadap jumlah ruang kelas SD/MI. Semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar jumlah siswa yang berada di ruang kelas tersebut. Dan sebaliknya, semakin rendah angka rasionya maka semakin sedikit siswa yang berada di ruang kelas tersebut. Berdasarkan Permendikbud No 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pasal 24 yang berisi bahwa satu ruang kelas SD/MI paling sedikit memiliki siswa sejumlah 20 dan paling banyak memiliki siswa sejumlah 28. Oleh karena itu, jumlah siswa dalam ruang kelas diatur dalam Permendikbud agar tercipta proses belajar mengajar yang efektif. Berikut adalah data rasio siswa terhadap ruang kelas SD/MI tertinggi di Indonesia tahun 2015-2018.

**Tabel 10: 5 Kabupaten/Kota dengan rasio siswa terhadap ruang kelas SD/MI tertinggi di Indonesia tahun 2015-2018**

No	2015		2016		2017		2018	
	kab/kota	Jml	kab/kota	Jml	kab/kota	Jml	kab/kota	Jml
1	Tarakan	97	Tarakan	100	Tarakan	82	Lhokseumawe	76
2	Langsa	88	Langsa	86	Langsa	71	Langsa	70
3	Lhokseumawe	69	Lhokseumawe	85	Lhokseumawe	61	Tarakan	70
4	Pontianak	68	Kab. Mimika	83	Pontianak	61	Kab. Batang Hari	58
5	Palangka Raya	61	Kab. Asmat	83	Jayapura	53	Kab. Dogiyai	57

Sumber: *Dapodikdasmem, 2019 diolah oleh penulis*

Rasio siswa terhadap ruang kelas SD/MI ini diperoleh dari pembagian jumlah siswa dengan jumlah ruang kelas. Dari rumus tersebut, diperoleh rasio siswa terhadap ruang kelas SD/MI yang kemudian diambil 5 daerah dengan rasio siswa terhadap ruang kelas SD/MI tertinggi di Indonesia sebagaimana yang ditunjukkan oleh tabel 10. Pada tabel 10 dapat dilihat bahwa tahun 2015-2017 Kota Tarakan, Kalimantan Utara memiliki rasio siswa terhadap ruang kelas SD/MI tertinggi di Indonesia dengan jumlah tahun 2015 sejumlah 97, tahun 2016 sejumlah 100 dan tahun 2017 sejumlah 82. Lalu tahun 2018 Kota Lhokseumawe, Aceh memiliki rasio siswa terhadap ruang kelas SD/MI tertinggi di Indonesia tahun 2018 sejumlah 76.

Sedangkan, tahun 2015 Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah memiliki rasio siswa terhadap ruang kelas SD/MI tertinggi urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 61. Lalu tahun 2016 Kabupaten Asmat, Papua memiliki rasio siswa terhadap ruang kelas SD/MI tertinggi urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 83. Kemudian tahun 2017 Kota Jayapura, Papua memiliki rasio siswa

terhadap ruang kelas SD/MI tertinggi urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 53. Dan tahun 2018 Kabupaten Dogiyai, Papua memiliki rasio siswa terhadap ruang kelas SD/MI tertinggi urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 57.

Berdasarkan Permendikbud No 17 Tahun 2017 Pasal 26 maka dapat diketahui 5 daerah dengan jumlah rasio tertinggi pada tabel 10 tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi karena jumlah siswa yang terus meningkat sedangkan jumlah ruang kelas yang terus menurun. Selanjutnya, data mengenai 5 daerah dengan rasio siswa terhadap ruang kelas SD/MI terendah di Indonesia pada tahun 2015-2018 dapat dilihat pada tabel 11 tersebut.

**Tabel 11: 5 Kabupaten/Kota dengan jumlah rasio Siswa terhadap ruang kelas SD/MI terendah di Indonesia tahun 2015-2018**

No	2015		2016		2017		2018	
	kab/kota	jml	kab/kota	jml	kab/kota	jml	kab/kota	Jml
1	Kep. Sitaro	5	Lingga	5	Lingga	5	Lingga	6
2	Kep. Talaud	6	Maluku Barat Daya	6	Kep. Talaud	5	Kep. Talaud	6
3	Lingga	6	Kep. Sitaro	6	Pakpak Bharat	7	Pakpak Bharat	7
4	Alor	7	Kep. Talaud	7	Ende	7	Kep. Sangihe	7
5	Ende	7	Minahasa Tenggara	8	Alor	8	Maluku Barat Daya	8

Sumber: *Dapodikdasmen, 2019 diolah oleh penulis*

Rasio siswa terhadap ruang kelas SD/MI ini diperoleh dari pembagian jumlah siswa dengan jumlah ruang kelas. Dari rumus tersebut, diperoleh rasio siswa terhadap ruang kelas SD/MI yang kemudian diambil 5 daerah dengan rasio siswa terhadap ruang kelas SD/MI terendah di Indonesia sebagaimana yang ditunjukkan oleh tabel 11. Pada tabel 11 dapat dilihat bahwa Kabupaten Kepulauan Sitaro,

Sulawesi Utara memiliki rasio siswa terhadap ruang kelas SD/MI terendah di Indonesia dengan jumlah 5. Lalu Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau memiliki rasio siswa terhadap ruang kelas SD/MI terendah di Indonesia dengan jumlah 5 pada tahun 2016-2017 dan sejumlah 6 pada tahun 2018.

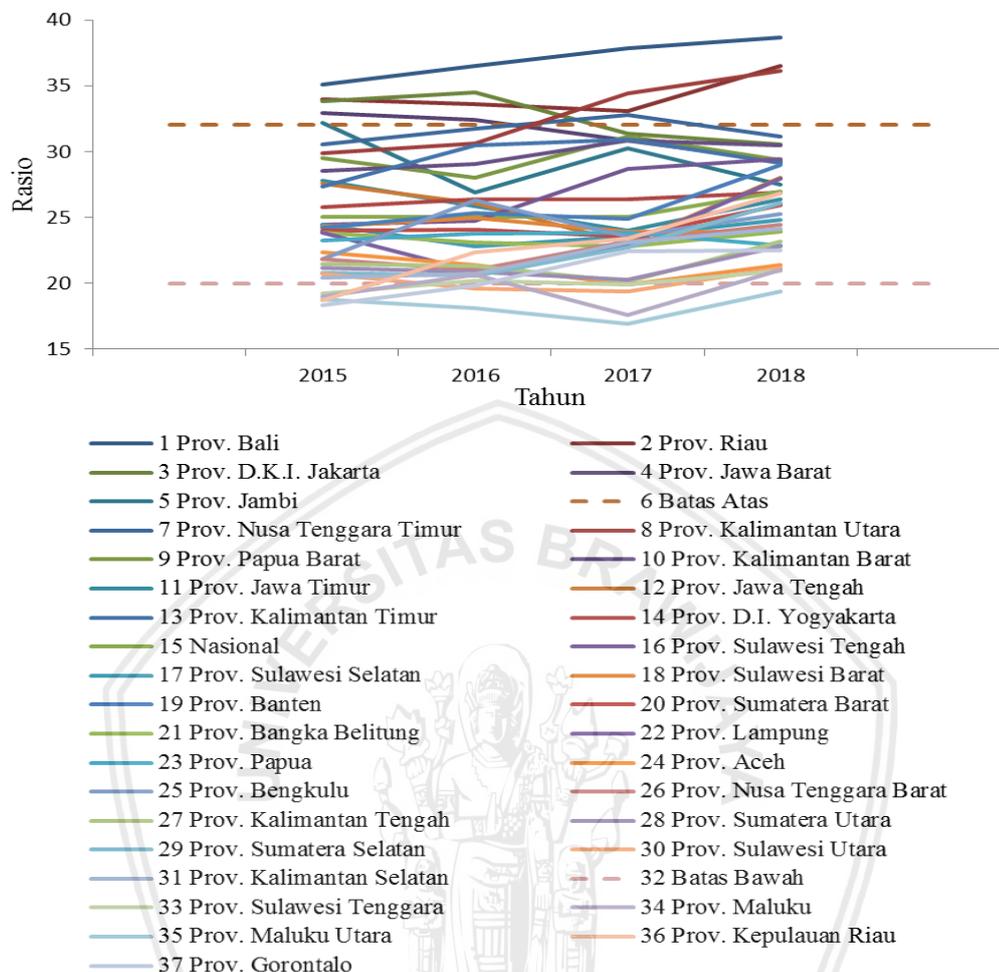
Sedangkan, tahun 2015 Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur memiliki rasio siswa terhadap ruang kelas SD/MI terendah urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 7. Lalu tahun 2016 Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara memiliki rasio siswa terhadap ruang kelas SD/MI terendah urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 8. Kemudian tahun 2017 Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur memiliki rasio siswa terhadap ruang kelas SD/MI terendah urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 8. Dan tahun 2018 Kabupaten Maluku Barat Daya, Maluku memiliki rasio siswa terhadap ruang kelas SD/MI terendah urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 8.

Menyesuaikan dengan Permendikbud No 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pasal 24 bahwa jumlah siswa SD/MI dalam satu kelas paling sedikit 20 siswa dan paling banyak 28 siswa, maka dapat dilihat bahwa masih banyak daerah di Indonesia yang jumlah siswa SD/MI yang masih kurang dalam satu kelas seperti yang ada pada data tabel 11. Hal tersebut terjadi karena jumlah siswa pada daerah tersebut rendah dan jumlah ruang kelas di daerah tersebut juga rendah.

### **1.1.2.2. Ruang kelas SMP/MTs di Indonesia Tahun 2015-2018**

#### **1.1.2.2.1. Rasio siswa terhadap ruang kelas SMP/MTs tahun 2015-2018 berdasarkan provinsi di Indonesia**

Rasio siswa terhadap ruang kelas SMP/MTs ditunjukkan oleh jumlah siswa terhadap jumlah ruang kelas SMP/MTs. Semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar jumlah siswa yang berada di ruang kelas tersebut. Dan sebaliknya, semakin rendah angka rasionya maka semakin sedikit siswa yang berada di ruang kelas tersebut. Berdasarkan Permendikbud No 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pasal 24 yang berisi bahwa satu ruang kelas SMP/MTs paling sedikit memiliki siswa sejumlah 20 dan paling banyak memiliki siswa sejumlah 32. Oleh karena itu, jumlah siswa dalam ruang kelas diatur dalam Permendikbud agar tercipta proses belajar mengajar yang efektif. Berikut adalah data rasio siswa terhadap ruang kelas SMP/MTs tahun 2015-2018 berdasarkan Provinsi di Indonesia.



**Gambar 7: Rasio siswa terhadap ruang kelas SMP/MTs tahun 2015-2018 berdasarkan provinsi di Indonesia**

Sumber: *Dapodikdasmn, 2019 diolah oleh penulis*

Rasio siswa terhadap ruang kelas SMP/MTs ini diperoleh dari pembagian jumlah siswa dengan jumlah ruang kelas. Dari rumus tersebut, diperoleh rasio siswa terhadap ruang kelas yang kemudian ditampilkan seperti pada gambar 7. Pada gambar 7 terdapat beberapa provinsi dengan jumlah rasio yang tidak sesuai dengan Permendikbud No 17 Tahun 2017 Pasal 24. Terdapat lima provinsi dengan jumlah yang melebihi standar, yaitu Provinsi Bali yang disebabkan karena jumlah siswa naik sedangkan jumlah ruang kelas turun. Lalu, Provinsi Riau yang disebabkan karena jumlah siswa yang tinggi dan diikuti jumlah ruang kelas yang

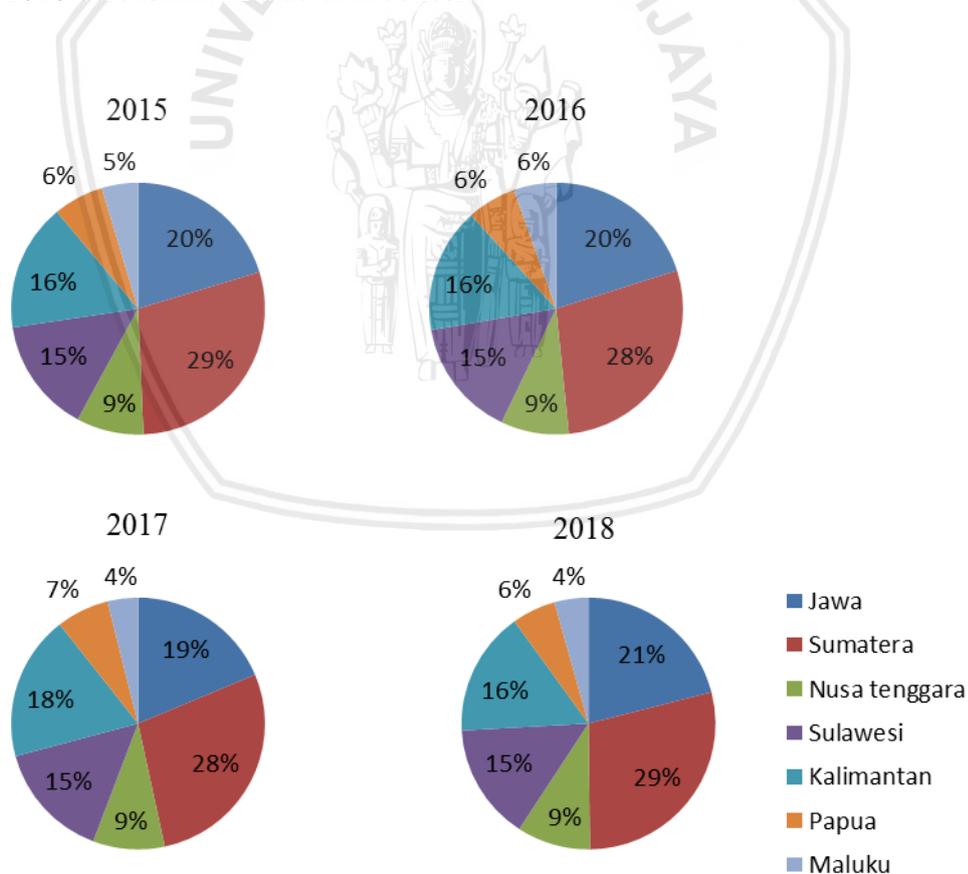
naik. Selanjutnya, Provinsi D.K.I Jakarta yang terjadi karena jumlah siswa menurun dan jumlah ruang kelas juga menurun. Kemudian, Provinsi Jawa Barat dan Jambi yang dikarenakan jumlah siswa terus meningkat lalu jumlah kelas ikut naik.

Selain itu, terdapat lima provinsi dengan jumlah rasio berada dibawah standar Permendikbud No 17 Tahun 2017 Pasal 24, provinsi tersebut adalah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepulauan Riau, Gorontalo dan Maluku yang terjadi dikarenakan jumlah siswa terus naik sedangkan jumlah ruang kelas menurun. Lalu, Provinsi Maluku Utara yang dikarenakan jumlah siswa naik dan jumlah ruang kelas ikut naik namun masih belum bisa mencukupi untuk siswa SMP/MTs daerah tersebut.

Berdasarkan jumlah rasio siswa terhadap ruang kelas SMP/MTs dibagi jumlah provinsi di Indonesia maka peneliti mendapatkan rata-rata nasional rasio siswa terhadap ruang kelas SMP/MTs di Indonesia. Pada tahun 2015-2017 rata-rata nasional rasio siswa terhadap ruang kelas SMP/MTs sejumlah 25 dan tahun 2018 sejumlah 27. Maka hasil dari rata-rata nasional rasio siswa terhadap ruang kelas SMP/MTs di Indonesia menunjukkan jumlah siswa SMP/MTs pada ruang kelas di Indonesia tahun 2015-2018 dapat dikatakan relatif efektif.

### 1.1.2.2.2. Proporsi Rasio Siswa terhadap ruang kelas SMP/MTs Tahun 2015-2018 berdasarkan Pulau di Indonesia

Rasio siswa terhadap ruang kelas SMP/MTs ditunjukkan oleh jumlah siswa terhadap jumlah ruang kelas SMP/MTs. Angka rasio siswa terhadap ruang kelas SMP/MTs menunjukkan proporsi rasio siswa terhadap ruang kelas SMP/MTs di pulau tersebut. Semakin tingginya proporsi maka semakin besar pengadaan ruang kelas SMP/MTs pada pulau tersebut. Dan sebaliknya, semakin rendah proporsi maka semakin kecil pengadaan ruang kelas SMP/MTs pada pulau tersebut. Berikut adalah data proporsi rasio siswa terhadap ruang kelas SMP/MTs tahun 2015-2018 berdasarkan Pulau di Indonesia.



**Gambar 8: Rasio Siswa terhadap ruang kelas SMP/MTs Tahun 2015-2018 berdasarkan Pulau di Indonesia**

Sumber: *Dapodikdasmn, 2019 diolah oleh penulis*

Rasio siswa terhadap ruang kelas SMP/MTs ini diperoleh dari pembagian jumlah siswa dengan jumlah ruang kelas. Dari rumus tersebut, diperoleh proporsi rasio siswa terhadap ruang kelas yang kemudian ditampilkan seperti pada gambar 8. Pada gambar 8 dapat diketahui Pulau Sumatera memiliki rasio siswa terhadap ruang kelas SMP/MTs di Indonesia yang paling tinggi sejumlah 29% pada tahun 2015, lalu sejumlah 28% pada tahun 2016-2017 dan sejumlah 29% pada tahun 2018. Sedangkan Pulau Maluku memiliki rasio siswa terhadap ruang kelas SMP/MTs di Indonesia yang paling rendah sejumlah 5% pada tahun 2015, 6% pada tahun 2016 dan 4% pada tahun 2017-2018.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menemukan ketimpangan antara Pulau Maluku dengan pulau-pulau lain yang ada di Indonesia. Pulau Maluku sebagai pulau yang memiliki rasio siswa terhadap ruang kelas SMP/MTs terendah ini memerlukan perhatian khusus agar bisa berkembang seperti pulau-pulau lainnya yang ada di Indonesia.

#### **1.1.2.2.3. 5 Kabupaten/Kota dengan rasio siswa terhadap ruang kelas SMP/MTs tertinggi dan terendah di Indonesia tahun 2015-2018**

Rasio siswa terhadap ruang kelas SMP/MTs ditunjukkan oleh jumlah siswa terhadap jumlah ruang kelas SMP/MTs. Semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar jumlah siswa yang berada di ruang kelas tersebut. Dan sebaliknya, semakin rendah angka rasionya maka semakin sedikit siswa yang berada di ruang kelas tersebut. Berdasarkan Permendikbud No 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pasal 24 yang berisi bahwa satu kelas SMP/MTs paling sedikit memiliki siswa sejumlah 20 dan paling banyak memiliki siswa sejumlah 32. Oleh

karena itu, jumlah siswa dalam ruang kelas diatur dalam Permendikbud agar tercipta proses belajar mengajar yang efektif. Berikut adalah data rasio siswa terhadap ruang kelas SMP/MTs tertinggi di Indonesia tahun 2015-2018.

**Tabel 12: 5 Kabupaten/Kota dengan rasio siswa terhadap ruang kelas SMP/MTs tertinggi di Indonesia tahun 2015-2018**

No	2015		2016		2017		2018	
	kab/kota	Jml	kab/kota	jml	kab/kota	jml	kab/kota	Jml
1	Baubau	88	Langsa	79	Tarakan	80	Pontianak	67
2	Kupang	84	Pekanbaru	78	Kab. Sambas	77	Bandar Lampung	62
3	Langsa	70	Kab. Maros	76	Langsa	76	Sorong	60
4	Sorong	67	Lhokseumawe	75	Bontang	74	Baubau	59
5	Tarakan	66	Kab. Penajam Paser Utara	74	Sorong	72	Mataram	58

Sumber: *Dapodikdasmn, 2019 diolah oleh penulis*

Rasio siswa terhadap ruang kelas SMP/MTs ini diperoleh dari pembagian jumlah siswa dengan jumlah ruang kelas. Dari rumus tersebut, diperoleh rasio siswa terhadap ruang kelas SMP/MTs yang kemudian diambil 5 daerah dengan rasio siswa terhadap ruang kelas SMP/MTs tertinggi di Indonesia sebagaimana yang ditunjukkan oleh tabel 12. Pada tabel 12 diketahui bahwa lima daerah tersebut jumlah rasionya melebihi standar ketentuan Permendikbud No 17 Tahun 2017 Pasal 34. Hal tersebut dikarenakan jumlah ruang kelas yang kurang di daerah tersebut sedangkan jumlah siswa SMP/MTs tiap tahunnya meningkat.

Selanjutnya, data mengenai 5 daerah dengan rasio siswa terhadap ruang kelas SMP/MTs terendah di Indonesia pada tahun 2015-2018 dapat dilihat pada tabel 13 tersebut.

**Tabel 13: 5 Kabupaten/Kota dengan jumlah rasio siswa terhadap ruang kelas SMP/MTs terendah di Indonesia tahun 2015-2018**

no	2015		2016		2017		2018	
	kab/kota	jml	kab/kota	Jml	kab/kota	Jml	kab/kota	Jml
1	Sinjai	2	Lingga	4	Lingga	5	Alor	6
2	Sidenreng Rappang	3	Wajo	7	Ende	6	Lingga	7
3	Lingga	5	Maluku Barat Daya	7	Alor	6	Penukal Abab Lematang Ilir	9
4	Ende	6	Ende	7	Ketapang	6	Ende	9
5	Alor	6	Bolaang Mongondow Utara	8	Mandailing Natal	6	Bantaeng	9

Sumber: *Dapodikdasmn, 2019 diolah oleh penulis*

Rasio siswa terhadap ruang kelas SMP/MTs ini diperoleh dari pembagian jumlah siswa dengan jumlah ruang kelas. Dari rumus tersebut, diperoleh rasio siswa terhadap ruang kelas SMP/MTs yang kemudian diambil 5 daerah dengan rasio siswa terhadap ruang kelas SMP/MTs terendah di Indonesia sebagaimana yang ditunjukkan oleh tabel 13. Pada tabel 13 dapat dilihat bahwa lima daerah tersebut jumlah rasionya dibawah standar ketentuan Permendikbud No 17 Tahun 2017 Pasal 24. Hal tersebut dikarenakan jumlah ruang kelas yang menurun dan jumlah siswa SMP/MTs di daerah tersebut juga menurun tiap tahunnya.

### 1.1.3. Perpustakaan SD/MI dan SMP/MTs di Indonesia tahun 2015-2018

Perpustakaan adalah ruang tempat siswa dan guru memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka dengan membaca, mengamati, mendengar dan sekaligus tempat petugas mengelola perpustakaan. Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti menunjukkan jumlah perpustakaan pada SD/MI dan SMP/MTs di Indonesia sudah mengalami peningkatan namun masih terjadi ketimpangan karena penyebaran yang belum merata di seluruh Indonesia. Berikut adalah hasil

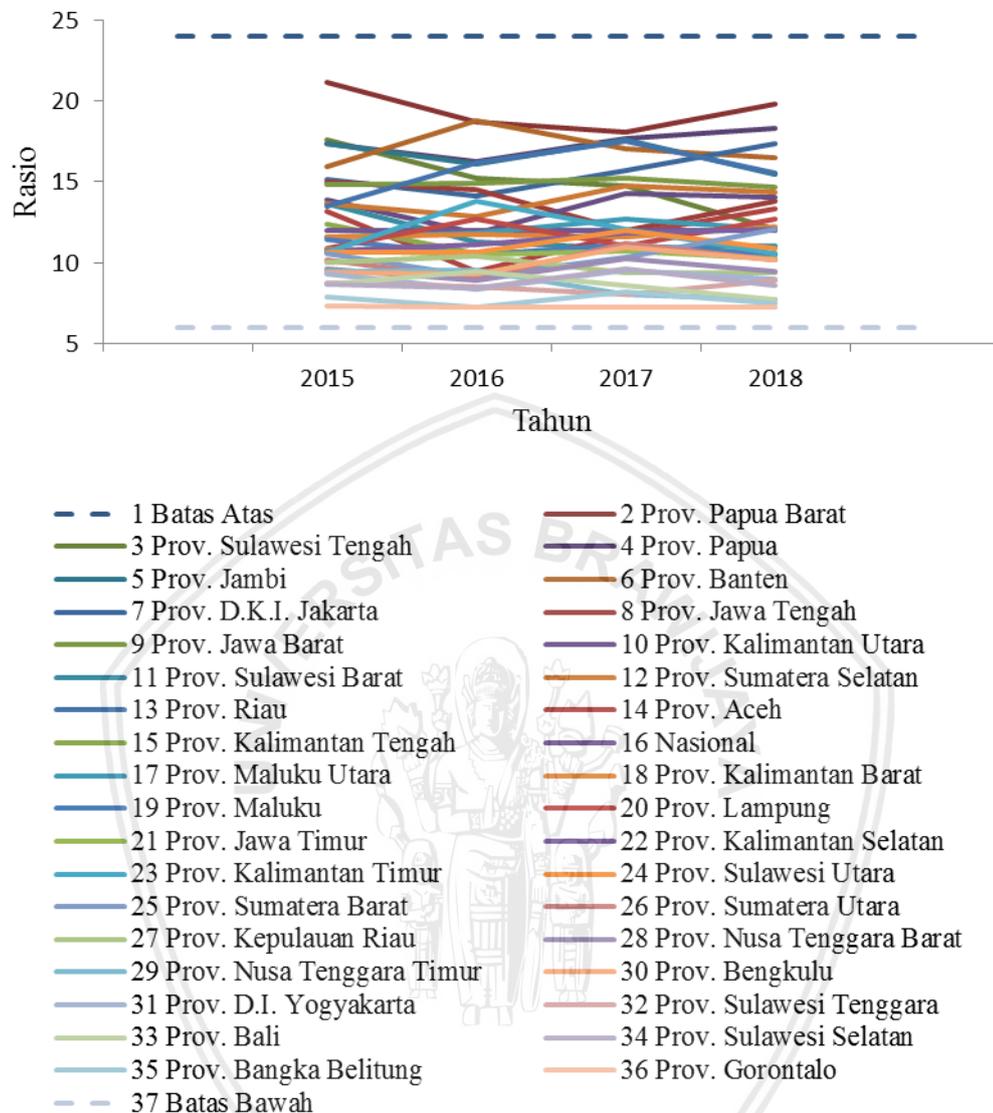
penelitian pembangunan perpustakaan pada SD/MI dan SMP/MTs di Indonesia tahun 2015-2018.

### **1.1.3.1. Perpustakaan pada SD/MI di Indonesia tahun 2015-2018**

#### **1.1.3.1.1. Rasio Rombongan belajar terhadap perpustakaan SD/MI Tahun 2015-2018 berdasarkan Provinsi di Indonesia**

Rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SD/MI ditunjukkan oleh jumlah rombongan belajar (rombel) terhadap jumlah perpustakaan SD/MI. Semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar jumlah rombel yang menggunakan perpustakaan tersebut. Dan sebaliknya, semakin rendah angka rasionya maka semakin kecil jumlah rombel yang menggunakan perpustakaan tersebut. Oleh karena itu, semakin kecil rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan, maka semakin efektif pengadaan perpustakaan pada Provinsi tersebut.

Berdasarkan Permendikbud No 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pasal 26 yang berisi bahwa satu sekolah SD/MI paling sedikit memiliki jumlah rombongan belajar sejumlah 6 dan paling banyak sejumlah 24 rombongan belajar. Berikut adalah data rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SD/MI tahun 2015-2018 berdasarkan provinsi di Indonesia.



**Gambar 9 : Rasio Rombongan belajar terhadap perpustakaan SD/MI Tahun 2015-2018 berdasarkan Provinsi di Indonesia**

Sumber: *Dapodikdasmn, 2019 diolah oleh penulis*

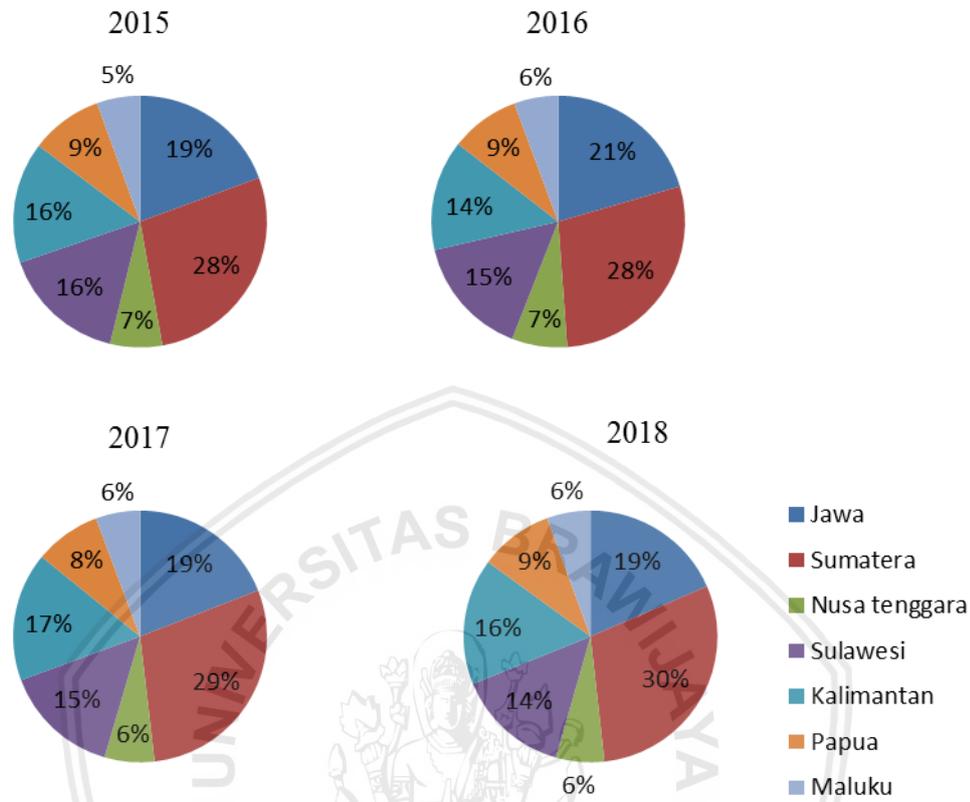
Rasio rombongan belajar (rombel) terhadap perpustakaan SD/MI ini diperoleh dari pembagian jumlah rombel dengan perpustakaan. Dari rumus tersebut, diperoleh rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan yang kemudian ditampilkan seperti pada gambar 9. Pada gambar 9 dapat dilihat bahwa Provinsi Papua Barat memiliki rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SD/MI di Indonesia yang paling tinggi sejumlah 21 pada tahun 2015, 19 pada tahun 2016,

18 pada tahun 2017 dan 20 pada tahun 2018. Sedangkan, Provinsi Gorontalo memiliki rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SD/MI di Indonesia yang paling rendah sejumlah 7 pada tahun 2015-2018.

Berdasarkan jumlah rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SD/MI dibagi jumlah provinsi di Indonesia maka peneliti mendapatkan rata-rata nasional rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SD/MI di Indonesia tahun 2015-2018 sejumlah 12 pada setiap tahunnya. Maka hasil dari rata-rata nasional rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SD/MI di Indonesia menunjukkan jumlah perpustakaan pada SD/MI di Indonesia tahun 2015-2018 dapat dikatakan efektif.

#### **1.1.3.1.2. Proporsi rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SD/MI tahun 2015-2018 berdasarkan pulau di Indonesia**

Rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SD/MI ditunjukkan oleh jumlah rombongan belajar terhadap jumlah perpustakaan SD/MI. Angka rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SD/MI menunjukkan proporsi rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SD/MI di pulau tersebut. Semakin tingginya proporsi maka semakin besar pengadaan perpustakaan di SD/MI pada pulau tersebut. Dan sebaliknya, semakin rendah proporsi maka semakin kecil pengadaan perpustakaan di SD/MI pada pulau tersebut. Berikut adalah data proporsi rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SD/MI tahun 2015-2018 berdasarkan Pulau di Indonesia.



**Gambar 10: Rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SD/MI tahun 2015-2018 berdasarkan pulau di Indonesia**

Sumber: *Dapodikdasmn, 2019 diolah oleh penulis*

Rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SD/MI ini diperoleh dari pembagian jumlah rombel dengan jumlah perpustakaan. Dari rumus tersebut, diperoleh proporsi rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan yang kemudian ditampilkan seperti pada gambar 10. Pada gambar 10 dapat dilihat Pulau Sumatera memiliki rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SD/MI di Indonesia yang paling tinggi sejumlah 28% pada tahun 2015-2016, sejumlah 29% pada tahun 2017 dan sejumlah 30% pada tahun 2018. Sedangkan Pulau Maluku memiliki rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SD/MI di Indonesia yang paling rendah sejumlah 5% pada tahun 2015, dan 6% pada tahun 2016-2018.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menemukan ketimpangan antara Pulau Maluku dengan pulau-pulau lain yang ada di Indonesia. Pulau Maluku sebagai pulau yang memiliki rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SD/MI terendah memerlukan perhatian khusus agar bisa berkembang seperti pulau-pulau lainnya yang ada di Indonesia.

#### 1.1.3.1.3. 5 Kabupaten/Kota dengan jumlah rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SD/MI tertinggi dan terendah di Indonesia tahun 2015-2018

Rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SD/MI ditunjukkan oleh jumlah rombel terhadap jumlah perpustakaan SD/MI. Semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar jumlah rombel yang menggunakan perpustakaan tersebut. Dan sebaliknya, semakin rendah angka rasionya maka semakin sedikit rombel yang menggunakan perpustakaan tersebut. Oleh karena itu, semakin kecil rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SD/MI, maka semakin efektif pengadaan perpustakaan di SD/MI pada daerah tersebut. Berikut adalah data rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SD/MI tertinggi di Indonesia tahun 2015-2018.

**Tabel 14: 5 Kabupaten/Kota dengan rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SD/MI tertinggi di Indonesia tahun 2015-2018**

no	2015		2016		2017		2018	
	kab/kota	Jml	kab/kota	Jml	kab/kota	jml	kab/kota	Jml
1	Teluk Wondama	62	Teluk Wondama	54	Teluk Wondama	41	Teluk Wondama	40
2	Manokwari Selatan	59	Manokwari Selatan	39	Manokwari Selatan	35	Manokwari Selatan	35
3	Tambrau	46	Tambrau	32	Nduga	29	Puncak Jaya	34
4	Waropen	42	Kota Baubau	29	Nunukan	26	Nduga	29
5	Puncak Jaya	36	Nduga	28	Morowali	26	Maybrat	25

Sumber: *Dapodikdasmn, 2019 diolah oleh penulis*

Rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SD/MI ini diperoleh dari pembagian jumlah rombel dengan jumlah perpustakaan. Dari rumus tersebut, diperoleh rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SD/MI yang kemudian diambil 5 daerah dengan rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SD/MI tertinggi di Indonesia sebagaimana yang ditunjukkan oleh tabel 14. Pada tabel 14 dapat dilihat bahwa data daerah dengan jumlah rasio rombel terhadap perpustakaan tertinggi memiliki arti bahwa tidak efektifnya pengadaan perpustakaan pada daerah tersebut, karena terlalu banyak rombel yang menggunakan perpustakaan tersebut. Maka diperlukan pembangunan perpustakaan SD/MI pada daerah tersebut.

Selanjutnya, data mengenai 5 daerah dengan rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SD/MI terendah di Indonesia pada tahun 2015-2018 dapat dilihat pada tabel 15 tersebut.

**Tabel 15: 5 Kabupaten/Kota dengan jumlah rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SD/MI terendah di Indonesia tahun 2015-2018**

No	2015		2016		2017		2018	
	kab/kota	Jml	kab/kota	jml	kab/kota	Jml	kab/kota	Jml
1	Boalemo	5	Boalemo	5	Boalemo	5	Lingga	5
2	Kota Padang Panjang	5	Kutai Barat	5	Lingga	5	Kota Padang Panjang	5
3	Wakatobi	6	Seruyan	5	Wakatobi	5	Bangli	6
4	Gorontalo Utara	6	Buton	5	Alor	5	Ende	6
5	Lingga	6	Kolaka Timur	5	Pakpak Bharat	5	Bintan	6

Sumber: *Dapodikdasmn, 2019 diolah oleh penulis*

Rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SD/MI ini diperoleh dari pembagian jumlah rombel dengan jumlah perpustakaan. Dari rumus tersebut, diperoleh rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SD/MI yang kemudian diambil lima daerah dengan rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SD/MI terendah di Indonesia sebagaimana yang ditunjukkan oleh tabel 15. Pada tabel 15 dapat dilihat bahwa Kabupaten Boalemo, Gorontalo memiliki rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SD/MI terendah di Indonesia dengan jumlah 5 pada tahun 2015-2017 dan Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau memiliki rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SD/MI terendah di Indonesia tahun 2018 sejumlah 5.

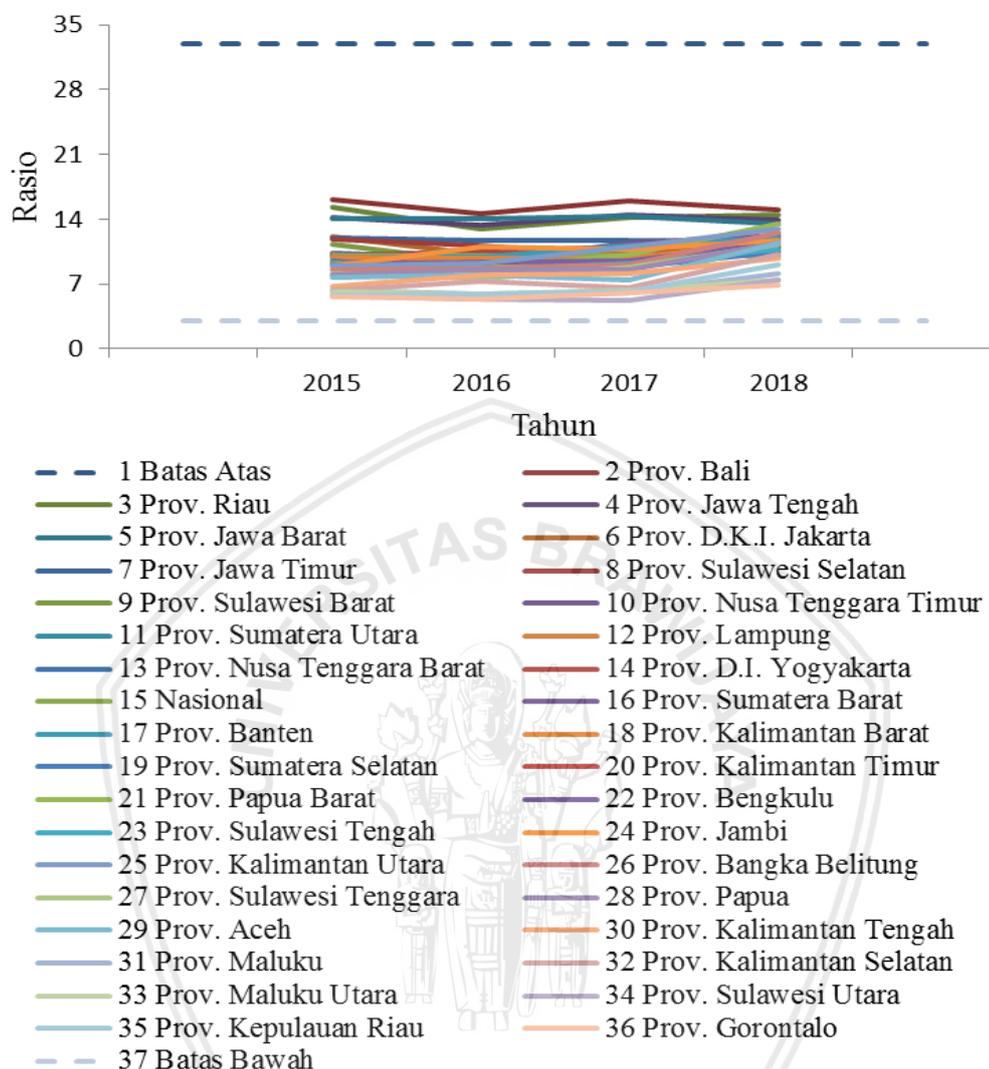
Sedangkan, tahun 2015 Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau memiliki rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SD/MI terendah urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 6. Lalu tahun 2016 Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara memiliki rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SD/MI terendah urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 5. Kemudian tahun 2017 Kabupaten Pakpak Bharat, Sumatera Utara memiliki rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SD/MI terendah urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 5. Selain itu, tahun 2018 Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau memiliki rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SD/MI terendah urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 6.

### **1.1.3.2. Perpustakaan pada SMP/MTs di Indonesia tahun 2015-2018**

#### **1.1.3.2.1. Rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SMP/MTs tahun 2015-2018 berdasarkan provinsi di Indonesia**

Rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SMP/MTs ditunjukkan oleh jumlah rombel terhadap jumlah perpustakaan SMP/MTs. Semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar jumlah rombel yang menggunakan perpustakaan tersebut. Dan sebaliknya, semakin rendah angka rasionya maka semakin sedikit rombel yang menggunakan perpustakaan tersebut. Oleh karena itu, semakin kecil rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan maka semakin efektif pengadaan perpustakaan pada provinsi tersebut.

Berdasarkan Permendikbud No 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pasal 26 yang berisi bahwa satu sekolah SMP/MTs paling sedikit memiliki jumlah rombongan belajar sejumlah 3 dan paling banyak sejumlah 33 rombongan belajar. Berikut adalah data rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SMP/MTs tahun 2015-2018 berdasarkan Provinsi di Indonesia.



**Gambar 11: Rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SMP/MTs tahun 2015-2018 berdasarkan provinsi di Indonesia**

Sumber: *Dapodikdasmen, 2019 diolah oleh penulis*

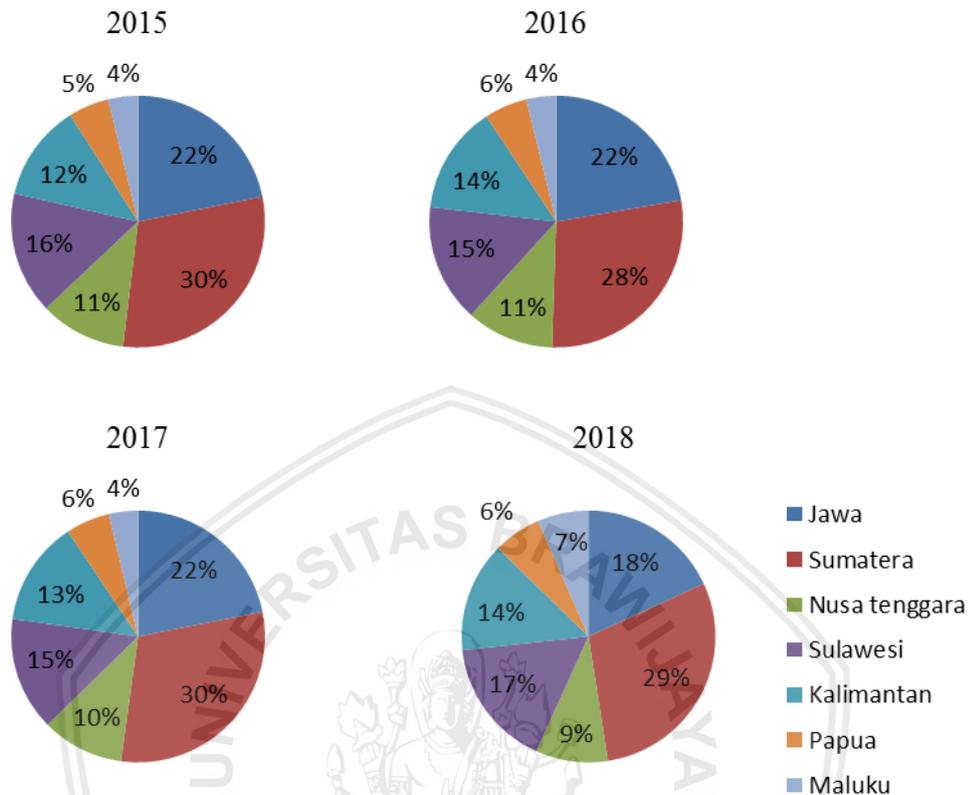
Rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SMP/MTs ini diperoleh dari pembagian jumlah rombongan belajar dengan perpustakaan. Dari rumus tersebut, diperoleh rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan yang kemudian ditampilkan seperti pada gambar 11. Pada gambar 11 dapat dilihat bahwa Provinsi Bali memiliki rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SMP/MTs di Indonesia yang paling tinggi sejumlah 16 pada tahun 2015, 15 pada tahun 2016, 16 pada

tahun 2017 dan 15 pada tahun 2018. Sedangkan, Provinsi Gorontalo memiliki rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SMP/MTs di Indonesia yang paling rendah sejumlah 6 pada tahun 2015, 5 pada tahun 2016, 6 pada tahun 2017 dan 7 pada tahun 2018.

Berdasarkan jumlah rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SMP/MTs dibagi jumlah provinsi di Indonesia maka peneliti mendapatkan rata-rata nasional rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SMP/MTs di Indonesia. Pada tahun 2015-2018 rata-rata nasional rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SMP/MTs sejumlah 10 pada tiap tahunnya. Maka hasil dari rata-rata nasional rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SMP/MTs di Indonesia menunjukkan jumlah perpustakaan pada SMP/MTs di Indonesia tahun 2015-2018 dapat dikatakan efektif.

#### **1.1.3.2.2. Proporsi rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SMP/MTs tahun 2015-2018 berdasarkan pulau di Indonesia**

Rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SMP/MTs ditunjukkan oleh jumlah rombel terhadap jumlah perpustakaan SMP/MTs. Angka rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SMP/MTs menunjukkan proporsi rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SMP/MTs di pulau tersebut. Semakin tingginya proporsi maka semakin besar pembangunan perpustakaan SMP/MTs pada pulau tersebut. Dan sebaliknya, semakin rendah proporsi maka semakin kecil pembangunan perpustakaan SMP/MTs pada pulau tersebut. Berikut adalah data proporsi rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SMP/MTs tahun 2015-2018 berdasarkan Pulau di Indonesia.



**Gambar 12: Rasio Rombongan belajar terhadap perpustakaan SMP/MTs Tahun 2015-2018 berdasarkan Pulau di Indonesia**

Sumber: *Dapodikdasmem, 2019 diolah oleh penulis*

Rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SMP/MTs ini diperoleh dari pembagian jumlah rombel dengan jumlah perpustakaan. Dari rumus tersebut, diperoleh proporsi rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan yang kemudian ditampilkan seperti pada gambar 12. Pada gambar 12 dapat dilihat Pulau Sumatera memiliki rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SMP/MTs di Indonesia yang paling tinggi sejumlah 30% pada tahun 2015, 28% pada tahun 2016, 30% pada tahun 2017 dan sejumlah 29% pada tahun 2018. Sedangkan Pulau Maluku memiliki rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SMP/MTs di Indonesia yang paling rendah sejumlah 4% pada tahun 2015-2017 dan 7% pada tahun 2018..

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menemukan ketimpangan antara Pulau Maluku dengan pulau-pulau lain yang ada di Indonesia. Pulau Maluku sebagai pulau yang memiliki rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SMP/MTs terendah ini memerlukan perhatian khusus agar bisa berkembang seperti pulau-pulau lainnya yang ada di Indonesia.

#### 1.1.3.3.3. 5 Kabupaten/Kota dengan rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SMP/MTs tertinggi dan terendah di Indonesia tahun 2015-2018

Rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SMP/MTs ditunjukkan oleh jumlah rombel terhadap jumlah perpustakaan SMP/MTs. Semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar jumlah rombel yang menggunakan perpustakaan tersebut. Dan sebaliknya, semakin rendah angka rasionya maka semakin sedikit rombel yang menggunakan perpustakaan tersebut. Oleh karena itu, semakin kecil rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan maka semakin efektif pengadaan perpustakaan pada daerah tersebut. Berikut adalah data rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SMP/MTs tertinggi di Indonesia tahun 2015-2018.

**Tabel 16: 5 Kabupaten/Kota dengan rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SMP/MTs tertinggi di Indonesia tahun 2015-2018**

No	2015		2016		2017		2018	
	kab/kota	jml	kab/kota	Jml	kab/kota	Jml	kab/kota	Jml
1	Kota Tarakan	24	Kota Tarakan	24	Kota Tarakan	24	Kota Tarakan	23
2	Ngada	24	Manggarai Barat	24	Manggarai	24	Kota Sorong	22
3	Manggarai	23	Kota Jayapura	24	Kota Binjai	24	Puncak Jaya	22
4	Kota Binjai	23	Kota Palu	24	Ngada	21	Bangka Tengah	21
5	Takalar	22	Bima	23	Kota Solok	21	Maluku Tengah	21

Sumber: *Dapodikdasmen, 2019 diolah oleh penulis*

Rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SMP/MTs ini diperoleh dari pembagian jumlah rombel dengan jumlah perpustakaan. Dari rumus tersebut, diperoleh rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SMP/MTs yang kemudian diambil 5 daerah dengan rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SMP/MTs tertinggi di Indonesia sebagaimana yang ditunjukkan oleh tabel 16. Pada tabel 16 dapat dilihat bahwa tahun 2015-2018 Kota Tarakan, Kalimantan Utara memiliki rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SMP/MTs tertinggi di Indonesia dengan jumlah tahun 2015-2017 sejumlah 24 dan tahun 2018 sejumlah 23.

Sedangkan, tahun 2015 Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan memiliki rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SMP/MTs tertinggi urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 22. Lalu tahun 2016 Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat memiliki rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SMP/MTs tertinggi urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 23. Kemudian tahun 2017 Kota Solok, Sumatera Barat memiliki rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SMP/MTs tertinggi urutan kelima di Indonesia sejumlah 21. Dan tahun 2018 Kabupaten Maluku Tengah, Maluku memiliki rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SMP/MTs tertinggi urutan kelima di Indonesia sejumlah 21.

Selanjutnya, data mengenai 5 daerah dengan rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SMP/MTs terendah di Indonesia pada tahun 2015-2018 dapat dilihat pada tabel 17 tersebut.

**Tabel 17: 5 Kabupaten/Kota dengan jumlah rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SMP/MTs terendah di Indonesia tahun 2015-2018**

no	2015		2016		2017		2018	
	kab/kota	jml	kab/kota	jml	kab/kota	Jml	kab/kota	Jml
1	Lingga	2	Kepulauan Sitaro	2	Kepulauan Sitaro	3	Lingga	5
2	Maluku Barat Daya	2	Membramo Tengah	3	Lingga	3	Intan Jaya	6
3	Intan Jaya	3	Intan Jaya	3	Maluku Barat Daya	3	Maluku Barat Daya	6
4	Kepulauan Sitaro	3	Maluku Barat Daya	3	Bolaang Mongondow Utara	3	Barito Utara	7
5	Hulu Sungai Utara	3	Lingga	3	Bintan	3	Kapuas Hulu	8

Sumber: *Dapodikdasmn, 2019 diolah oleh penulis*

Rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SMP/MTs ini diperoleh dari pembagian jumlah rombel dengan jumlah perpustakaan. Dari rumus tersebut, diperoleh rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SMP/MTs yang kemudian diambil 5 daerah dengan rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SMP/MTs terendah di Indonesia sebagaimana yang ditunjukkan oleh tabel 17. Pada tabel 17 dapat dilihat bahwa Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau memiliki rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SMP/MTs terendah di Indonesia tahun 2015 dengan jumlah 2. Lalu pada tahun 2016-2017 Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara memiliki rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SMP/MTs terendah di Indonesia dengan jumlah 2 pada tahun 2016 dan 3 pada tahun 2017. Kemudian tahun 2018 Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau memiliki rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SMP/MTs terendah di Indonesia sejumlah 5.

Sedangkan, tahun 2015 Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan memiliki rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SMP/MTs terendah urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 3. Lalu tahun 2016 Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau memiliki rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SMP/MTs terendah urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 3. Kemudian tahun 2017 Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau memiliki rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SMP/MTs terendah urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 3. Selain itu, tahun 2018 Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat memiliki rasio rombongan belajar terhadap perpustakaan SMP/MTs terendah urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 8.

#### **1.1.4. Laboratorium SD/MI dan SMP/MTs di Indonesia Tahun 2015-2018**

Laboratorium adalah tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran IPA/Sains yang memerlukan peralatan khusus. Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti menunjukkan jumlah laboratorium pada SD/MI dan SMP/MTs di Indonesia telah mengalami peningkatan namun belum merata penyebarannya. Berikut adalah hasil penelitian pembangunan laboratorium pada SD/MI dan SMP/MTs di Indonesia tahun 2015-2018.

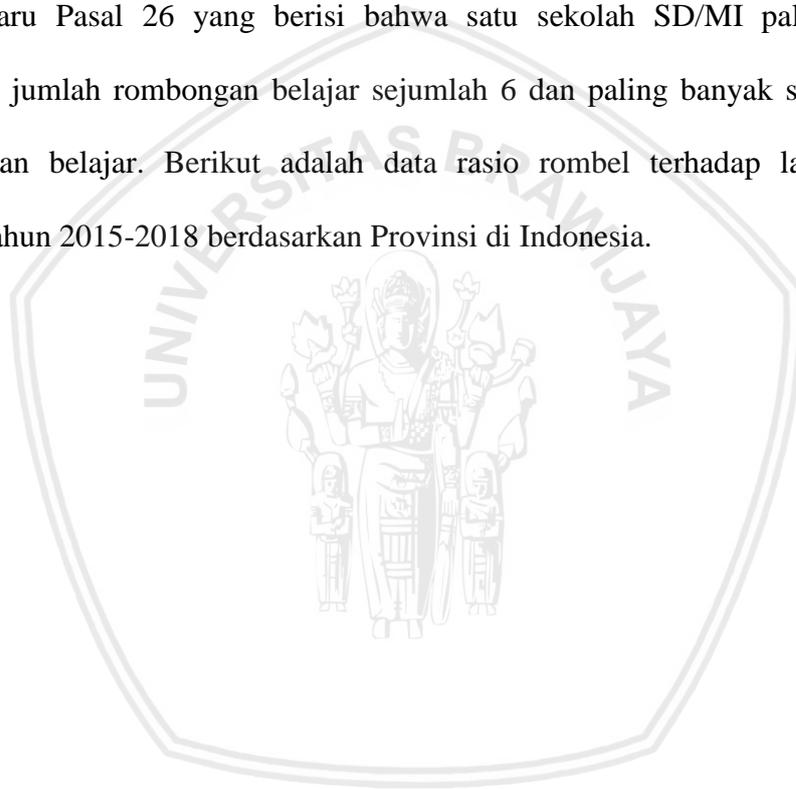
##### **1.1.4.1. Laboratorium pada SD/MI di Indonesia tahun 2015-2018**

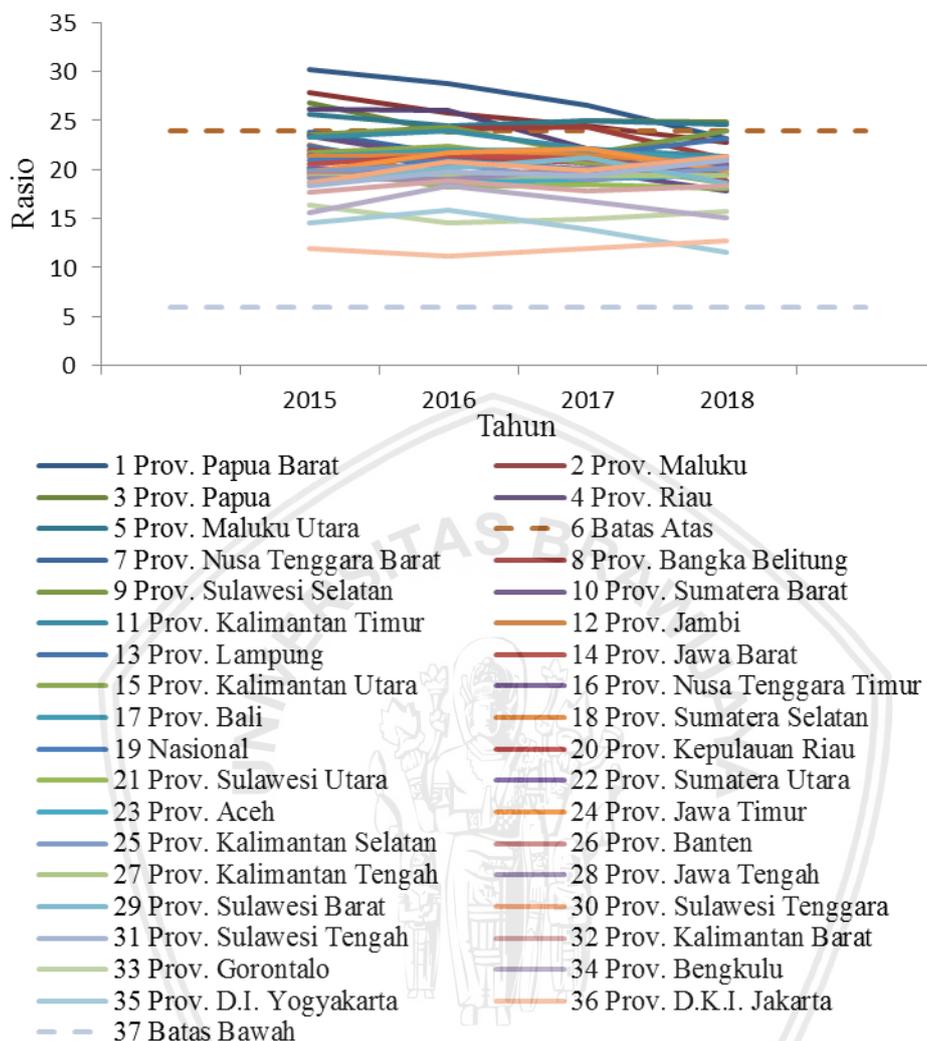
###### **1.1.4.1.1. Rasio Rombongan belajar terhadap laboratorium SD/MI tahun 2015-2018 berdasarkan Provinsi di Indonesia**

Rasio rombongan belajar (rombel) terhadap laboratorium SD/MI ditunjukkan oleh jumlah rombel terhadap jumlah laboratorium SD/MI. Semakin tinggi angka rasionya, maka semakin besar jumlah rombel yang menggunakan laboratorium

tersebut. Dan sebaliknya, semakin rendah angka rasionya maka semakin sedikit rombongan yang menggunakan laboratorium tersebut. Oleh karena itu, semakin kecil rasio rombongan terhadap laboratorium, maka semakin efektif pengadaan laboratorium pada provinsi tersebut.

Berdasarkan Permendikbud No 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pasal 26 yang berisi bahwa satu sekolah SD/MI paling sedikit memiliki jumlah rombongan belajar sejumlah 6 dan paling banyak sejumlah 24 rombongan belajar. Berikut adalah data rasio rombongan belajar terhadap laboratorium SD/MI tahun 2015-2018 berdasarkan Provinsi di Indonesia.





**Gambar 13: Rasio rombongan belajar terhadap laboratorium SD/MI tahun 2015-2018 berdasarkan provinsi di Indonesia**

Sumber: *Dapodikdasmn, 2019 diolah oleh penulis*

Rasio rombong belajar terhadap laboratorium SD/MI ini diperoleh dari pembagian jumlah rombongan belajar dengan jumlah laboratorium SD/MI di Indonesia tahun 2015-2018. Dari rumus tersebut, diperoleh rasio rombongan belajar terhadap laboratorium SD/MI di Indonesia tahun 2015-2018 yang kemudian ditampilkan seperti pada gambar 13. Pada gambar 13 dapat diketahui bahwa masih terdapat daerah dengan jumlah

rasio rombel terhadap laboratorium yang jumlahnya diatas standar Permendikbud No 17 Tahun 2017 Pasal 26.

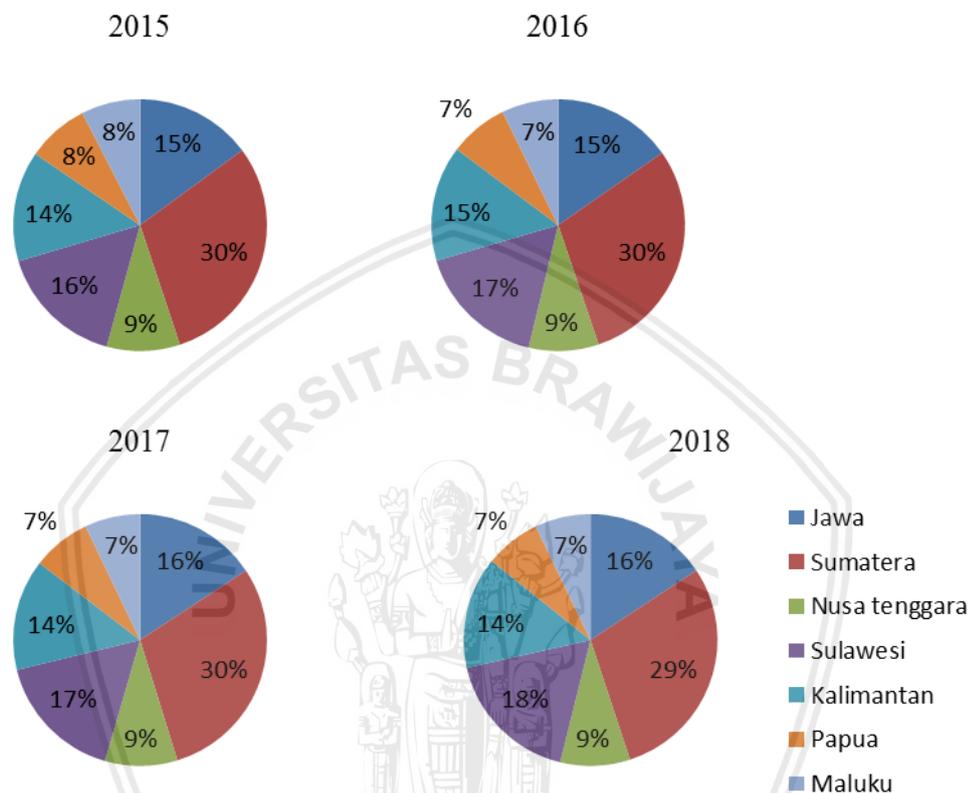
Daerah tersebut adalah Provinsi Papua Barat, Maluku, Papua, Riau dan Maluku Utara. Hal ini terjadi karena jumlah pembangunan laboratorium pada daerah tersebut masih rendah sedangkan jumlah rombongan belajar tinggi. Namun pada tahun 2018 daerah tersebut sudah mulai mengalami peningkatan jumlah laboratorium sehingga jumlah rasio rombel terhadap laboratorium terus menurun.

Berdasarkan jumlah rasio rombel terhadap laboratorium SD/MI dibagi jumlah provinsi di Indonesia maka peneliti mendapatkan rata-rata nasional rasio rombel terhadap laboratorium SD/MI di Indonesia. Pada tahun 2015-2016 rata-rata nasional rasio rombel terhadap laboratorium SD/MI sejumlah 21, dan pada tahun 2017-2018 rata-rata nasional rasio rombel terhadap laboratorium SD/MI sejumlah 20. Maka hasil dari rata-rata nasional rasio rombel terhadap laboratorium SD/MI di Indonesia menunjukkan jumlah laboratorium pada sekolah SD/MI di Indonesia tahun 2015-2018 dapat dikatakan efektif.

#### **1.1.4.1.2. Proporsi rasio rombongan belajar terhadap laboratorium SD/MI tahun 2015-2018 berdasarkan pulau di Indonesia**

Rasio rombel terhadap laboratorium SD/MI ditunjukkan oleh jumlah rombel terhadap jumlah laboratorium SD/MI. Angka rasio rombel terhadap laboratorium SD/MI menunjukkan proporsi rasio rombel terhadap laboratorium SD/MI di pulau tersebut. Semakin tingginya proporsi maka semakin besar pengadaan laboratorium pada pulau tersebut. Dan sebaliknya, semakin rendah proporsi maka semakin kecil pengadaan laboratorium pada pulau tersebut. Berikut adalah data

proporsi rasio rombongan belajar terhadap laboratorium SD/MI tahun 2015-2018 berdasarkan Pulau di Indonesia



**Gambar 14: Rasio rombongan belajar terhadap laboratorium SD/MI tahun 2015-2018 berdasarkan pulau di Indonesia**

Sumber: *Dapodikdasmen, 2019 diolah oleh penulis*

Rasio rombongan belajar terhadap laboratorium SD/MI ini diperoleh dari pembagian jumlah rombongan belajar dengan jumlah laboratorium. Dari rumus tersebut, diperoleh proporsi rasio rombongan belajar terhadap laboratorium yang kemudian ditampilkan seperti pada gambar 14. Pada gambar 14 dapat dilihat Pulau Sumatera memiliki rasio rombongan belajar terhadap laboratorium SD/MI di Indonesia yang paling tinggi sejumlah 30% pada tahun 2015-2017 dan sejumlah 29% pada tahun 2018. Sedangkan, Pulau Maluku memiliki rasio rombongan belajar terhadap laboratorium SD/MI di Indonesia yang paling rendah sejumlah 8% pada tahun 2015 dan 7% pada tahun 2016-2018.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menemukan ketimpangan antara Pulau Maluku dengan pulau lainnya yang ada di Indonesia. Pulau Maluku sebagai pulau yang memiliki rasio rombel terhadap laboratorium terendah tingkat SD/MI memerlukan perhatian khusus agar bisa berkembang seperti pulau-pulau lain yang ada di Indonesia.

#### 1.1.4.1.3. 5 Kabupaten/Kota dengan rasio rombongan belajar terhadap laboratorium SD/MI tertinggi dan terendah di Indonesia tahun 2015-2018

Rasio rombel terhadap laboratorium SD/MI ditunjukkan oleh jumlah rombel terhadap jumlah laboratorium SD/MI. Semakin tinggi angka rasionya, maka semakin besar jumlah rombel yang menggunakan laboratorium tersebut. Dan sebaliknya, semakin rendah angka rasionya maka semakin sedikit rombel yang menggunakan laboratorium tersebut. Oleh karena itu, semakin kecil rasio rombel terhadap laboratorium, maka semakin efektif pengadaan laboratorium pada daerah tersebut. Berikut adalah data rasio rombel terhadap laboratorium SD/MI tahun 2015-2018 tertinggi di Indonesia.

**Tabel 18: 5 Kabupaten/Kota dengan rasio rombongan belajar terhadap laboratorium SD/MI tertinggi di Indonesia tahun 2015-2018**

No	2015		2016		2017		2018	
	kab/kota	jml	kab/kota	jml	kab/kota	jml	kab/kota	Jml
1	Lamongan	42	Sumedang	40	Lamongan	40	Lamongan	38
2	Sumedang	37	Balangan	39	Muara Enim	40	Pinrang	38
3	Kota Cimahi	36	Sarolangun	39	Pesisir Barat	39	Gayo Lues	38
4	Pasuruan	35	Klaten	38	Kota Palembang	39	Manokwari	37
5	Gayo Lues	34	Kota Cimahi	38	Gayo Lues	38	Pangkajene Kepulauan	37

Sumber: *Dapodikdasmn, 2019 diolah oleh penulis*

Rasio rombel terhadap laboratorium SD/MI ini diperoleh dari pembagian jumlah rombel dengan jumlah laboratorium. Dari rumus tersebut, diperoleh rasio rombel terhadap laboratorium SD/MI yang kemudian diambil 5 daerah dengan rasio rombel terhadap laboratorium SD/MI tertinggi di Indonesia sebagaimana yang ditunjukkan oleh tabel 18. Pada tabel 18 dapat dilihat bahwa terdapat daerah di Indonesia dengan jumlah laboratorium yang kurang sehingga belum bisa digunakan secara efektif dalam proses belajar mengajar. Pada urutan tertinggi yaitu Kabupaten Lamongan, Jawa Timur pada tahun 2015, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat tahun 2016, dan kembali Kabupaten Lamongan, Jawa Timur pada tahun 2017-2018.

Selanjutnya, data mengenai 5 daerah dengan rasio rombel terhadap laboratorium SD/MI terendah di Indonesia pada tahun 2015-2018 dapat dilihat pada tabel 19 tersebut.

**Tabel 19: 5 Kabupaten/Kota dengan rasio rombongan belajar terhadap laboratorium SD/MI terendah di Indonesia tahun 2015-2018**

no	2015		2016		2017		2018	
	kab/kota	jml	kab/kota	jml	kab/kota	Jml	kab/kota	Jml
1	Kepulauan Seribu	10	Mandailing Natal	8	Puncak Jaya	10	Nduga	10
2	Pakpak Bharat	10	Buton Selatan	10	Kepulauan Seribu	10	Kepulauan Seribu	10
3	Kepulauan Sula	11	Kepulauan Seribu	10	Nduga	10	Lingga	11
4	Jakarta Barat	11	Wakatobi	10	Lingga	10	Puncak Jaya	11
5	Sleman	12	Kota Bitung	10	Maluku Tenggara	11	Barito Selatan	11

Sumber: *Dapodikdasmem, 2019 diolah oleh penulis*

Rasio rombel terhadap laboratorium SD/MI ini diperoleh dari pembagian jumlah rombel dengan jumlah laboratorium. Dari rumus tersebut, diperoleh rasio rombel terhadap laboratorium SD/MI yang kemudian diambil 5 daerah dengan rasio rombel terhadap laboratorium SD/MI terendah di Indonesia sebagaimana yang ditunjukkan oleh tabel 19. Pada tabel 19 dapat dilihat bahwa tahun 2015 Kabupaten Kepulauan Seribu, D.K.I Jakarta memiliki rasio rombel terhadap laboratorium SD/MI terendah di Indonesia dengan jumlah 10. Lalu tahun 2016 Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara memiliki rasio rombel terhadap laboratorium SD/MI terendah di Indonesia dengan jumlah 8. Kemudian tahun 2017 Kabupaten Puncak Jaya, Papua memiliki rasio rombel terhadap laboratorium SD/MI terendah di Indonesia dengan jumlah 10. Selain itu, tahun 2018 Kabupaten Nduga, Papua memiliki rasio rombel terhadap laboratorium SD/MI terendah di Indonesia dengan jumlah 10.

Sedangkan, tahun 2015 Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta memiliki rasio rombel terhadap laboratorium SD/MI terendah urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 12. Lalu tahun 2016 Kota Bitung, Sulawesi Utara memiliki rasio rombel terhadap laboratorium SD/MI terendah urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 10. Kemudian tahun 2017 Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku memiliki rasio rombel terhadap laboratorium SD/MI terendah urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 11. Selain itu, tahun 2018 Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah memiliki rasio rombel terhadap laboratorium SD/MI terendah urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 11. Berdasarkan data pada tabel 20, dapat diketahui

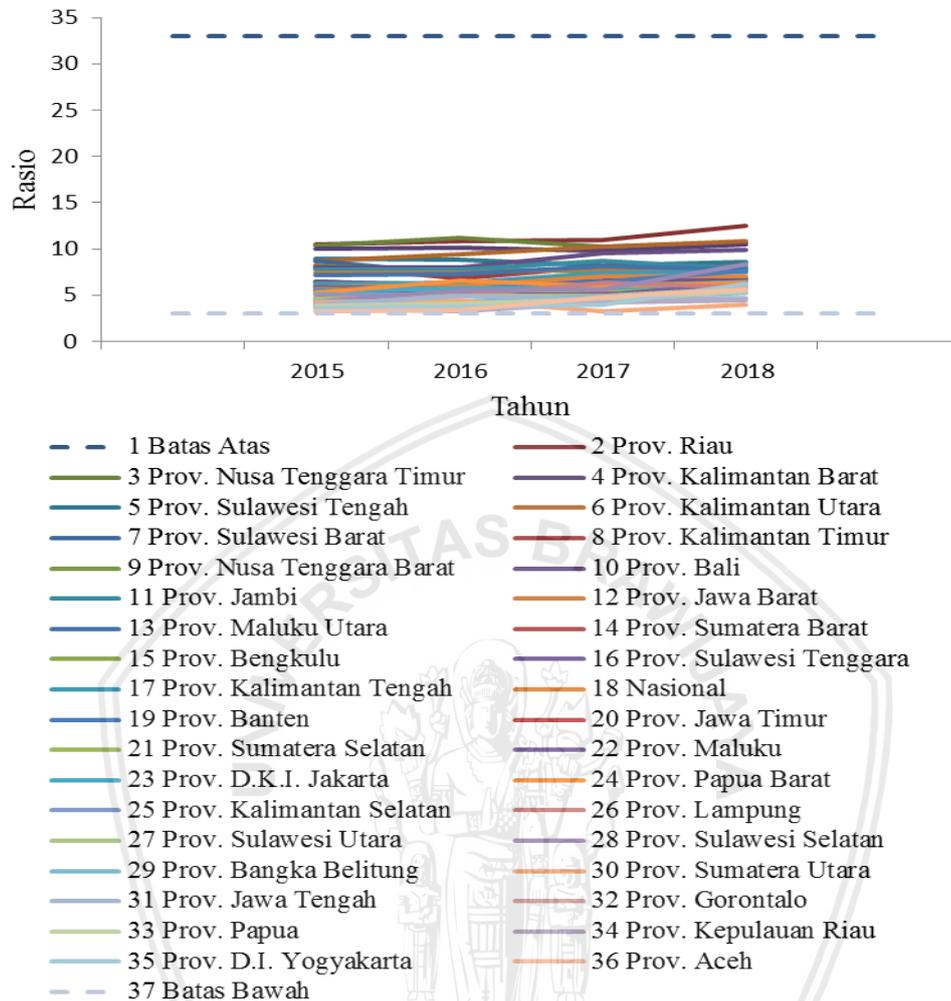
bahwa jumlah rasio rombel terhadap laboratorium SD/MI di Indonesia sesuai pada standar.

#### **1.1.4.2. Laboratorium SMP/MTs di Indonesia tahun 2015-2018**

##### **1.1.4.2.1. Rasio rombongan belajar terhadap laboratorium SMP/MTs tahun 2015-2018 berdasarkan provinsi di Indonesia**

Rasio rombel terhadap laboratorium SMP/MTs ditunjukkan oleh jumlah rombel terhadap jumlah laboratorium SMP/MTs. Semakin tinggi angka rasionya, maka semakin besar jumlah rombel yang menggunakan laboratorium tersebut. Dan sebaliknya, semakin rendah angka rasionya maka semakin sedikit rombel yang menggunakan laboratorium tersebut. Oleh karena itu, semakin kecil rasio rombel terhadap laboratorium, maka semakin efektif pengadaan laboratorium pada provinsi tersebut.

Berdasarkan Permendikbud No 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pasal 26 yang berisi bahwa satu sekolah SMP/MTs paling sedikit memiliki jumlah rombongan belajar sejumlah 3 dan paling banyak sejumlah 33 rombongan belajar. Berikut adalah data rasio rombel terhadap laboratorium SMP/MTs tahun 2015-2018 berdasarkan provinsi di Indonesia.



**Gambar 15: Rasio Rombongan belajar terhadap laboratorium SMP/MTs Tahun 2015-2018 berdasarkan Provinsi di Indonesia**

Sumber: *Dapodikdasmn, 2019 diolah oleh penulis*

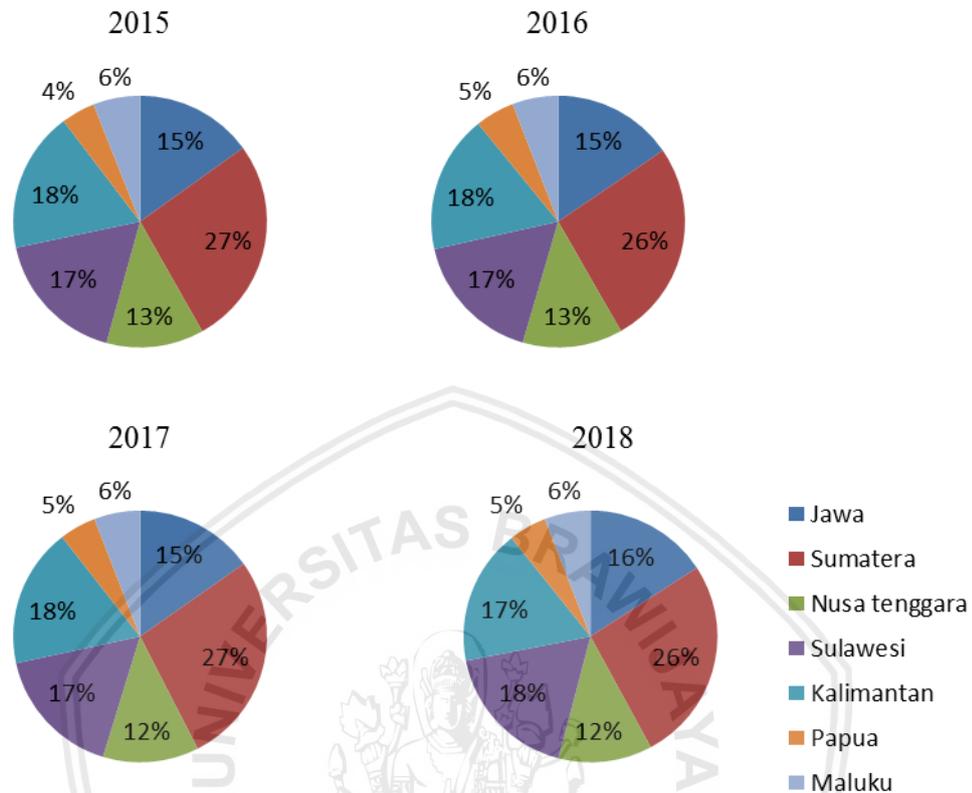
Rasio rombel terhadap laboratorium SMP/MTs ini diperoleh dari pembagian jumlah rombel dengan jumlah laboratorium SMP/MTs di Indonesia tahun 2015-2018. Dari rumus tersebut, diperoleh rasio rombel terhadap laboratorium SMP/MTs di Indonesia tahun 2015-2018 yang kemudian ditampilkan seperti pada gambar 15. Pada gambar 15 dapat dilihat bahwa Provinsi Riau memiliki rasio rombel terhadap laboratorium SMP/MTs di Indonesia yang paling tinggi sejumlah 10 pada tahun 2015, 11 pada tahun 2016, 11 pada tahun 2017 dan sejumlah 13

pada tahun 2018. Sedangkan, Provinsi Aceh memiliki rasio rombel terhadap laboratorium SMP/MTs di Indonesia yang paling rendah sejumlah 3 pada tahun 2015-2016, 5 pada tahun 2017 dan 6 pada tahun 2018.

Berdasarkan jumlah rasio rombel terhadap laboratorium SMP/MTs dibagi jumlah provinsi di Indonesia maka peneliti mendapatkan rata-rata nasional rasio rombel terhadap laboratorium SMP/MTs di Indonesia. Pada tahun 2015-2016 rata-rata nasional rasio rombel terhadap laboratorium SMP/MTs sejumlah 6, dan pada tahun 2017-2018 rata-rata nasional rasio rombel terhadap laboratorium SMP/MTs 7. Maka hasil dari rata-rata nasional rasio rombel terhadap laboratorium SMP/MTs di Indonesia menunjukkan jumlah laboratorium pada sekolah SMP/MTs di Indonesia tahun 2015-2018 dapat dikatakan efektif.

#### **1.1.4.2.2. Proporsi rasio rombongan belajar terhadap laboratorium SMP/MTs tahun 2015-2018 berdasarkan pulau di Indonesia**

Rasio rombel terhadap laboratorium SMP/MTs ditunjukkan oleh jumlah rombel terhadap jumlah laboratorium SMP/MTs. Angka rasio rombel terhadap laboratorium SMP/MTs menunjukkan proporsi rasio rombel terhadap laboratorium SMP/MTs di pulau tersebut. Semakin tingginya proporsi maka semakin besar pengadaan laboratorium pada pulau tersebut. Dan sebaliknya, semakin rendah proporsi maka semakin kecil pengadaan laboratorium pada pulau tersebut. Berikut adalah data proporsi rasio rombel terhadap laboratorium SMP/MTs tahun 2015-2018 berdasarkan Pulau di Indonesia.



**Gambar 16: Rasio rombongan belajar terhadap laboratorium SMP/MTs tahun 2015-2018 berdasarkan pulau di Indonesia**

Sumber: *Dapodikdasmem, 2019 diolah oleh penulis*

Rasio rombel terhadap laboratorium SMP/MTs ini diperoleh dari pembagian jumlah rombel dengan jumlah laboratorium. Dari rumus tersebut, diperoleh proporsi rasio rombel terhadap laboratorium yang kemudian ditampilkan seperti pada gambar 16. Pada gambar 16 dapat dilihat Pulau Sumatera memiliki rasio rombel terhadap laboratorium SMP/MTs di Indonesia yang paling tinggi sejumlah 27% pada tahun 2015, pada tahun 2016 sejumlah 26%, pada tahun 2017 sejumlah 27% dan sejumlah 26% pada tahun 2018. Sedangkan, Pulau Papua memiliki rasio rombel terhadap laboratorium SMP/MTs di Indonesia yang paling rendah sejumlah 4% pada tahun 2015, dan 5% pada tahun 2016-2018.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menemukan ketimpangan antara pulau Papua dengan pulau lainnya yang ada di Indonesia. Pulau Papua sebagai pulau yang memiliki rasio terendah memerlukan perhatian agar bisa berkembang seperti pulau-pulau lainnya yang ada di Indonesia.

#### 1.1.4.2.3. 5 Kabupaten/Kota dengan rasio rombongan belajar terhadap laboratorium SMP/MTs tertinggi dan terendah di Indonesia tahun 2015-2018

Rasio rombel terhadap laboratorium SMP/MTs ditunjukkan oleh jumlah rombel terhadap jumlah laboratorium SMP/MTs. Semakin tinggi angka rasionya, maka semakin besar jumlah rombel yang menggunakan laboratorium tersebut. Dan sebaliknya, semakin rendah angka rasionya maka semakin sedikit rombel yang menggunakan laboratorium tersebut. Oleh karena itu, semakin kecil rasio rombel terhadap laboratorium, maka semakin efektif pengadaan laboratorium pada daerah tersebut. Berikut adalah data rasio rombel terhadap laboratorium SMP/MTs tahun 2015-2018 tertinggi di Indonesia.

**Tabel 20: 5 Kabupaten/Kota dengan rasio rombongan belajar terhadap laboratorium SMP/MTs tertinggi di Indonesia tahun 2015-2018**

no	2015		2016		2017		2018	
	kab/kota	Jml	kab/kota	Jml	kab/kota	Jml	kab/kota	Jml
1	Kota Pekanbaru	17	Kota Pekanbaru	16	Kota Jambi	13	Toraja Utara	10
2	Ogan Komering Ulu	16	Kota Baubau	16	Muaro Jambi	13	Nunukan	10
3	Sumba Barat	16	Landak	16	Kota Bontang	12	Ogan Komering Ulu Selatan	10
4	Rokan Hulu	15	Sambas	15	Kota Denpasar	12	Kota Tarakan	10
5	Kampar	15	Kota Bandar Lampung	15	Badung	12	Kota Tangerang Selatan	10

Sumber: *Dapodikdasmem, 2019 diolah oleh penulis*

Rasio rombel terhadap laboratorium SMP/MTs ini diperoleh dari pembagian jumlah rombel dengan jumlah laboratorium. Dari rumus tersebut, diperoleh rasio rombel terhadap laboratorium SMP/MTs yang kemudian diambil 5 daerah dengan rasio rombel terhadap laboratorium SMP/MTs tertinggi di Indonesia sebagaimana yang ditunjukkan oleh tabel 20. Pada tabel 20 dapat dilihat bahwa tahun 2015-2016 Kota Pekanbaru, Riau memiliki rasio rombel terhadap laboratorium SMP/MTs tertinggi di Indonesia dengan jumlah 17 pada tahun 2015 dan 16 pada tahun 2016. Lalu tahun 2017 Kota Jambi, Jambi memiliki rasio rombel terhadap laboratorium SMP/MTs tertinggi di Indonesia dengan jumlah 13. Kemudian, tahun 2018 Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan memiliki rasio rombel terhadap laboratorium SMP/MTs tertinggi di Indonesia tahun 2018 sejumlah 10.

Sedangkan, tahun 2015 Kabupaten Kampar, Riau memiliki rasio rombel terhadap laboratorium SMP/MTs tertinggi urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 15. Lalu tahun 2016 Kota Bandar Lampung, Lampung memiliki rasio rombel terhadap laboratorium SMP/MTs tertinggi urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 15. Kemudian tahun 2017 Kabupaten Badung, Bali memiliki rasio rombel terhadap laboratorium SMP/MTs tertinggi urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 12. Selain itu, tahun 2018 Kota Tangerang Selatan, Banten memiliki rasio rombel terhadap laboratorium SMP/MTs tertinggi urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 10.

Selanjutnya, data mengenai 5 daerah dengan rasio rombel terhadap laboratorium SMP/MTs terendah di Indonesia pada tahun 2015-2018 dapat dilihat pada tabel 21 tersebut.

**Tabel 21: 5 Kabupaten/Kota dengan rasio rombongan belajar terhadap laboratorium SMP/MTs terendah di Indonesia tahun 2015-2018**

no	2015		2016		2017		2018	
	kab/kota	jml	kab/kota	jml	kab/kota	jml	kab/kota	Jml
1	Lingga	1	Lingga	2	Lingga	1	Lingga	1
2	Pakpak Bharat	1	Nagan Raya	2	Nias Selatan	2	Serdang Bedagai	2
3	Deiyai	2	Simeulue	2	Balangan	2	Pangkajene Kepulauan	2
4	Nagan Raya	2	Bener Meriah	2	Asahan	2	Langkat	2
5	Simeulue	2	Boven Digoel	2	Mandailing Natal	2	Karimun	2

Sumber: *Dapodikdasmen, 2019 diolah oleh penulis*

Rasio rombel terhadap laboratorium SMP/MTs ini diperoleh dari pembagian jumlah rombel dengan jumlah laboratorium. Dari rumus tersebut, diperoleh rasio rombel terhadap laboratorium SMP/MTs yang kemudian diambil 5 daerah dengan rasio rombel terhadap laboratorium SMP/MTs terendah di Indonesia sebagaimana yang ditunjukkan oleh tabel 21. Pada tabel 21 dapat dilihat bahwa Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau memiliki rasio laboratorium terhadap rombel SMP/MTs terendah di Indonesia dengan jumlah tahun 2015 sejumlah 1, tahun 2016 sejumlah 2 dan tahun 2017-2018 sejumlah 1.

Sedangkan, tahun 2015 Kabupaten Simeulue, Aceh memiliki rasio rombel terhadap laboratorium SMP/MTs terendah urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 2. Lalu tahun 2016 Kabupaten Boven Digoel, Papua memiliki rasio rombel terhadap laboratorium SMP/MTs terendah urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 2. Kemudian tahun 2017 Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Barat memiliki rasio rombel terhadap laboratorium SMP/MTs terendah urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 2. Selain itu, tahun 2018 Kabupaten Karimun,

Kepulauan Riau memiliki rasio rombel terhadap laboratorium SMP/MTs terendah urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 2.

Berdasarkan data pada tabel 21, dapat diketahui jumlah laboratorium sudah mencukupi namun jumlah siswa di daerah yang terdapat pada tabel 21 yang masih rendah sehingga jumlah rombel di daerah tersebut rendah.

## **1.2. Pembangunan sumber daya manusia pada pendidikan dasar tahun 2015-2018**

### **1.2.1. Guru SD/MI dan SMP/MTs di Indonesia tahun 2015-2018**

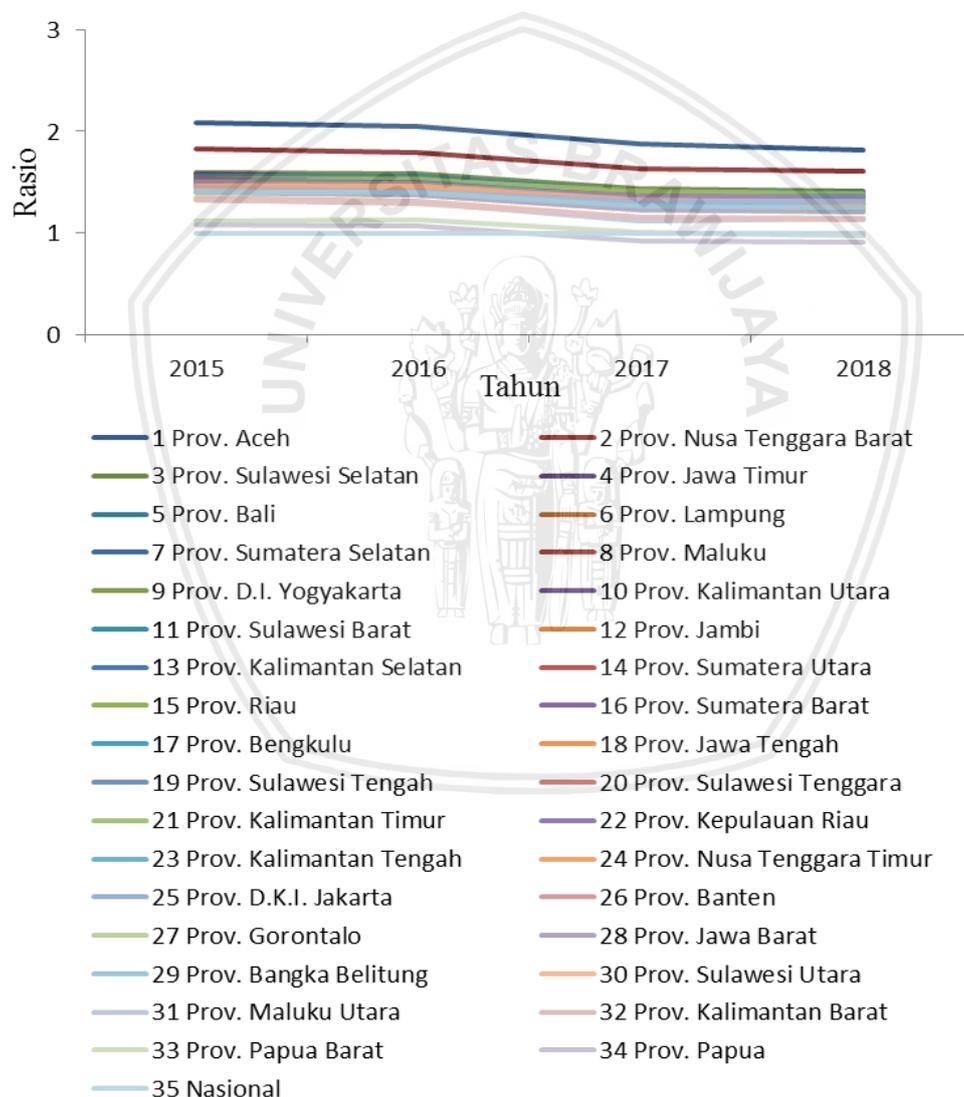
Guru adalah seorang tenaga pendidik profesional yang mendidik, mengajarkan suatu ilmu, membimbing, melatih, memberikan penilaian, serta melakukan evaluasi kepada peserta didik. Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti menunjukkan jumlah guru pada SD/MI dan SMP/MTs di Indonesia pada tahun 2015-2018 penyebarannya belum merata. Berikut hasil penelitian rasio guru terhadap rombongan belajar SD/MI dan SMP/MTs di Indonesia tahun 2015-2018.

#### **1.2.1.1. Guru SD/MI di Indonesia Tahun 2015-2018**

##### **1.2.1.1.1. Rasio guru terhadap rombongan belajar SD/MI tahun 2015-2018 berdasarkan provinsi di Indonesia**

Rasio guru terhadap rombongan belajar (rombel) SD/MI ditunjukkan oleh jumlah guru terhadap jumlah rombel SD/MI. Semakin tinggi angka rasionya, maka semakin besar jumlah rombel yang diajarkan oleh guru tersebut. Dan sebaliknya, semakin rendah angka rasionya maka semakin sedikit rombel yang diajarkan oleh guru tersebut. Berdasarkan Permendikbud No 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun

2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota bahwa satu guru ditetapkan mengajar satu rombongan SD/MI. Oleh karena itu, semakin kecil rasio guru terhadap rombongan belajar maka semakin efektif proses pengajaran pada provinsi tersebut. Berikut adalah data rasio guru terhadap rombongan belajar SD/MI tahun 2015-2018 berdasarkan Provinsi di Indonesia



**Gambar 17: Rasio guru terhadap rombongan belajar SD/MI tahun 2015-2018 berdasarkan provinsi di Indonesia**

Sumber: *Dapodikdasmen, 2019 diolah oleh penulis*

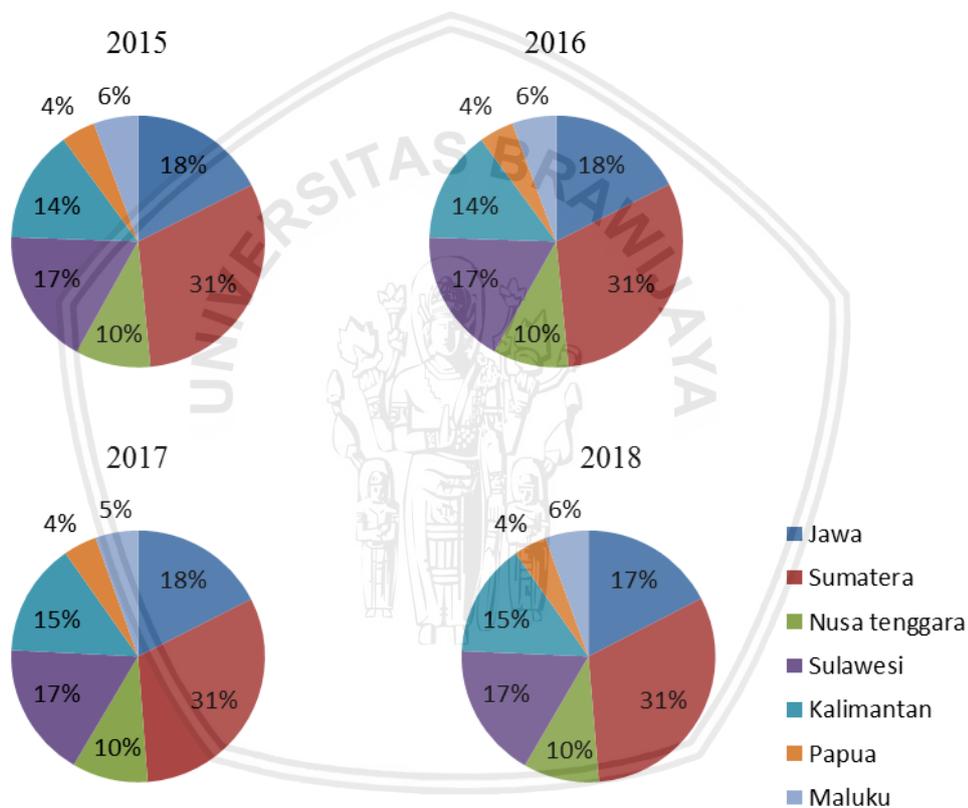
Rasio guru terhadap rombongan belajar SD/MI ini diperoleh dari pembagian jumlah guru dengan jumlah rombel SD/MI. Dari rumus tersebut, diperoleh rasio guru terhadap rombongan belajar SD/MI di Indonesia tahun 2015-2018 yang kemudian ditampilkan seperti pada gambar 17. Pada gambar 17 dapat dilihat bahwa Provinsi Aceh memiliki rasio guru terhadap rombongan belajar SD/MI di Indonesia yang paling tinggi sejumlah 2 selama tahun 2015-2018. Sedangkan, Provinsi Papua memiliki rasio guru terhadap rombongan belajar SD/MI di Indonesia yang paling rendah sejumlah 1 pada tahun 2015-2018.

Berdasarkan Permendikbud No 23 Tahun 2013 mengenai jumlah rasio guru terhadap rombel, maka Provinsi Aceh dan Nusa Tenggara Barat melebihi jumlah standar dan memerlukan adanya penambahan jumlah guru SD/MI. Hasil data jumlah rasio guru terhadap rombongan belajar SD/MI dibagi jumlah provinsi di Indonesia maka peneliti mendapatkan rata-rata nasional rasio guru terhadap rombongan belajar SD/MI di Indonesia. Pada tahun 2015-2018 rata-rata nasional rasio guru terhadap rombongan belajar SD/MI sejumlah 1. Maka hasil dari rata-rata nasional rasio guru terhadap rombongan belajar SD/MI di Indonesia menunjukkan jumlah guru pada sekolah SD/MI di Indonesia tahun 2015-2018 dapat dikatakan efektif.

#### **1.2.1.1.2. Proporsi rasio guru terhadap rombongan belajar SD/MI tahun 2015-2018 berdasarkan pulau di Indonesia**

Rasio guru terhadap rombongan belajar (rombel) SD/MI ditunjukkan oleh jumlah guru terhadap jumlah rombel SD/MI. Angka rasio guru terhadap rombongan belajar SD/MI menunjukkan proporsi rasio guru terhadap rombongan

belajar SD/MI di pulau tersebut. Semakin tingginya proporsi maka semakin besar jumlah guru pada pulau tersebut. Dan sebaliknya, semakin rendah proporsi maka semakin kecil jumlah guru pada pulau tersebut. Berikut adalah data proporsi rasio guru terhadap rombongan belajar SD/MI tahun 2015-2018 berdasarkan pulau di Indonesia.



**Gambar 18: Rasio guru terhadap rombongan belajar SD/MI tahun 2015-2018 berdasarkan pulau di Indonesia**

Sumber: *Dapodikdasmn, 2019 diolah oleh penulis*

Rasio guru terhadap rombongan belajar SD/MI ini diperoleh dari pembagian jumlah guru dengan jumlah rombel. Dari rumus tersebut, diperoleh proporsi rasio guru terhadap rombongan belajar yang kemudian ditampilkan seperti pada gambar 18. Pada gambar 18 dapat dilihat Pulau Sumatera memiliki rasio guru terhadap

rombongan belajar SD/MI di Indonesia yang paling tinggi sejumlah 31% pada tahun 2015-2018. Sedangkan, Pulau Papua memiliki rasio rombel terhadap laboratorium SD/MI di Indonesia yang paling rendah sejumlah 4% pada tahun 2015-2018.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menemukan ketimpangan antara Pulau Papua dengan pulau-pulau lain yang ada di Indonesia. Pulau Papua sebagai pulau dengan jumlah rasio guru terhadap rombel SD/MI terendah di Indonesia memerlukan perhatian khusus agar bisa berkembang seperti pulau-pulau lain yang ada di Indonesia.

#### **1.2.1.1.3. 5 Kabupaten/Kota dengan rasio guru terhadap rombongan belajar SD/MI tertinggi dan terendah di Indonesia tahun 2015-2018**

Rasio guru terhadap rombongan belajar SD/MI ditunjukkan oleh jumlah guru terhadap jumlah rombel SD/MI. Semakin tinggi angka rasionya, maka semakin besar jumlah rombel yang diajarkan oleh guru tersebut. Dan sebaliknya, semakin rendah angka rasionya maka semakin sedikit rombel yang diajarkan oleh guru tersebut. Berdasarkan Permendikbud No 23 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan menteri pendidikan nasional nomor 15 tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal pendidikan dasar di kabupaten/kota bahwa satu guru ditetapkan mengajar satu rombel SD/MI. Oleh karena itu, semakin kecil rasio guru terhadap rombongan belajar maka semakin efektif proses pengajaran pada daerah tersebut.

**Tabel 22: 5 Kabupaten/Kota dengan rasio guru terhadap rombongan belajar SD/MI tertinggi di Indonesia tahun 2015-2018**

No	2015		2016		2017		2018	
	kab/kota	jml	kab/kota	Jml	kab/kota	Jml	kab/kota	Jml
1	Pidie Jaya	3	Pidie Jaya	3	Pidie Jaya	3	Pidie Jaya	3
2	Kota Bima	3	Kota Bima	3	Kota Bima	3	Kota Bima	3
3	Kota Payakumbuh	3	Bima	3	Bima	3	Bima	2
4	Bima	3	Bireuen	3	Aceh Barat Daya	2	Bireuen	2
5	Bireuen	3	Aceh Barat Daya	3	Bireuen	2	Kota Sabang	2

Sumber: *Dapodikdasmn, 2019 diolah oleh penulis*

Rasio guru terhadap rombongan belajar SD/MI ini diperoleh dari pembagian jumlah guru dengan jumlah rombel. Dari rumus tersebut, diperoleh rasio guru terhadap rombongan belajar SD/MI yang kemudian diambil 5 daerah dengan rasio guru terhadap rombongan belajar SD/MI tertinggi di Indonesia sebagaimana yang ditunjukkan oleh tabel 22. Pada tabel 22 dapat dilihat bahwa tahun 2015-2018 Kabupaten Pidie Jaya, Aceh memiliki rasio guru terhadap rombongan belajar SD/MI tertinggi di Indonesia dengan jumlah 3. Sedangkan, tahun 2015 Kabupaten Bireuen, Aceh memiliki rasio guru terhadap rombongan belajar SD/MI tertinggi urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 3. Lalu tahun 2016 Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh memiliki rasio guru terhadap rombongan belajar SD/MI tertinggi urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 3. Kemudian tahun 2017 Kabupaten Bireuen, Aceh memiliki rasio guru terhadap rombongan belajar SD/MI tertinggi urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 3. Selain itu, tahun 2018 Kota Sabang, Aceh memiliki rasio guru terhadap rombongan belajar SD/MI tertinggi urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 2.

Berdasarkan data pada tabel 22, maka dapat diketahui daerah pada tabel 22 tersebut melebihi standar yang ditetapkan pada Permendikbud No 23 Tahun 2013. Maka dari itu, diperlukan penambahan guru pada daerah tersebut agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan secara efektif.

Selanjutnya, data mengenai 5 daerah dengan rasio guru terhadap rombongan belajar SD/MI terendah di Indonesia pada tahun 2015-2018 dapat dilihat pada tabel 23 tersebut.

**Tabel 23: 5 Kabupaten/Kota dengan rasio guru terhadap rombongan belajar SD/MI terendah di Indonesia tahun 2015-2018**

No	2015		2016		2017		2018	
	kab/kota	Jml	kab/kota	Jml	kab/kota	Jml	kab/kota	Jml
1	Membramo Tengah	1	Pegunungan Bintang	1	Pegunungan Bintang	1	Memberamo Raya	1
2	Memberamo Raya	1	Memberamo Raya	1	Memberamo Raya	1	Pegunungan Bintang	1
3	Yahukimo	1	Yahukimo	1	Yahukimo	1	Intan Jaya	1
4	Pegunungan Bintang	1	Yalimo	1	Pegunungan Arfak	1	Yahukimo	1
5	Raja Ampat	1	Raja Ampat	1	Asmat	1	Pegunungan Arfak	1

Sumber: *Dapodikdasmn, 2019 diolah oleh penulis*

Rasio guru terhadap rombongan belajar SD/MI ini diperoleh dari pembagian jumlah guru dengan jumlah rombel. Dari rumus tersebut, diperoleh rasio guru terhadap rombongan belajar SD/MI yang kemudian diambil 5 daerah dengan rasio guru terhadap rombongan belajar SD/MI terendah di Indonesia sebagaimana yang ditunjukkan oleh tabel 23. Pada tabel 23 dapat dilihat bahwa tahun 2015 Kabupaten Membramo Tengah, Papua memiliki rasio guru terhadap rombongan belajar SD/MI terendah di Indonesia dengan jumlah 1. Lalu tahun 2016-2017 Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua memiliki rasio guru terhadap rombongan belajar

SD/MI terendah di Indonesia dengan jumlah 1. Kemudian tahun 2018 Kabupaten Membramo Raya, Papua memiliki rasio guru terhadap rombongan belajar SD/MI terendah di Indonesia dengan jumlah 1.

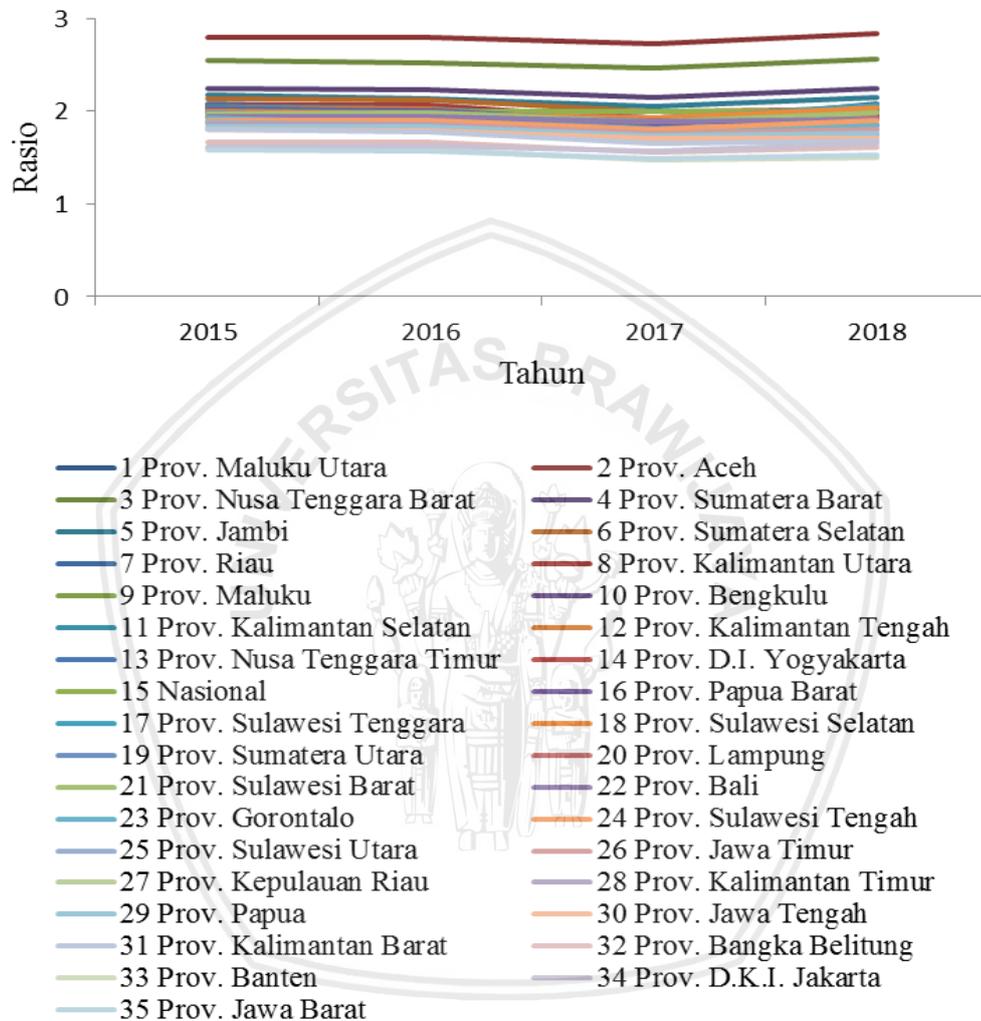
Sedangkan, tahun 2015-2016 Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat memiliki rasio guru terhadap rombongan belajar SD/MI terendah urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 1. Lalu tahun 2017 Kabupaten Asmat, Papua memiliki rasio guru terhadap rombongan belajar SD/MI terendah urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 1. Kemudian tahun 2018 Kabupaten Pegunungan Arfak memiliki rasio guru terhadap rombongan belajar SD/MI terendah urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 1.

#### **1.2.1.2. Guru SMP/MTs di Indonesia tahun 2015-2018**

##### **1.2.1.2.1. Rasio guru terhadap rombongan belajar SMP/MTs tahun 2015-2018 berdasarkan provinsi di Indonesia**

Rasio guru terhadap rombongan belajar SMP/MTs ditunjukkan oleh jumlah guru terhadap jumlah rombel SMP/MTs. Semakin tinggi angka rasionya, maka semakin besar jumlah rombel yang diajarkan oleh guru tersebut. Dan sebaliknya, semakin rendah angka rasionya maka semakin sedikit rombel yang diajarkan oleh guru tersebut. Berdasarkan Permendikbud No 23 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan menteri pendidikan nasional nomor 15 tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal pendidikan dasar di kabupaten/kota bahwa satu guru ditetapkan mengajar satu rombel SMP/MTs. Oleh karena itu, semakin kecil rasio guru terhadap rombongan belajar maka semakin efektif proses pengajaran pada

provinsi tersebut. Berikut adalah data rasio guru terhadap rombongan belajar SMP/MTs tahun 2015-2018 berdasarkan Provinsi di Indonesia.



**Gambar 19: Rasio guru terhadap rombongan belajar SMP/MTs tahun 2015-2018 berdasarkan provinsi di Indonesia**

Sumber: *Dapodikdasmen, 2019 diolah oleh penulis*

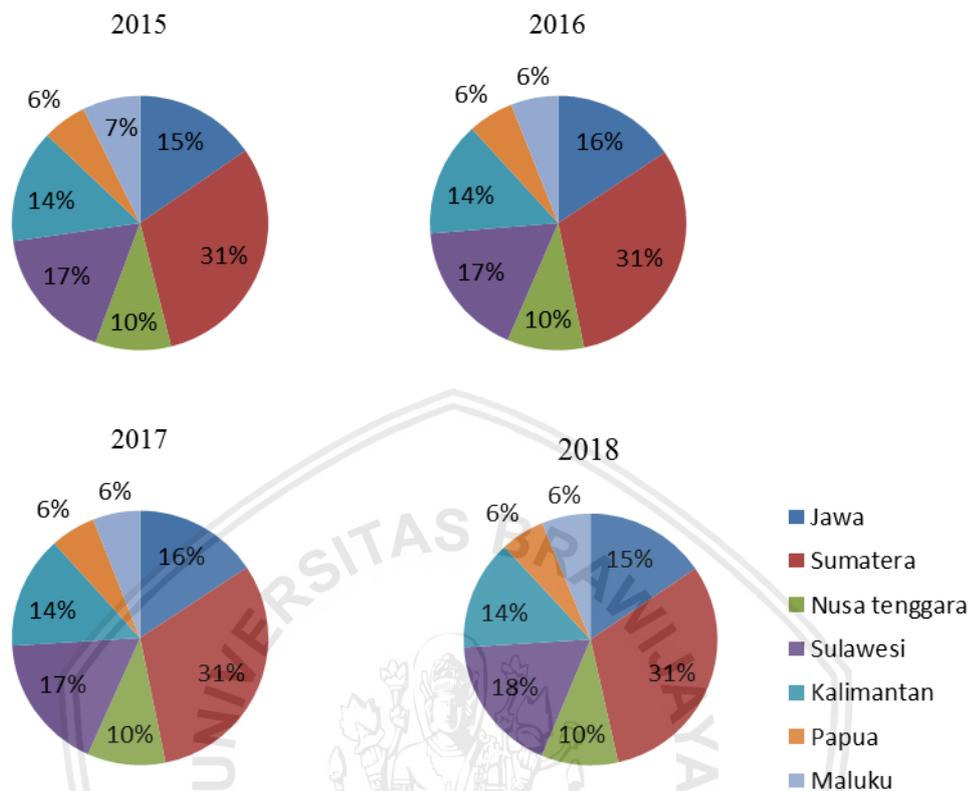
Rasio guru terhadap rombongan belajar SMP/MTs ini diperoleh dari pembagian jumlah guru dengan jumlah rombel SMP/MTs. Dari rumus tersebut, diperoleh rasio guru terhadap rombongan belajar SMP/MTs di Indonesia tahun 2015-2018 yang kemudian ditampilkan seperti pada gambar 20. Pada gambar 20

dapat dilihat bahwa Provinsi Maluku Utara memiliki rasio guru terhadap rombongan belajar SMP/MTs di Indonesia yang paling tinggi sejumlah 2 pada tahun 2015-2018. Sedangkan Provinsi Jawa Barat memiliki rasio guru terhadap rombongan belajar SMP/MTs di Indonesia yang paling rendah sejumlah 2 pada tahun 2015-2016, sejumlah 1 pada tahun 2017 dan sejumlah 2 pada tahun 2018.

Berdasarkan jumlah rasio guru terhadap rombongan belajar SMP/MTs dibagi jumlah provinsi di Indonesia maka peneliti mendapatkan rata-rata nasional rasio guru terhadap rombongan belajar SMP/MTs di Indonesia. Pada tahun 2015-2018 rata-rata nasional rasio guru terhadap rombongan belajar SMP/MTs sejumlah 2. Maka hasil dari rata-rata nasional rasio guru terhadap rombongan belajar SMP/MTs di Indonesia menunjukkan jumlah guru pada sekolah SMP/MTs di Indonesia tahun 2015-2018 dapat dikatakan kurang efektif dan memerlukan tambahan guru agar kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan efektif.

#### **1.2.1.2.2. Proporsi rasio guru terhadap rombongan belajar SMP/MTs tahun 2015-2018 berdasarkan pulau di Indonesia**

Rasio guru terhadap rombongan belajar SMP/MTs ditunjukkan oleh jumlah guru terhadap jumlah rombel SMP/MTs. Angka rasio guru terhadap rombongan belajar SMP/MTs menunjukkan proporsi rasio guru terhadap rombongan belajar SMP/MTs di pulau tersebut. Semakin tingginya proporsi maka semakin besar jumlah guru pada pulau tersebut. Dan sebaliknya, semakin rendah proporsi maka semakin kecil jumlah guru pada pulau tersebut. Berikut adalah data proporsi rasio guru terhadap rombongan belajar SMP/MTs tahun 2015-2018 berdasarkan Pulau di Indonesia.



**Gambar 20: Rasio guru terhadap rombongan belajar SMP/MTs tahun 2015-2018 berdasarkan pulau di Indonesia**

Sumber: *Dapodikdasmn, 2019 diolah oleh penulis*

Rasio guru terhadap rombongan belajar SMP/MTs ini diperoleh dari pembagian jumlah guru dengan jumlah rombel. Dari rumus tersebut, diperoleh proporsi rasio guru terhadap rombongan belajar yang kemudian ditampilkan seperti pada gambar 20. Pada gambar 20 dapat dilihat Pulau Sumatera memiliki rasio guru terhadap rombongan belajar SD/MI di Indonesia yang paling tinggi sejumlah 31% pada tahun 2015-2018. Sedangkan, Pulau Papua memiliki rasio rombel terhadap laboratorium SD/MI di Indonesia yang paling rendah sejumlah 6% pada tahun 2015-2018.

Berdasarkan data diatas peneliti menemukan ketimpangan antara Pulau Papua dengan pulau lain yang ada di Indonesia. Pulau Papua sebagai pulau dengan jumlah rasio guru terhadap rombel SMP/MTs terendah memerlukan perhatian khusus agar bisa berkembang seperti pulau-pulau lainnya yang ada di Indonesia.

#### 1.2.1.2.3. 5 Kabupaten/Kota dengan rasio guru terhadap rombongan belajar SMP/MTs tertinggi dan terendah di Indonesia tahun 2015-2018

Rasio guru terhadap rombongan belajar SMP/MTs ditunjukkan oleh jumlah guru terhadap jumlah rombel SMP/MTs. Semakin tinggi angka rasionya, maka semakin besar jumlah rombel yang diajarkan oleh guru tersebut. Dan sebaliknya, semakin rendah angka rasionya maka semakin sedikit rombel yang diajarkan oleh guru tersebut. Berdasarkan Permendikbud No 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota bahwa satu guru ditetapkan mengajar satu rombel SMP/MTs. Oleh karena itu, semakin kecil rasio guru terhadap rombongan belajar maka semakin efektif proses pengajaran pada daerah tersebut.

**Tabel 24: 5 Kabupaten/Kota dengan rasio guru terhadap rombongan belajar SMP/MTs tertinggi di Indonesia tahun 2015-2018**

No	2015		2016		2017		2018	
	kab/kota	jml	kab/kota	Jml	kab/kota	jml	kab/kota	Jml
1	Kota Sabang	4	Pidie Jaya	4	Pidie Jaya	4	Pidie Jaya	4
2	Pidie Jaya	4	Kota Sabang	4	Bener Meriah	4	Kerinci	4
3	Bener Meriah	4	Bener Meriah	4	Bima	4	Bima	4
4	Bima	4	Bima	4	Kerinci	4	Pidie	4
5	Kerinci	3	Kerinci	3	Kota Sabang	4	Kota Sabang	3

Sumber: *Dapodikdasmn, 2019 diolah oleh penulis*

Rasio guru terhadap rombongan belajar SMP/MTs ini diperoleh dari pembagian jumlah guru dengan jumlah rombel. Dari rumus tersebut, diperoleh rasio guru terhadap rombongan belajar SMP/MTs yang kemudian diambil 5 daerah dengan rasio guru terhadap rombongan belajar SMP/MTs tertinggi di Indonesia sebagaimana yang ditunjukkan oleh tabel 24. Pada tabel 24 dapat dilihat bahwa tahun 2015-2016 Kota Sabang, Aceh memiliki rasio guru terhadap rombongan belajar SMP/MTs tertinggi di Indonesia dengan jumlah 4. Sedangkan, tahun 2016-2018 Kabupaten Pidie Jaya, Aceh memiliki rasio guru terhadap rombongan belajar SMP/MTs tertinggi di Indonesia dengan jumlah 4.

Sedangkan, tahun 2015-2016 Kabupaten Kerinci, Jambi memiliki rasio guru terhadap rombongan belajar SMP/MTs tertinggi urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 3. Lalu tahun 2017-2018 Kota Sabang, Aceh memiliki rasio guru terhadap rombongan belajar SMP/MTs tertinggi urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 4 tahun 2017 dan sejumlah 3 tahun 2018.

Berdasarkan data pada tabel 24 dapat diketahui bahwa daerah tersebut jumlah rasio guru terhadap rombel melebihi ketentuan pada Permendikbud No 23 Tahun 2013, sehingga memerlukan tambahan jumlah guru SMP/MTs agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif.

Selanjutnya, data mengenai 5 daerah dengan rasio guru terhadap rombongan belajar SMP/MTs terendah di Indonesia pada tahun 2015-2018 dapat dilihat pada tabel 25 tersebut.

**Tabel 25: 5 Kabupaten/Kota dengan rasio guru terhadap rombongan belajar SMP/MTs terendah di Indonesia tahun 2015-2018**

No	2015		2016		2017		2018	
	kab/kota	jml	kab/kota	jml	kab/kota	jml	kab/kota	Jml
1	Karawang	1	Pegunungan Bintang	1	Pegunungan Bintang	1	Pandeglang	1
2	Cianjur	1	Mappi	1	Mappi	1	Pegunungan Bintang	1
3	Tolikara	1	Karawang	1	Cianjur	1	Mappi	1
4	Bogor	1	Cianjur	1	Karawang	1	Kota Depok	1
5	Mappi	1	Bogor	1	Tangerang	1	Sukabumi	1

Sumber: *Dapodikdasmem, 2019 diolah oleh penulis*

Rasio guru terhadap rombongan belajar SMP/MTs ini diperoleh dari pembagian jumlah guru dengan jumlah rombel. Dari rumus tersebut, diperoleh rasio guru terhadap rombongan belajar SMP/MTs yang kemudian diambil 5 daerah dengan rasio guru terhadap rombongan belajar SMP/MTs terendah di Indonesia sebagaimana yang ditunjukkan oleh tabel 25. Pada tabel 25 dapat dilihat bahwa tahun 2015 Kabupaten Karawang, Jawa barat memiliki rasio guru terhadap rombongan belajar SMP/MTs terendah di Indonesia dengan jumlah 1. Lalu tahun 2016-2017 Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua memiliki rasio guru terhadap rombongan belajar SMP/MTs terendah di Indonesia dengan jumlah 1. Kemudian tahun 2018 Kabupaten Pandeglang, Banten memiliki rasio guru terhadap rombongan belajar SMP/MTs terendah di Indonesia dengan jumlah 1.

Sedangkan, tahun 2015 Kabupaten Mappi, Papua memiliki rasio guru terhadap rombongan belajar SMP/MTs terendah urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 1. Lalu tahun 2016 Kabupaten Bogor, Jawa Barat memiliki rasio guru terhadap rombongan belajar SMP/MTs terendah urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 1. Kemudian tahun 2017 Kabupaten Tangerang, Banten memiliki

rasio guru terhadap rombongan belajar SMP/MTs terendah urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 1. Selain itu, tahun 2018 Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat memiliki rasio guru terhadap rombongan belajar SMP/MTs terendah urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 1.

Berdasarkan data pada tabel 25 maka dapat diketahui daerah tersebut memiliki jumlah rasio guru terhadap rombongan belajar sudah sesuai dengan ketentuan pada Permendikbud No 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota.

### **1.2.2. Pegawai SD/MI dan SMP/MTs di Indonesia Tahun 2015-2018**

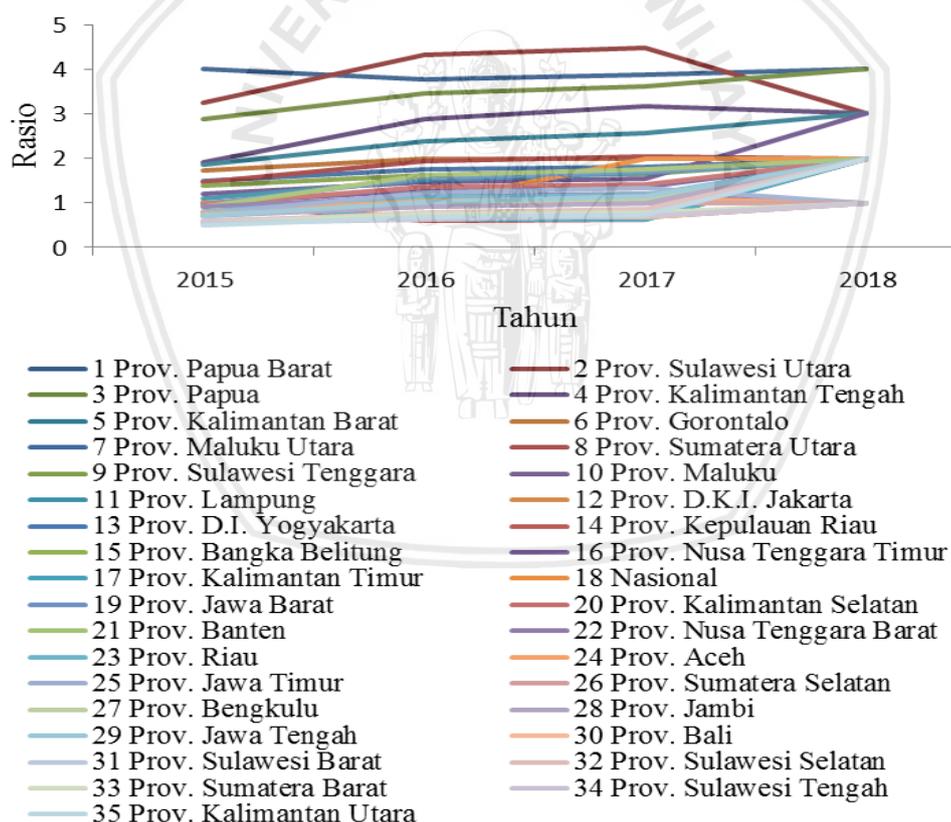
Pegawai sekolah adalah semua manusia yang tergabung dalam kerjasama pada suatu sekolah dalam bidang non-edukatif untuk melaksanakan tugas-tugas dalam mencapai tujuan pendidikan. Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti menunjukkan jumlah rasio gedung sekolah dengan pegawai SD/MI dan SMP/MTs di Indonesia pada tahun 2015-2018 penyebarannya belum merata di seluruh Indonesia. Berikut adalah hasil penelitian rasio gedung sekolah terhadap pegawai SD/MI dan SMP/MTs di Indonesia tahun 2015-2018.

#### **1.2.2.1. Pegawai SD/MI di Indonesia tahun 2015-2018**

##### **1.2.2.1.1. Rasio Gedung Sekolah terhadap pegawai SD/MI Tahun 2015-2018 berdasarkan Provinsi di Indonesia**

Rasio gedung sekolah terhadap pegawai SD/MI ditunjukkan oleh jumlah gedung sekolah terhadap jumlah pegawai SD/MI. Semakin tinggi angka rasionya,

maka semakin besar jumlah pegawai yang bertugas pada sekolah tersebut. Dan sebaliknya, semakin rendah angka rasionya maka semakin sedikit jumlah pegawai yang bertugas pada sekolah tersebut. Berdasarkan Permendiknas No 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah menjelaskan bahwa standar tenaga administrasi sekolah/madrasah mencakup kepala tenaga administrasi, pelaksana urusan dan petugas layanan khusus sekolah/madrasah. Berikut adalah data rasio gedung sekolah terhadap pegawai tahun 2015-2018 berdasarkan Provinsi di Indonesia.



**Gambar 21: Rasio gedung sekolah terhadap pegawai SD/MI tahun 2015-2018 berdasarkan provinsi Indonesia**

Sumber: *Dapodikdasmn*, 2019 diolah oleh penulis

Rasio gedung sekolah terhadap pegawai SD/MI ini diperoleh dari pembagian jumlah gedung sekolah dengan jumlah pegawai. Dari rumus tersebut, diperoleh

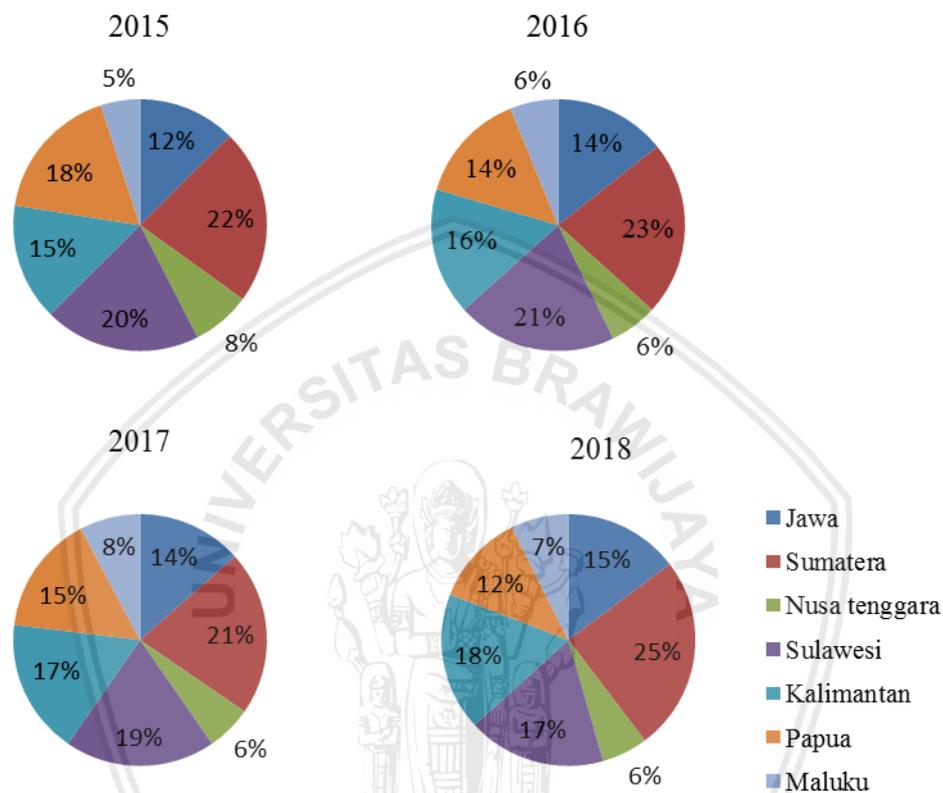
rasio gedung sekolah terhadap pegawai yang kemudian ditampilkan seperti pada gambar 21. Pada gambar 21 dapat dilihat bahwa Provinsi Papua Barat memiliki rasio gedung sekolah terhadap pegawai SD/MI di Indonesia yang paling tinggi sejumlah 4 pada tahun 2015-2018. Sedangkan, Provinsi Kalimantan Utara memiliki rasio gedung sekolah terhadap pegawai SD/MI di Indonesia yang paling rendah sejumlah 1 pada tahun 2015-2017, sedangkan sejumlah 2 pada tahun 2018.

Sesuai dengan Permendiknas No 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah maka jumlah pegawai pada Kalimantan Utara tidak sesuai dengan ketentuan dan diperlukan penambahan pegawai agar kegiatan belajar mengajar dapat lebih efektif. Berdasarkan jumlah rasio gedung sekolah terhadap pegawai SD/MI dibagi jumlah provinsi di Indonesia maka peneliti mendapatkan rata-rata nasional rasio gedung sekolah terhadap pegawai SD/MI di Indonesia. Pada tahun 2015-2016 rata-rata nasional rasio gedung sekolah terhadap pegawai SD/MI sejumlah 1, kemudian tahun 2017-2018 sejumlah 2.

#### **1.2.2.1.2. Proporsi rasio gedung sekolah terhadap pegawai SD/MI tahun 2015-2018 berdasarkan pulau di Indonesia**

Rasio gedung sekolah terhadap pegawai SD/MI ditunjukkan oleh jumlah gedung sekolah terhadap jumlah pegawai SD/MI. Angka rasio gedung sekolah terhadap pegawai SD/MI menunjukkan proporsi rasio gedung sekolah terhadap pegawai SD/MI di pulau tersebut. Semakin tingginya proporsi maka semakin besar jumlah pegawai SD/MI pada pulau tersebut. Dan sebaliknya, semakin rendah proporsi maka semakin kecil jumlah pegawai SD/MI pada pulau tersebut.

Berikut adalah data proporsi gedung sekolah terhadap pegawai SD/MI tahun 2015-2018 berdasarkan Pulau di Indonesia.



**Gambar 22: Rasio gedung sekolah terhadap pegawai SD/MI tahun 2015-2018 berdasarkan pulau di Indonesia**

Sumber: *Dapodikdasmen, 2019 diolah oleh penulis*

Rasio gedung sekolah terhadap pegawai SD/MI ini diperoleh dari pembagian jumlah gedung sekolah dengan jumlah pegawai. Dari rumus tersebut, diperoleh proporsi rasio gedung sekolah terhadap pegawai yang kemudian ditampilkan seperti pada gambar 22. Pada gambar 22 dapat dilihat Pulau Sumatera memiliki rasio gedung sekolah terhadap pegawai SD/MI di Indonesia yang paling tinggi sejumlah 22% pada tahun 2015, sejumlah 23 pada 2016, selanjutnya sejumlah 21% pada tahun 2017 Lalu sejumlah 25% pada tahun 2018. Sedangkan Pulau Nusa Tenggara memiliki rasio gedung sekolah terhadap pegawai SD/MI di

Indonesia yang paling rendah sejumlah 8% pada tahun 2015 dan 6% pada tahun 2016-2018.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menemukan ketimpangan antara Pulau Nusa Tenggara dengan pulau-pulau lain yang ada di Indonesia. Pulau Nusa Tenggara sebagai pulau yang memiliki rasio gedung sekolah terhadap pegawai SMP/MTs terendah ini memerlukan perhatian khusus agar bisa berkembang seperti pulau-pulau lainnya yang ada di Indonesia.

#### **1.2.2.1.3. 5 Kabupaten/Kota dengan rasio gedung sekolah terhadap pegawai SD/MI tertinggi dan terendah di Indonesia tahun 2015-2018**

Rasio gedung sekolah terhadap pegawai SD/MI ditunjukkan oleh jumlah gedung sekolah terhadap jumlah pegawai SD/MI. Semakin tinggi angka rasionya, maka semakin besar jumlah pegawai yang bertugas pada sekolah tersebut. Dan sebaliknya, semakin rendah angka rasionya maka semakin sedikit jumlah pegawai yang bertugas pada sekolah tersebut. Berdasarkan Permendiknas No 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah menjelaskan bahwa standar tenaga administrasi sekolah/madrasah mencakup kepala tenaga administrasi, pelaksana urusan dan petugas layanan khusus sekolah/madrasah. Berikut adalah data rasio gedung sekolah terhadap pegawai SD/MI tertinggi di Indonesia tahun 2015-2018.

**Tabel 26: 5 Kabupaten/Kota dengan rasio gedung sekolah terhadap pegawai SD/MI terbanyak di Indonesia tahun 2015-2018**

no	2015		2016		2017		2018	
	kab/kota	jml	kab/kota	jml	kab/kota	jml	kab/kota	Jml
1	Membramo Tengah	35	Tolikara	70	Tolikara	71	Kota Tarakan	6
2	Puncak	31	Lanny Jaya	69	Lanny Jaya	69	Sumbawa Barat	5
3	Nduga	22	Membramo Tengah	35	Membramo Tengah	35	Karimun	5
4	Waropen	18	Puncak Jaya	31	Dogiyai	32	Kota Yogyakarta	5
5	Minahasa Selatan	17	Pegunungan Arfak	29	Pegunungan Arfak	31	Mahakam Ulu	5

Sumber: *Dapodikdasmn, 2019 diolah oleh penulis*

Rasio gedung sekolah terhadap pegawai SD/MI ini diperoleh dari pembagian jumlah gedung sekolah dengan jumlah pegawai. Dari rumus tersebut, diperoleh rasio gedung sekolah terhadap pegawai SD/MI yang kemudian diambil 5 daerah dengan rasio gedung sekolah terhadap pegawai SD/MI tertinggi di Indonesia sebagaimana yang ditunjukkan oleh tabel 26. Pada tabel 26 dapat dilihat bahwa tahun 2015 Kabupaten Membramo Tengah, Papua memiliki rasio gedung sekolah terhadap pegawai SD/MI tertinggi di Indonesia sejumlah 35. Lalu tahun 2016-2017 Kabupaten Tolikara, Papua memiliki rasio gedung sekolah terhadap pegawai SD/MI tertinggi di Indonesia sejumlah 70 dan 71. Sedangkan tahun 2018 Kota Tarakan, Kalimantan Utara memiliki rasio gedung sekolah terhadap pegawai SD/MI tertinggi di Indonesia sejumlah 6.

Sedangkan, tahun 2015 Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara memiliki rasio gedung sekolah terhadap pegawai SD/MI tertinggi urutan kelima di Indonesia sejumlah 17. Lalu tahun 2016-2017 Kabupaten Pegunungan Arfak,

Papua Barat memiliki rasio gedung sekolah terhadap pegawai SD/MI tertinggi urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 29 pada tahun 2016 dan 31 pada tahun 2017. Selain itu, tahun 2018 Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur memiliki rasio gedung sekolah terhadap pegawai SD/MI tertinggi urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 5.

Berdasarkan data pada tabel 26 dapat diketahui daerah diatas memiliki jumlah pegawai yang belum mencukupi untuk berjalannya proses belajar mengajar secara efektif, maka dari itu diperlukan kebijakan pemerintah untuk memperhatikan daerah-daerah pada tabel 26 agar bisa menjalankan proses belajar mengajar secara efektif.

Selanjutnya, data mengenai 5 daerah dengan rasio gedung sekolah terhadap pegawai SD/MI terendah di Indonesia pada tahun 2015-2018 dapat dilihat pada tabel 27 tersebut.

**Tabel 27: 5 Kabupaten/Kota dengan rasio gedung sekolah terhadap pegawai SD/MI terendah di Indonesia tahun 2015-2018**

no	2015		2016		2017		2018	
	kab/kota	jml	kab/kota	jml	kab/kota	Jml	kab/kota	Jml
1	Kota Singkawang	1	Kota Singkawang	1	Kota Singkawang	1	Kab. Nduga	1
2	Pasaman	1	Pasaman	1	Pasaman	1	Kab. Landak	1
3	Tegal	1	Tegal	1	Tegal	1	Kab. Puncak Jaya	1
4	Bengkulu Selatan	1	Bengkulu Selatan	1	Kab. Belitung	1	Kab. Memberamo Raya	1
5	Kepahiang	1	Kepahiang	1	Kab. Bantaeng	1	Kab. Boven Digoel	1

Sumber: *Dapodikdasmn, 2019 diolah oleh penulis*

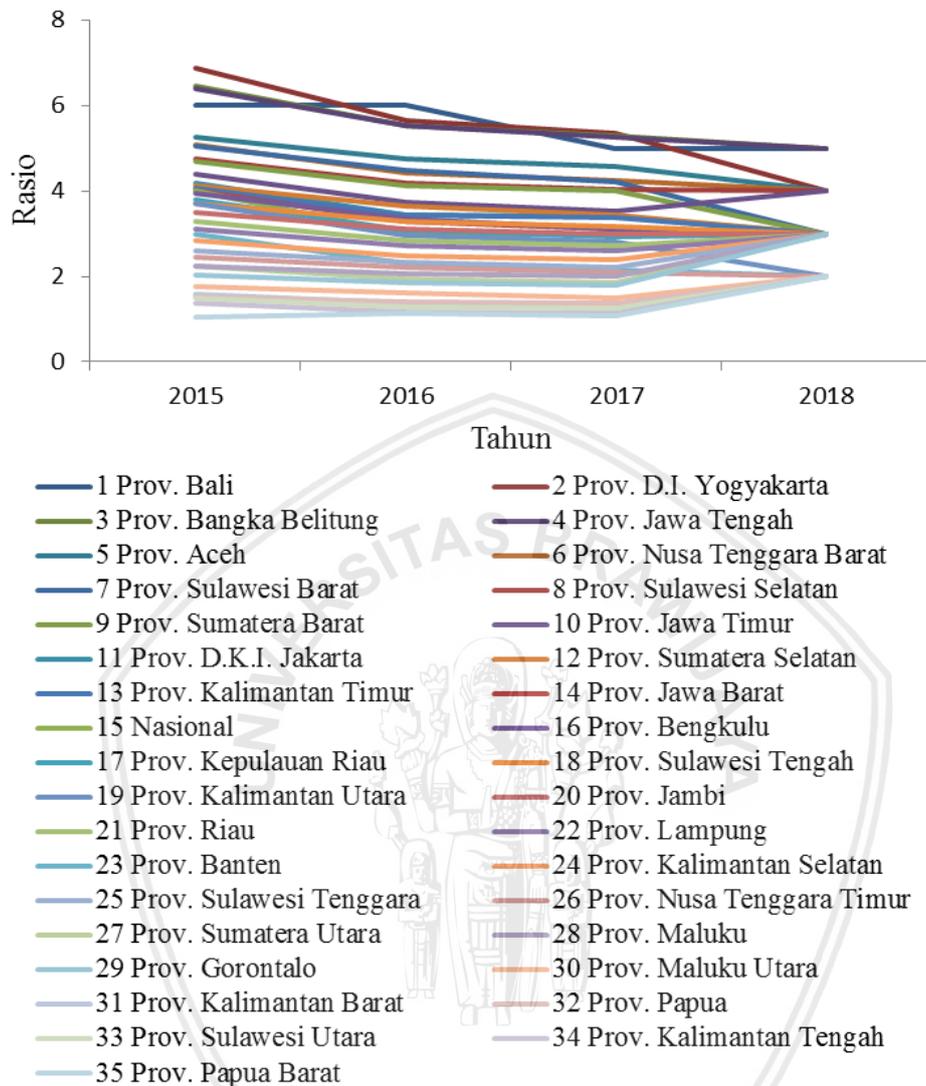
Rasio gedung sekolah terhadap pegawai SD/MI ini diperoleh dari pembagian jumlah gedung sekolah dengan jumlah pegawai. Dari rumus tersebut, diperoleh rasio gedung sekolah terhadap pegawai SD/MI yang kemudian diambil 5 daerah dengan rasio gedung sekolah terhadap pegawai SD/MI terendah di Indonesia sebagaimana yang ditunjukkan oleh tabel 27. Pada tabel 27 dapat dilihat bahwa Kota Singkawang, Kalimantan Barat memiliki rasio gedung sekolah terhadap pegawai SD/MI terendah di Indonesia dengan jumlah 1 pada tahun 2015-2017. Lalu Kabupaten Nduga, Papua memiliki rasio gedung sekolah terhadap pegawai SD/MI terendah di Indonesia pada tahun 2018 sejumlah 1.

Sedangkan, tahun 2015-2016 Kabupaten Kepahiyang, Bengkulu memiliki rasio gedung sekolah terhadap pegawai SD/MI terendah urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 1. Lalu tahun 2017 Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan memiliki rasio gedung sekolah terhadap pegawai SD/MI terendah urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 1. Kemudian tahun 2018 Kabupaten Boven Digoel, Papua memiliki rasio gedung sekolah terhadap pegawai SD/MI terendah urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 1. Berdasarkan data diatas dapat diketahui daerah yang terdapat pada tabel 27 memiliki jumlah pegawai yang belum mencukupi untuk kegiatan belajar mengajar. Sehingga diperlukan penambahan jumlah pegawai untuk mendukung proses belajar mengajar.

### **1.2.2.2. Pegawai pada SMP/MTs di Indonesia tahun 2015-2018**

#### **1.2.2.2.1. Rasio gedung sekolah terhadap pegawai SMP/MTs tahun 2015-2018 berdasarkan provinsi di Indonesia**

Rasio gedung sekolah terhadap pegawai SMP/MTs ditunjukkan oleh jumlah gedung sekolah terhadap jumlah pegawai SMP/MTs. Semakin tinggi angka rasionya, maka semakin besar jumlah pegawai yang bertugas pada sekolah tersebut. Dan sebaliknya, semakin rendah angka rasionya maka semakin sedikit jumlah pegawai yang bertugas pada sekolah tersebut. Berdasarkan Permendiknas No 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah menjelaskan bahwa standar tenaga administrasi sekolah/madrasah mencakup kepala tenaga administrasi, pelaksana urusan dan petugas layanan khusus sekolah/madrasah. Berikut adalah data rasio gedung sekolah terhadap pegawai SMP/MTs tahun 2015-2018 berdasarkan Provinsi di Indonesia.



**Gambar 23: Rasio gedung sekolah terhadap pegawai SMP/MTs tahun 2015-2018 berdasarkan provinsi di Indonesia**

Sumber: *Dapodikdasmen, 2019 diolah oleh penulis*

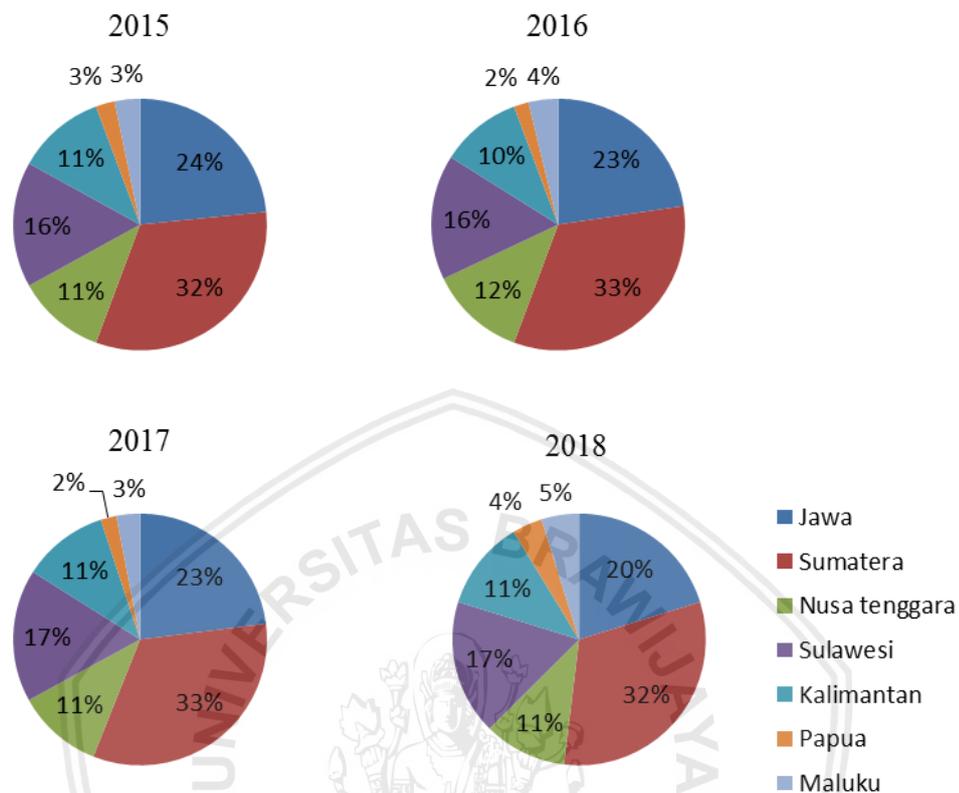
Rasio gedung sekolah terhadap pegawai SMP/MTs ini diperoleh dari pembagian jumlah gedung sekolah dengan pegawai. Dari rumus tersebut, diperoleh rasio gedung sekolah terhadap pegawai yang kemudian ditampilkan seperti pada gambar 23. Pada gambar 23 dapat dilihat bahwa Provinsi Bali memiliki rasio gedung sekolah terhadap pegawai SMP/MTs di Indonesia yang paling tinggi sejumlah 6 pada tahun 2015-2016, dan 5 pada tahun 2017-2018.

Sedangkan, Provinsi Papua Barat memiliki rasio gedung sekolah terhadap pegawai SMP/MTs di Indonesia yang paling rendah sejumlah 1 pada tahun 2015-2017 dan 2 pada tahun 2018.

Sesuai dengan Permendiknas No 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah maka jumlah pegawai pada Papua Barat tidak sesuai dengan ketentuan dan diperlukan penambahan pegawai agar kegiatan belajar mengajar dapat lebih efektif. Berdasarkan jumlah rasio gedung sekolah terhadap pegawai SMP/MTs dibagi jumlah provinsi di Indonesia maka peneliti mendapatkan rata-rata nasional rasio gedung sekolah terhadap pegawai SMP/MTs di Indonesia. Pada tahun 2015 rata-rata nasional rasio gedung sekolah terhadap pegawai SMP/MTs sejumlah 4, lalu tahun 2016-2018 sejumlah 3.

#### **1.2.2.2.2. Proporsi rasio gedung sekolah terhadap pegawai SMP/MTs tahun 2015-2018 berdasarkan pulau di Indonesia**

Rasio gedung sekolah terhadap pegawai SMP/MTs ditunjukkan oleh jumlah gedung sekolah terhadap jumlah pegawai SMP/MTs. Angka rasio gedung sekolah terhadap pegawai SMP/MTs menunjukkan proporsi rasio gedung sekolah terhadap pegawai SMP/MTs di pulau tersebut. Semakin tingginya proporsi maka semakin besar jumlah pegawai SMP/MTs pada pulau tersebut. Dan sebaliknya, semakin rendah proporsi maka semakin kecil jumlah pegawai SMP/MTs pada pulau tersebut. Berikut adalah data proporsi rasio gedung sekolah terhadap pegawai SD/MI tahun 2015-2018 berdasarkan Pulau di Indonesia.



**Gambar 24: Rasio Gedung sekolah terhadap pegawai SMP/MTs Tahun 2015-2018 berdasarkan Pulau di Indonesia**

Sumber: *Dapodikdasmn, 2019 diolah oleh penulis*

Rasio gedung sekolah terhadap pegawai SMP/MTs ini diperoleh dari pembagian jumlah gedung sekolah dengan jumlah pegawai. Dari rumus tersebut, diperoleh proporsi rasio gedung sekolah terhadap pegawai yang kemudian ditampilkan seperti pada gambar 24. Pada gambar 24 dapat dilihat Pulau Sumatera memiliki rasio gedung sekolah terhadap pegawai SMP/MTs di Indonesia yang paling tinggi sejumlah 32% pada tahun 2015 dan sejumlah 33% pada tahun 2016-2017. Kemudian sejumlah 32% pada tahun 2018. Sedangkan Pulau Papua memiliki rasio gedung sekolah terhadap pegawai SMP/MTs di Indonesia yang

paling rendah sejumlah 3% pada tahun 2015, 2% pada tahun 2016-2017 dan sejumlah 4% pada tahun 2018.

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti menemukan ketimpangan antara Pulau Papua dengan pulau-pulau lain yang ada di Indonesia. Pulau Papua sebagai pulau yang memiliki rasio gedung sekolah terhadap pegawai SMP/MTs terendah ini memerlukan perhatian khusus agar bisa berkembang seperti pulau-pulau lainnya yang ada di Indonesia.

#### **1.2.2.2.3. 5 Kabupaten/Kota dengan rasio gedung sekolah terhadap pegawai SMP/MTs tertinggi dan terendah di Indonesia tahun 2015-2018**

Rasio gedung sekolah terhadap pegawai SMP/MTs ditunjukkan oleh jumlah gedung sekolah terhadap jumlah pegawai SMP/MTs. Semakin tinggi angka rasionya, maka semakin besar jumlah pegawai yang bertugas pada sekolah tersebut. Dan sebaliknya, semakin rendah angka rasionya maka semakin sedikit jumlah pegawai yang bertugas pada sekolah tersebut. Berdasarkan Permendiknas No 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah menjelaskan bahwa standar tenaga administrasi sekolah/madrasah mencakup kepala tenaga administrasi, pelaksana urusan dan petugas layanan khusus sekolah/madrasah. Berikut adalah data rasio gedung sekolah terhadap pegawai SMP/MTs tertinggi di Indonesia tahun 2015-2018.

**Tabel 28: 5 Kabupaten/Kota dengan rasio gedung sekolah terhadap pegawai SMP/MTs terbanyak di Indonesia tahun 2015-2018**

No	2015		2016		2017		2018	
	kab/kota	jml	kab/kota	Jml	kab/kota	jml	kab/kota	jml
1	Kota Langsa	14	Kota Langsa	12	Kota Langsa	12	Kab. Tabanan	13
2	Kab. Bangli	12	Kab. Tabanan	12	Kab. Tabanan	12	Kota Langsa	12
3	Kab. Tabanan	12	Kab. Bangli	11	Kab. Bangli	11	Kab. Bangli	11
4	Kota Tarakan	12	Kab. Tulungagung	10	Kab. Tulungagung	10	Kota Magelang	11
5	Kab. Tulungagung	11	Kota Bima	10	Kota Bima	10	Kab. Tulungagung	11

Sumber: *Dapodikdasmem, 2019 diolah oleh penulis*

Rasio gedung sekolah terhadap pegawai SMP/MTs ini diperoleh dari pembagian jumlah gedung sekolah dengan jumlah pegawai. Dari rumus tersebut, diperoleh rasio gedung sekolah terhadap pegawai SMP/MTs yang kemudian diambil 5 daerah dengan rasio gedung sekolah terhadap pegawai SMP/MTs tertinggi di Indonesia sebagaimana yang ditunjukkan oleh tabel 28. Pada tabel 28 dapat dilihat bahwa tahun 2015-2017 Kota Langsa, Aceh memiliki rasio gedung sekolah terhadap pegawai SMP/MTs tertinggi di Indonesia dengan jumlah tahun 2015 sejumlah 14 lalu tahun 2016-2017 sejumlah 12. Sedangkan tahun 2018 kabupaten Tabanan, Bali memiliki rasio gedung sekolah terhadap pegawai SMP/MTs tertinggi di Indonesia sejumlah 13.

Sedangkan, tahun 2015 Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur memiliki rasio gedung sekolah terhadap pegawai SMP/MTs tertinggi urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 11. Lalu tahun 2016-2017 Kota Bima, Nusa Tenggara Timur memiliki rasio gedung sekolah terhadap pegawai SMP/MTs tertinggi urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 10. Kemudian tahun 2018 Kabupaten

Tulungagung, Jawa Timur memiliki rasio gedung sekolah terhadap pegawai SMP/MTs tertinggi urutan kelima di Indonesia sejumlah 11.

Selanjutnya, data mengenai 5 daerah dengan rasio gedung sekolah terhadap pegawai SMP/MTs terendah di Indonesia pada tahun 2015-2018 dapat dilihat pada tabel 29 tersebut.

**Tabel 29: 5 Kabupaten/Kota dengan rasio gedung sekolah terhadap pegawai SMP/MTs terendah di Indonesia tahun 2015-2018**

no	2015		2016		2017		2018	
	kab/kota	jml	kab/kota	jml	kab/kota	jml	kab/kota	Jml
1	Minahasa Tenggara	1	Maybrat	1	Membramo Tengah	1	Membramo Tengah	1
2	Seram Bagian Timur	1	Gorontalo Utara	1	Nduga	1	Nduga	1
3	Boven Digoel	1	Sorong	1	Tolikara	1	Tolikara	1
4	Maybrat	1	Pulau Taliabu	1	Lanny Jaya	1	Lanny Jaya	1
5	Tambrauw	1	Kota Tual	1	Pegunungan Bintang	1	Pegunungan Bintang	1

Sumber: *Dapodikdasmn, 2019 diolah oleh penulis*

Rasio gedung sekolah terhadap pegawai SMP/MTs ini diperoleh dari pembagian jumlah gedung sekolah dengan jumlah pegawai. Dari rumus tersebut, diperoleh gedung sekolah terhadap pegawai SMP/MTs yang kemudian diambil 5 daerah dengan rasio gedung sekolah terhadap pegawai SMP/MTs terendah di Indonesia sebagaimana yang ditunjukkan oleh tabel 29. Pada tabel 29 dapat dilihat bahwa tahun 2015 Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara memiliki rasio gedung sekolah terhadap pegawai SMP/MTs terendah di Indonesia dengan jumlah 1. Selanjutnya pada tahun 2016 Kabupaten Maybrat, Papua Barat memiliki rasio gedung sekolah terhadap pegawai SMP/MTs terendah di Indonesia dengan jumlah

1. Lalu pada tahun 2017-2018 Kabupaten Membramo Tengah, Papua memiliki rasio gedung sekolah terhadap pegawai SMP/MTs terendah di Indonesia dengan jumlah 1.

Sedangkan, tahun 2015 Kabupaten Tambrauw, Papua Barat memiliki rasio gedung sekolah terhadap pegawai SMP/MTs terendah urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 1. Lalu tahun 2016 Kota Tual, Maluku memiliki rasio gedung sekolah terhadap pegawai SMP/MTs terendah urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 1. Kemudian tahun 2017-2018 Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua memiliki rasio gedung sekolah terhadap pegawai SMP/MTs terendah urutan kelima di Indonesia dengan jumlah 1.

Berdasarkan data diatas dapat diketahui daerah yang terdapat pada tabel 29 memiliki jumlah pegawai yang belum mencukupi untuk kegiatan belajar mengajar. Sehingga diperlukan penambahan jumlah pegawai untuk mendukung proses belajar mengajar.

## **2. Pembahasan**

### **2.1. Pencapaian pembangunan infrastruktur pada pendidikan dasar di Indonesia tahun 2015-2018**

Dijelaskan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) mengenai pengertian infrastruktur adalah prasana, yaitu segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Pada penelitian ini prasarana yang menunjang terselenggaranya proses belajar mengajar adalah gedung sekolah, ruang kelas, perpustakaan dan laboratorium. Dalam bidang infrastruktur, diperlukan proses administrasi pembangunan yang terdapat pada buku

administrasi pembangunan, konsep, dimensi dan strateginya (Siagian, 2009:151) yaitu penentuan proyek-proyek pembangunan. Perlunya melakukan penentuan proyek pembangunan agar pembangunan infrastruktur yang dilakukan memang sesuai dengan kebutuhan. Maka, dalam hasil penelitian ini ditemukan daerah mana saja yang memang memerlukan adanya pembangunan infrastruktur.

### **2.1.1. Gedung sekolah**

Permendikbud No 17 Tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru Pasal 26 menjelaskan bahwa satu sekolah SD/MI berjumlah paling sedikit 120 siswa atau paling banyak 480 siswa. Sedangkan satu sekolah SMP/MTs berjumlah paling sedikit 60 siswa atau paling banyak 660 siswa. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini menemukan bahwa pembangunan infrastruktur gedung sekolah pada pendidikan dasar di Indonesia tahun 2015-2018 sudah mengalami peningkatan namun masih ditemukan ketimpangan pada beberapa daerah.

Dalam pembangunan gedung sekolah pada pendidikan dasar di Indonesia ditemukan pulau Maluku dan Papua menjadi pulau dengan proporsi pembangunan terendah dibandingkan dengan pulau-pulau lain. Maka, diperlukannya perhatian khusus dari pemerintah agar pembangunan gedung sekolah pada seluruh wilayah di Indonesia bisa merata tanpa adanya ketimpangan antar pulau.

Hasil dari penelitian ini peneliti menemukan pada tingkat SD/MI Provinsi D.K.I Jakarta menjadi provinsi dengan jumlah rasio siswa terhadap gedung sekolah tertinggi di Indonesia. Hal ini dikarenakan semakin tingginya jumlah siswa SD/MI yang ada di D.K.I Jakarta sehingga semakin banyak melakukan pembangunan gedung sekolah. Selain itu, penyebab Provinsi D.K.I Jakarta

memiliki rasio tertinggi karena memiliki anggaran pendidikan terbanyak di Indonesia sejumlah 18,17% dari jumlah APBD Provinsi D.K.I Jakarta.

Meskipun pembangunan infrastruktur gedung sekolah pada tingkat SD/MI tahun 2015-2018 dapat dinilai sudah ada peningkatan, namun peneliti menemukan masih ada provinsi dengan jumlah rasio siswa terhadap gedung sekolah yang jumlahnya dibawah standar Permendikbud No 17 Tahun 2017 Pasal 26 yaitu Provinsi Sulawesi Utara dan Kalimantan Tengah. Jumlah rasio yang rendah terjadi karena jumlah siswa SD/MI yang terus menurun sedangkan pembangunan gedung sekolah terus meningkat.

Selanjutnya, pada tingkat kabupaten/kota masih ditemukan daerah dengan jumlah rasio yang dibawah ketetapan Permendikbud No 17 Tahun 2017 Pasal 26. Daerah tersebut antara lain Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara; Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara; Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan; Kabupaten Maybrat, Papua Barat; Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat; dan Kabupaten Tambrau, Papua Barat. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pembangunan gedung sekolah pendidikan dasar sehingga rendahnya siswa tingkat SD/MI di daerah tersebut.

Selain itu, pada tingkat SMP/MTs tahun 2015-2018 Provinsi Bali menjadi provinsi dengan jumlah rasio siswa terhadap gedung sekolah SMP/MTs tertinggi di Indonesia. Hal ini dikarenakan semakin banyak pembangunan gedung sekolah sedangkan jumlah siswa pada Provinsi Bali menurun. Lalu, pada urutan terendah rasio siswa terhadap gedung sekolah SMP/MTs ditempati oleh Provinsi Maluku

Utara. Hal ini karena jumlah siswa menurun sedangkan pembangunan gedung sekolah meningkat.

Pada tingkat kabupaten/kota masih ditemukan daerah dengan jumlah rasio siswa SMP/MTs terhadap gedung sekolah yang tidak sesuai dengan Permendikbud No 17 tahun 2017 Pasal 26. Daerah tersebut adalah Kabupaten Intan Jaya, Papua yang terjadi karena jumlah siswa yang terus menurun setiap tahunnya.

Meningkatnya pembangunan gedung sekolah pada SD/MI dan SMP/MTs di Indonesia tidak terlepas karena meningkatnya Anggaran Biaya Operasional Sekolah (BOS). Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Kemendikbud 2015-2019, pada tahun 2009 anggaran BOS untuk SD/MI sejumlah Rp.397.000.00 lalu tahun 2012 naik sebanyak 13% menjadi Rp. 450.000.00 dan tahun 2015 naik sebanyak 78% menjadi Rp. 800.000.00. Sedangkan, anggaran BOS untuk SMP/MTs pada tahun 2009 sejumlah Rp 570.000.00 lalu tahun 2015 naik 25% menjadi Rp.710.000.00 dan tahun 2015 naik 41% menjadi Rp.1.000.000.00.

### **2.1.2. Ruang kelas**

Permendikbud No 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pasal 24 menjelaskan bahwa satu kelas SD/MI paling sedikit berisi 20 siswa atau paling banyak 28 siswa sedangkan satu kelas SMP/MTs paling sedikit berisi 20 siswa atau paling banyak 32 siswa. Tujuan diberlakukannya ketentuan diatas adalah agar tercipta kegiatan belajar mengajar yang efektif. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini menemukan pembangunan ruang kelas pada

pendidikan dasar di Indonesia sudah meningkat namun masih terdapat ketimpangan.

Pembangunan ruang kelas pada pendidikan dasar di Indonesia masih ditemukan ketimpangan terhadap Pulau Maluku dan Pulau Papua. Hal ini dapat terjadi karena jumlah sekolah yang masih rendah maka berakibat pada pembangunan ruang kelas. Diharapkan pemerintah dapat memberikan perhatian khusus terhadap daerah tertinggal yang ada di Indonesia.

Pada tingkat SD/MI dalam penelitian ini ditemukan provinsi dengan jumlah rasio siswa terhadap ruang kelas yang tidak sesuai standar ketentuan Permendikbud No 17 Tahun 2017 Pasal 24. Daerah tersebut yaitu Provinsi Riau yang mengalami jumlah rasio melebihi ketentuan karena jumlah kelas SMP/MTs menurun sedangkan jumlah siswa naik. Selanjutnya terdapat Provinsi dengan jumlah rasio dibawah ketentuan karena jumlah siswa menurun dan jumlah pembangunan ruang kelas juga menurun yaitu Provinsi Bengkulu, Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Timur, Aceh dan Sulawesi Utara.

Sedangkan pada tingkat SMP/MTs terdapat Provinsi Bali dan D.K.I Jakarta yang memiliki jumlah rasio siswa terhadap ruang kelas yang melebihi ketentuan Permendikbud No 17 Tahun 2017 Pasal 24, hal ini dikarenakan jumlah siswa naik sedangkan jumlah ruang kelas menurun. Lalu, provinsi dengan jumlah rasio dibawah standar antara lain Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Kepulauan Riau, dan Gorontalo. hal ini terjadi karena jumlah siswa SMP/MTs menurun sedangkan jumlah ruang kelas juga menurun.

Pada tingkat kabupaten/kota terdapat beberapa daerah dengan jumlah siswa yang melebihi standar untuk tiap kelasnya. Maka dibutuhkan perhatian khusus untuk pembangunan ruang kelas pada daerah tersebut agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan secara efektif. Pada tingkat SD/MI antara lain Kota Tarakan, Kalimantan Utara; Kota Lhokseumawe, Aceh; Kota Langsa, Aceh; Kota Pontianak, Kalimantan Barat dan Kab. Mimika, Papua. Selain itu untuk tingkat SMP/MTs daerah dengan jumlah rasio yang melebihi ketentuan antara lain Kota Baubau, Sulawesi Tenggara; Kota Langsa, Aceh; Kota Tarakan, Kalimantan Utara dan Kota Kupang NTT.

Meningkatnya pembangunan ruang kelas pada pendidikan dasar di Indonesia sama penyebabnya dengan peningkatan pembangunan gedung sekolah yang tidak terlepas dengan meningkatnya anggaran BOS yang telah dijelaskan sebelumnya. Walaupun telah dianggap mengalami peningkatan, namun masih banyak daerah yang mengalami ketimpangan pembangunan ruang kelas yang harus mendapat perhatian lebih dari pihak pemerintah.

### **2.1.3. Perpustakaan**

Perpustakaan merupakan tempat siswa dan guru memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka dengan membaca, mengamati, mendengar serta tempat petugas mengelola perpustakaan. Pembangunan perpustakaan pada pendidikan dasar di Indonesia sudah dikatakan meningkat namun masih terdapat ketimpangan di beberapa daerah. Ketimpangan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah antara Pulau Maluku dan Papua dengan pulau lain yang ada di

Indonesia. Hal ini disebabkan karena jumlah sekolah pada pulau tersebut belum banyak sehingga pembangunan perpustakaan memerlukan perhatian khusus.

Pada tingkat SD/MI rasio rombongan belajar (rombel) terhadap perpustakaan sudah dapat dikatakan cukup efektif namun masih ditemukan beberapa daerah dengan jumlah rasio yang melebihi standar. Provinsi tersebut antara lain Papua Barat, Sulawesi Tengah, Papua dan Jambi. Provinsi ini memiliki jumlah rasio rombel terhadap perpustakaan yang tinggi dikarenakan jumlah perpustakaan SD/MI pada daerah tersebut mengalami penurunan sehingga belum dapat mendukung kegiatan belajar mengajar secara efektif. Selain itu, pada tingkat SMP/MTs dapat dikatakan pembangunan gedung sekolah sudah mengalami peningkatan namun terdapat beberapa kabupaten/kota yang memerlukan perhatian lebih terhadap pembangunan perpustakaan.

Pada tingkat kabupaten/kota masih terdapat daerah dengan jumlah perpustakaan yang kurang sehingga memerlukan pembangunan. Antara lain pada tingkat SD/MI adalah Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat; Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat; Kabupaten Tambrauw, Papua Barat dan Kabupaten Nduga, Papua. Sedangkan pada tingkat SMP/MTs terdapat Kota Tarakan, Kalimantan Utara; Kabupaten Ngada, NTT; Kabupaten Manggarai Barat, NTT; Kota Sorong, Papua Barat dan Kota Jayapura, Papua.

Meningkatnya pembangunan perpustakaan pada pendidikan dasar di Indonesia sama penyebabnya dengan peningkatan pembangunan gedung sekolah yang tidak terlepas dengan meningkatnya anggaran BOS yang telah dijelaskan sebelumnya. Walaupun telah dianggap mengalami peningkatan, namun masih

banyak daerah yang mengalami ketimpangan pembangunan ruang kelas yang harus mendapat perhatian lebih dari pihak pemerintah terutama pada Pulau Maluku dan Papua.

#### **2.1.4. Laboratorium**

Laboratorium merupakan tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran IPA/Sains yang memerlukan peralatan khusus. Pembangunan laboratorium pada pendidikan dasar di Indonesia sudah dapat dikatakan meningkat namun tetap mengalami ketimpangan terutama Pulau Maluku dan Pulau Papua.

Dalam penelitian ini ditemukan pada tingkat SD/MI terdapat provinsi dengan rasio rombel terhadap laboratorium yang belum mencukupi untuk proses belajar mengajar. Provinsi tersebut adalah Papua Barat, Papua, Maluku, Maluku Utara dan Riau. Hal tersebut terjadi karena jumlah laboratorium yang menurun sedangkan jumlah rombel meningkat. Tahun 2018 Provinsi Papua Barat mengalami penurunan jumlah rasio rombel terhadap laboratorium dikarenakan sudah diadakannya pembangunan laboratorium, namun masih tetap menjadikan Papua Barat sebagai provinsi tertinggi dengan jumlah rasio yang diartikan bahwa pengadaan laboratorium pada daerah tersebut belum bisa memenuhi untuk proses belajar mengajar.

Pada tingkat SMP/MTs, jumlah rasio rombel terhadap laboratorium dapat dikatakan telah memenuhi untuk proses belajar mengajar. namun yang perlu diperhatikan adalah jumlah rombongan belajar yang rendah sehingga penyediaan laboratorium dalam proses belajar mengajar belum bisa dikatakan efektif.

Selanjutnya, pada tingkat kabupaten/kota masih terdapat beberapa daerah dengan jumlah laboratorium yang kurang sehingga rasio rombel terhadap laboratorium menjadi tinggi. Daerah tersebut untuk tingkat SD/MI antara lain yaitu Kabupaten Lamongan, Jawa Timur; Kabupaten Sumedang, Jawa Barat; Kabupaten Pasuruan; Kabupaten Gayo Lues, Aceh dan Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan.

Peningkatan pembangunan laboratorium pada pendidikan dasar di Indonesia dapat terjadi karena pengaruh dari meningkatnya dana BOS seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Namun peningkatan tersebut masih belum dirasakan pada beberapa daerah terutama Pulau Maluku dan Papua. Sehingga diharapkan pembangunan infrastruktur terutama pada pendidikan dasar dapat dirasakan sampai ke seluruh bagian Negara Indonesia.

## **2.2. Pencapaian Pembangunan Sumber Daya Manusia pada pendidikan dasar di Indonesia tahun 2015-2018**

Berdasarkan buku yang berjudul pengantar administrasi pembangunan, Tjokroamidjojo (1984) pembangunan sumber daya manusia pada pendidikan dasar di Indonesia sesuai dengan fungsi administrasi pembangunan yaitu melakukan upaya penyempurnaan kepegawaian. Hal tersebut sebagai upaya untuk penyempurnaan organisasi agar lebih bersifat efektif dan efisien dalam hal sumber daya manusia.

Sutrisno (2011) dalam bukunya yang berjudul manajemen sumber daya manusia telah menjelaskan bahwa sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya dan karya, semua potensi sumber daya manusia tersebut

berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Dalam hal sumber daya manusia pada pendidikan, maka guru dapat dikatakan menjadi sumber daya sebagai pengajar, pembina, pengkoreksi serta mengandalkan keahlian akademis kependidikan sedangkan pegawai dapat dikatakan sumber daya dalam bidang non-edukatif dalam hal administrasi untuk melaksanakan tugas-tugas dalam pencapaian tujuan pendidikan.

### **2.2.1. Guru**

Permendikbud No 23 Tahun 2013 menetapkan bahwa standar pelayanan minimal pendidikan dasar baik tingkat SD/MI dan SMP/MTs di kabupaten/kota menjelaskan bahwa satu guru ditetapkan mengajar satu rombel. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini menemukan bahwa pembangunan guru sebagai sumber daya manusia pada pendidikan dasar di Indonesia sudah dapat dikatakan efektif namun masih ditemukan ketimpangan, terutama pada Pulau Papua dan Pulau Maluku.

Dalam penelitian ini ditemukan pada tingkat SD/MI terdapat provinsi dengan rasio guru terhadap rombel yang jumlahnya diatas ketentuan Permendikbud No 23 Tahun 2013. Provinsi tersebut adalah Provinsi Aceh dan Nusa Tenggara Barat. Hal ini berarti jumlah guru pada provinsi berikut belum mencukupi sehingga satu guru harus mengajar lebih dari satu kelas. Sedangkan, pada tingkat SMP/MTs peneliti menemukan bahwa pada tingkat provinsi, seluruh provinsi di Indonesia jumlah rasio nya melebihi standar Permendikbud No 23 Tahun 2013. Hal ini terjadi karena jumlah guru SMP/MTs di Indonesia dapat dikatakan belum efektif untuk mendukung proses belajar mengajar.

Pada tingkat kabupaten/kota masih ditemukan daerah dengan jumlah rasio guru terhadap rombel tertinggi di Indonesia. Untuk tingkat SD/MI antara lain terdapat Kabupaten Pidie Jaya, Aceh; Kota Bima, NTB; Kabupaten Bima, NTB dan Kota Payakumbuh, Sumatera barat. Sedangkan pada tingkat SMP/MTs antara lain terdapat Kota Sabang, Aceh; Kabupaten Pidie Jaya, Aceh; Kabupaten Bener Meriah, Aceh dan Kabupaten Kerinci, Jambi.

Meningkatnya pembangunan sumber daya manusia yaitu guru pada pendidikan dasar di Indonesia walaupun sudah dapat dikatakan baik namun pemerintah harus tetap membuat kebijakan agar guru terutama pada tingkat SMP/MTs dapat menjalankan kegiatan belajar mengajar secara efektif di sekolah.

### **2.2.2. Pegawai**

Pegawai sekolah dapat diartikan semua manusia yang tergabung dalam kerjasama pada suatu sekolah dalam bidang non-edukatif untuk melaksanakan tugas-tugas dalam mencapai tujuan pendidikan. Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa pembangunan pegawai sebagai sumber daya manusia pada sekolah dasar di Indonesia tahun 2015-2018 meningkat namun masih mengalami ketimpangan terutama pada Pulau Nusa Tenggara dan Pulau Papua.

Pada tingkat provinsi, masih terdapat provinsi dengan rasio gedung sekolah terhadap pegawai yang memiliki jumlah tinggi dan juga jumlah yang paling rendah. Hal ini berarti jumlah pegawai pada provinsi tersebut belum mencukupi dalam proses belajar mengajar. Provinsi tersebut pada tingkat SD/MI adalah Provinsi Papua Barat. Pada Papua Barat ditemukan jumlah rasio gedung sekolah terhadap pegawai paling tinggi di Indonesia yang berarti jumlah pegawai belum

sesuai untuk menjalankan proses belajar mengajar secara efektif. Selanjutnya untuk rasio gedung sekolah terhadap pegawai terendah ditempati oleh Provinsi Kalimantan Utara, hal ini berarti jumlah pegawai pada provinsi tersebut masih kurang sehingga belum mencukupi dalam proses belajar mengajar.

Sedangkan pada tingkat SMP/MTs terdapat Provinsi Bali yang memiliki jumlah rasio gedung sekolah terhadap pegawai paling tinggi yang berarti jumlah pegawai belum bisa mendukung untuk proses belajar mengajar. selanjutnya terdapat Provinsi Papua Barat yang memiliki rasio gedung sekolah terhadap pegawai terendah di Indonesia. Hal ini berarti jumlah pegawai pada provinsi tersebut belum mencukupi untuk proses belajar mengajar.

Sedangkan dalam tingkat kabupaten/kota, masih terdapat beberapa daerah dengan jumlah rasio gedung sekolah terhadap pegawai yang tinggi sehingga kegiatan belajar mengajar belum efektif. Daerah tersebut pada tingkat SD/MI adalah Kabupaten Membramo tengah, Papua; Kabupaten Tolikara, Papua; Kabupaten Tarakan, Kalimantan Utara; Kabupaten Puncak, Papua dan Kabupaten Lanny Jaya, Papua. Sedangkan pada tingkat SMP/MTs adalah Kabupaten Singkawang, Kalimantan Barat; Kabupaten Nduga, Papua; Kabupaten Boven Digoel, Papua dan Kota Tual, Maluku.

Penelitian ini sesuai dengan proses administrasi pembangunan yang terdapat pada buku administrasi pembangunan, konsep, dimensi dan strateginya, Siagian (2009:151). Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk melakukan penilaian-penilaian hasil yang telah dicapai pada pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia pada pendidikan dasar di Indonesia tahun 2015-2018. Dalam teori

ini dijelaskan bahwa dari penilaian yang bersifat objektif, rasional dan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya maka dapat diketahui dalam hal penilaian akan mendapatkan hasil apakah (a) hasil melebihi target dan standar, (b) hasil sesuai dengan harapan atau (c) hasil kurang dari standar yang ditentukan.



## BAB V

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia pada pendidikan dasar di Indonesia tahun 2015-2018 telah mengalami peningkatan namun masih ditemukan ketimpangan. Hasil penelitian menunjukkan terjadi ketimpangan antara Pulau Maluku dan Pulau Papua dengan pulau lainnya yang ada di Indonesia. Hal tersebut terjadi dikarenakan masih kurangnya pembangunan infrastruktur serta penyebaran sumber daya manusia secara merata.

#### 1. Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur pada pendidikan dasar di Indonesia sudah mengalami peningkatan namun masih terdapat ketimpangan. Ketimpangan terjadi terutama pada Pulau Maluku dan Pulau Papua. Infrastruktur yang terdapat pada penelitian ini adalah gedung sekolah, ruang kelas, perpustakaan dan laboratorium.

Pembangunan gedung sekolah pada pendidikan dasar di Indonesia masih ditemukan provinsi dengan jumlah rasio yang tidak sesuai dengan Permendikbud No 17 Tahun 2017 Pasal 26. Pada tingkat SD/MI yaitu Provinsi Sulawesi Utara dan Kalimantan Tengah. Sedangkan pada tingkat SMP/MTs yaitu Provinsi Maluku Utara. Hal tersebut terjadi karena jumlah gedung sekolah tidak sesuai dengan jumlah siswa.

Sedangkan pembangunan ruang kelas pada pendidikan dasar di Indonesia juga masih ditemukan jumlah rasio yang tidak sesuai dengan Permendikbud No 17 Tahun 2017 Pasal 24. Pada tingkat SD/MI yaitu Provinsi D.K.I Jakarta, Jawa Barat, Banten, Riau, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Aceh dan Maluku. Sedangkan pada tingkat SMP/MTs yaitu Provinsi Bali, D.K.I Jakarta, Jawa Barat, Jambi, Gorontalo, Kepulauan Riau, Maluku Utara, Maluku dan Sulawesi Tenggara.

Pembangunan perpustakaan pada pendidikan dasar di Indonesia tahun 2015-2018 berdasarkan hasil penelitian tingkat provinsi sudah sesuai dengan standar dan mencukupi untuk mendukung proses belajar mengajar. sedangkan pada pembangunan laboratorium tingkat SD/MI masih terdapat provinsi dengan jumlah rasio yang tidak sesuai dengan standar yaitu Provinsi Papua Barat, Maluku, Papua, Riau dan Maluku Utara. Untuk tingkat SMP/MTs pembangunan laboratorium di Indonesia sudah sesuai dengan standar dan mencukupi untuk proses belajar mengajar.

## 2. Sumber daya manusia

Pembangunan sumber daya manusia pada pendidikan dasar di Indonesia sudah meningkat namun masih terdapat ketimpangan terutama pada Pulau Maluku dan Pulau Papua. Sumber daya manusia yang terdapat pada penelitian ini adalah guru dan pegawai.

Pembangunan guru pada pendidikan dasar di Indonesia sudah meningkat walaupun terdapat beberapa ketimpangan antar wilayah. Pada tingkat SD/MI terdapat provinsi Aceh dan Nusa Tenggara Barat yang memiliki jumlah rasio

tidak sesuai dengan Permendikbud No 23 Tahun 2003. Sedangkan pada tingkat SMP/MTs peningkatan jumlah guru dibutuhkan di seluruh Provinsi di Indonesia karena jumlah rasio melebihi dengan Permendikbud No 23 Tahun 2003.

Pembangunan pegawai pada pendidikan dasar di Indonesia telah mengalami peningkatan walaupun masih terdapat daerah yang mengalami ketimpangan. Pada tingkat SD/MI terdapat Provinsi Papua Barat dan Kalimantan Utara yang jumlah pegawai nya belum mencukupi. Sedangkan pada tingkat SMP/MTs terdapat Provinsi Bali dan Papua Barat yang jumlah pegawai nya belum mencukupi untuk proses belajar mengajar.

## **2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat daerah di Indonesia yang memiliki pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia pada pendidikan dasar yang belum efektif. Maka pemerintah dari pusat maupun pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pembangunan pendidikan dasar pada daerah-daerah tersebut. Secara keseluruhan daerah yang memerlukan pembangunan adalah Pulau Maluku dan Pulau Papua. Hampir dari seluruh bidang infrastruktur dan sumber daya manusia kedua pulau tersebut mengalami ketimpangan dengan pulau-pulau lainnya. Maka dari itu pemerintah perlu memberikan perhatian lebih untuk melakukan pembangunan pada daerah tersebut.

Pada pembangunan gedung sekolah tingkat SD/MI daerah yang memerlukan peningkatan adalah Provinsi Sulawesi Utara dan Kalimantan Selatan. Lalu pada tingkat SMP/MTs yang memerlukan pembangunan adalah Provinsi Maluku Utara. Pada pembangunan ruang kelas tingkat SD/MI daerah yang memerlukan

peningkatan adalah Provinsi Riau, Bengkulu, Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Timur, Aceh, Sulawesi Utara serta Kota Tarakan, Kalimantan Utara; Kota Lhokseumawe, Aceh; Kabupaten Batang Hari, Jambi; Kota Langsa, Aceh; dan Kabupaten Dogiyai, Papua. Pada tingkat SMP/MTs yang memerlukan peningkatan pembangunan adalah Provinsi Bali, D.K.I Jakarta, Sulawesi Tenggara, Maluku, Kepulauan Riau, Gorontalo, Maluku Utara serta Kota Baubau, Sulawesi Tenggara; Kota Pontianak, Kalimantan Barat; Kota Sorong, Papua Barat dan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Pada pembangunan perpustakaan tingkat SD/MI daerah yang memerlukan peningkatan adalah Provinsi Papua Barat, Papua, Sulawesi Tengah, Jambi serta Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat; Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat; Kabupaten Nduga, Papua; Kabupaten Puncak Jaya, Papua dan Kabupaten Maybrat, Papua Barat. Sedangkan pada tingkat SMP/MTs pembangunan perpustakaan sudah efektif untuk proses belajar mengajar.

Pada pembangunan laboratorium tingkat SD/MI daerah yang memerlukan peningkatan adalah Provinsi Papua Barat, Papua, Maluku, Maluku Utara, Riau serta Kabupaten Lamongan, Jawa Timur; Kabupaten Gayo Lues, Aceh; Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan; Kabupaten Manokwari, Papua Barat dan Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan. Sedangkan pada tingkat SMP/MTs pembangunan laboratorium sudah efektif untuk kegiatan belajar mengajar.

Berdasarkan hasil penelitian, pembangunan sumber daya manusia yaitu guru dan pegawai pada pendidikan dasar penyebarannya belum merata keseluruh

wilayah di Indonesia. Pada peningkatan guru tingkat SD/MI daerah yang memerlukan pembangunan adalah Provinsi Aceh dan Nusa Tenggara Barat serta Kabupaten Pidie Jaya, Aceh; Kota Bima, Nusa Tenggara Barat; Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat; Kabupaten Bireuen, Aceh dan Kota Sabang, Aceh. Sedangkan pada tingkat SMP/MTs peningkatan jumlah guru diperlukan pada seluruh provinsi di Indonesia.

Peningkatan pegawai tingkat SD/MI daerah yang memerlukan peningkatan adalah Provinsi Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan serta Kabupaten Nduga, Papua; Kabupaten Landak, Kalimantan Barat; Kabupaten Puncak Jaya, Papua; Kabupaten Membramo Raya, Papua dan Kabupaten Boven Digoel, Papua. Sedangkan pada tingkat SMP/MTs daerah yang memerlukan peningkatan adalah Provinsi Papua, Papua Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Kalimantan Barat serta Kabupaten Membramo Tengah, Papua; Kabupaten Nduga, Papua; Kabupaten Tolikara, Papua; Kabupaten Lanny Jaya, Papua dan Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aan, Komariah dan Cepi, Triatna. 2005. *Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Affifudin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Darmawan, Deni. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Departemen Pendidikan Indonesia. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press.
- Ihsan, Fuad. 2008. *Dasar-Dasar Kependidikan*. Bandung: Rineka Cipta Press.
- Katadata. 2016. *Anggaran Pendidikan DKI Jakarta Tertinggi di Indonesia*. (Diakses pada 14 Maret 2019 <https://databoks.katadata.co.id/data/publish/2016/08/19/anggaran-pendidikan-dki-jakarta-tertinggi-di-indonesia>).
- Kementerian Pendidikan Nasional. 2008. *Permendiknas No 24 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan Nasional. 2007. *Permendiknas No 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. *Permendikbud No 23 tahun 2013 Pasal 2 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. *Permendikbud No 17 Tahun 2017 Pasal 24 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. *Permendikbud No 17 Tahun 2017 Pasal 26 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan.



- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. 2018. *Tingkatan Mutu Pendidikan Melalui Empat Hal*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan. (diakses pada 14 Maret 2019 <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/08/tingkatkan-mutu-pendidikan-melalui-empat-hal-ini>)
- Kodoatie, Robert. 2005. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mudyahardjo, Redja. 2008. *Pengantar Pendidikan Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-Dasar Pendidikan Pada Umumnya Dan Pendidikan Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab I pasal 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab II pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab VI pasal 17 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab VIII pasal 34 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab XI pasal 39 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Siagian, Parulian Sondang. 2009. *Administrasi Pembangunan, Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soegoto, Eddy Soeryanto. 2014. *Enterpreneurhip: Menjadi Pebisnis Ulung*. Bandung: PT. Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharjo. 2006. *Mengenal Pendidikan Sekolah Dasar Teori dan Praktek*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Ketenagaan.
- Sulistiyani, Ambar dan Rosidah. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sutrisno, Edy. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Prenada Media Group.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1984. *Pengantar Administrasi pembangunan*. LP3ES: Jakarta.



